

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI UMKM  
YANG DIKELOLA OLEH POKDARWIS BANJARANDAP DI  
DESA BANJARAN KECAMATAN BOJONGSARI  
KABUPATEN PURBALINGGA**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

**Dzawi Rohmawati**

**2017104070**

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
JURUSAN KONSELING DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT  
FAKULTAS DAKWAH  
UIN PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dzawi Rohmawati

NIM : 2017104070

Jenjang : S1

Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Jurusan : Konseling dan Pengembangan Masyarakat

Fakultas : Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui UMKM Yang Dikelola Oleh Pokdarwis Banjarandap Di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga”** secara keseluruhan merupakan hasil dari penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 25 Maret 2024

Menyatakan,



**Dzawi Rohmawati**

NIM. 2017104070

**PENGESAHAN**

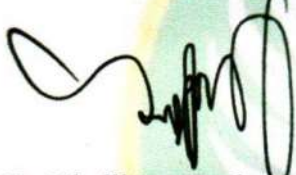
**Skripsi Berjudul**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI UMKM  
YANG DIKELOLA OLEH POKDARWIS BANJARANDAP DI DESA  
BANJARAN KECAMATAN BOJONGSARI  
KABUPATEN PURBALINGGA**

Yang disusun oleh **Dzawi Rohmawati NIM. 2017104070** Program Studi Manajemen Dakwah Jurusan Manajemen dan Komunikasi Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jumat tanggal 19 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos.) dalam KONSELING DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT**

oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing



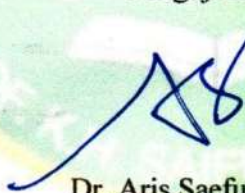
Dr. Kholil Lur Rochaman, S.Ag.M.Si.  
NIP. 19791005 200901 1 013

Sekretaris Sidang/Penguji II



Ageng Widodo, MA.  
NIP. 19930622 201903 1 015

Penguji Utama



Dr. Aris Saefulloh, MA.  
NIP. 19790125 200501 1 001

Mengesahkan,  
Purwokerto, Jum'at 26-04-2024

Dekan,



Dr. Muskinul Fuad, M.Ag.  
NIP. 197412262000031001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melaksanakan bimbingan, pengarahan, telaah dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Dzawi Rohmawati  
NIM : 2017104070  
Jenjang : S1  
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam  
Jurusan : Konseling dan Pengembangan Masyarakat  
Fakultas : Dakwah  
Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Melalui UMKM Yang Dikelola Oleh Pokarwis Banjarandap Di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diuji dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Purwokerto, 2 April 2024

Dosen Pembimbing

Dr. Kholi Lur Rochman, S.Ag., Msi

NIP. 19791005 2009001 1013



## MOTO

“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kamilah yang membagi-bagikan penghidupan di antara mereka dalam kehidupan dunia ini, dan Kami angkat derajat yang sebagian di atas yang lain beberapa derajat, supaya satu dengan yang lain dapat saling memanfaatkan. Rahmat Tuhanmu lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan.”

(QS. Az- Zukhruf Ayat 32)



**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI UMKM  
YANG DIKELOLA OLEH POKDARWIS BANJARANDAP DI DESA  
BANJARAN KECAMATAN BOJONGSARI  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**Dzawi Rohmawati**

NIM. 2017104070

Email: dzawi.rohmawati@gmail.com  
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya dalam membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera yang dilakukan secara terstruktur dan terorganisir. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *locality development* yang mampu mengembangkan potensi lokal sehingga masyarakat juga bisa berperan aktif dalam setiap prosesnya. Pokdarwis Banjarandap merupakan kelompok masyarakat yang menjadi wadah bagi masyarakat Desa Banjaran dalam melakukan program pemberdayaan mulai tahap perencanaan hingga evaluasi program, khususnya pengelolaan UMKM yang terdapat di Obyek Wisata Banjarandap. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi, proses, dan pendekatan Pokdarwis Banjarandap dalam melakukan proses pemberdayaan di Desa Banjaran Kabupaten Purbalingga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian berupa pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pokdarwis Banjarandap melakukan strategi pemberdayaan terhadap masyarakat lokal diantaranya yaitu, pembinaan dan pengelolaan UMKM, pengelolaan Desa Wisata dengan mengadakan paket wisata, serta perlindungan dan pemeliharaan lingkungan dan budaya. Program-program tersebut bertujuan guna menciptakan partisipasi masyarakat lokal secara aktif, sehingga masyarakat menjadi pemeran utama dalam proses pemberdayaan. Pendekatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pokdarwis Banjarandap menggunakan pendekatan *locality development*. Dengan seperti itu maka akan membangun perekonomian baru hingga mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada.

**Kata Kunci:** pemberdayaan masyarakat, *locality development*, UMKM.

**COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH UMKM  
MANAGED BY POKDARWIS BANJARANDAP IN BANJARAN  
VILLAGE, BOJONGSARI SUB-DISTRICT  
PURBALINGGA REGENCY**

**Dzawi Rohmawati**  
NIM. 2017104070

Email: dzawi.rohmawati@gmail.com  
Islamic Community Development Study Program  
State Islamic University Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Community empowerment is one of the efforts in building an independent and prosperous society that is carried out in a structured and organized manner. Community empowerment can be done using a locality development approach that is able to develop local potential so that people can also play an active role in every process. Pokdarwis Banjarandap is a community group that serves as a forum for the Banjaran Village community in carrying out empowerment programs from the planning stage to program evaluation, especially the management of SME in Banjarandap Tourism Objects. The purpose of this research is to find out the strategy, process, and approach of Pokdarwis Banjarandap in carrying out the empowerment process in Banjaran Village, Purbalingga Regency.

This research uses a qualitative research method with a research approach in the form of a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. This research shows that Pokdarwis Banjarandap carries out empowerment strategies for local communities, including coaching and managing SME, managing Tourism Villages by organizing tour packages, and protecting and maintaining the environment and culture. These programs aim to create active local community participation, so that the community becomes the main actor in the empowerment process. The empowerment approach taken by Pokdarwis Banjarandap uses a locality development approach. By doing so, it will build a new economy to be able to optimize existing resource.

**Keywords:** community empowerment, locality development, SME.

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk diri saya sendiri. Terima kasih telah berusaha, berjuang, bersabar, dan bekerja keras selama ini. Untuk kedepannya tetaplah berdoa, semangat, berusaha, dan berbahagialah. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Ibu Suparti dan Bapak Rokhmat yang selalu saya sayangi. Terima kasih atas segala doa, dukungan, kasih sayang dan usaha yang telah terlimpahkan kepada saya sehingga saya mampu menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi dan menjadi sarjana. Semoga Ayah dan Ibu mendapatkan kebahagiaan, kelimpahan rizky dan selalu di ridhai oleh Allah SWT. Kepada nenek dan kakek saya yang saya hormati, terima kasih telah merawat saya dari kecil hingga saat ini dengan penuh ketelatenan. Kepada adik-adik saya yang saya sayangi, Kuny Mukhrimah dan Lina Ruhani saya ucapkan terima kasih atas segala doa, dukungan dan bantuannya.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kita umat muslim.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui UMKM Yang Dikelola Oleh Pokdarwis Banjarandap Di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.”** Dengan selesainya skripsi ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sul Khan Chakim, S.Ag., M.M., Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Muskinul Fuad, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah.
6. Dr. Ahmad Muttaqin, M.Si, Wakil Dekan I Fakultas Dakwah.
7. Dr. Alief Budiyono, M.Pd, Wakil Dekan II Fakultas Dakwah.
8. Dr. Nawawi, M.Hum, Wakil Dekan III Fakultas Dakwah.
9. Nur Azizah, M.Si., Ketua Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat.
10. Imam Alfi, M.Si, Kepala Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam
11. Dr. Kholil Lur Rochman, S.Ag.,M.Si. pembimbing yang telah mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Segenap dosen dan tenaga pendidik di Fakultas Dakwah Universitas Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

13. Pokdarwis Banjarandap, Pemerintah Desa Banjaran dan BUMDes Bina Sejahtera Desa Banjaran terima kasih telah membantu dan mempermudah penelitian penulis dan bersedia menjadi subjek penelitian.
14. Keluarga tersayang yaitu, Bapak Rokhmat dan Ibu Suparti serta kakek saya Yustaji dan nenek saya Kawini yang saya kasihi. Kepada adik-adik saya, Kuny Mukhrimah dan Lina Ruhani yang selalu mendoakan, mendukung dan mengasihi penulis.
15. Untuk Zeindy Al Fariszy Nurikmansyah yang selalu membagikan cerita-cerita *random* dan menyalurkan energi kebahagiaan, selalu memberikan kasih sayang, doa dan dukungan. Kepada keluarganya pula yang telah memberikan doa, penerimaan dan dukungan untuk penulis.
16. Teman-teman PMI B angkatan 2020, terima kasih telah kebersamai selama perkuliahan.
17. Untuk sahabat saya Alfi Nur Azizah, Desi Ananda, Zulfa Izi Nahdliiyati dan Adinda Nur Afifah yang selalu memberikan dukungan dan doa yang terbaik.
18. Untuk Dmitriev Abraham dan Do Kyungsoo yang menjadi moodbooster penulis.
19. Kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti tulis satu-satu.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya, peneliti selanjutnya, dan bagi pembaca pada umumnya. *Aamiin Ya Robbal'alamin.*

Purwokerto, 26 Maret 2024  
Yang Menyatakan



Dzawi Rohmawati  
2017104070

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>14</b>
A. Deskripsi Pemberdayaan .....	14
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Desa .....	14
2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa .....	16
3. Proses Pemberdayaan Masyarakat Desa .....	19
4. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Desa .....	24
B. Deskripsi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)..	28
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).	28
2. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	29
3. Jenis-Jenis UMKM .....	31
4. Strategi Pengembangan UMKM.....	33

5.	Tantangan Yang Dihadapi UMKM .....	37
C.	Deskripsi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) .....	41
1.	Pengertian Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) .....	41
2.	Aturan Pembentukan Pokdarwis .....	42
3.	Tujuan dan Fungsi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). .....	47
4.	Penguatan Kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) .....	48
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	51
B.	Lokasi Penelitian.....	52
C.	Data Dan Sumber Data.....	52
D.	Subjek dan Objek Penelitian .....	53
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	53
F.	Teknik Analisis Data .....	55
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
A.	Gambaran Umum Tempat Penelitian .....	57
1.	Kondisi Geografis Desa Banjaran.....	57
2.	Kondisi Demografis Desa Banjaran.....	57
3.	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Banjaran .....	58
4.	Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Banjaran.....	59
5.	Sejarah Pendirian Obyek Wisata Banjarandap.....	60
6.	Deskripsi Pokdarwis Banjarandap .....	62
7.	Deskripsi UMKM Banjarandap .....	64
8.	Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjaran Oleh Pokdarwis Banjarandap.....	69
B.	Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.....	74
C.	Proses Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.....	83
D.	Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.....	90

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
	A. Kesimpulan .....	96
	B. Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		





## DAFTAR TABEL

Table 1	Jumlah Penduduk Desa Banjaran.....	58
Table 2	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Banjaran .....	59
Table 3	Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Banjaran.....	60
Table 4	Susunan Pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Banjarandap Desa Banjaran .....	65
Table 5	Daftar Anggota UMKM di Obyek Wisata Banjarandap .....	68



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu aspek yang menjadi prioritas dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di suatu negara. Salah satu usaha yang kini menjadi sorotan yang telah dikenal luas dalam mengembangkan ekonomi masyarakat yaitu melalui pembangunan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peranan UMKM ini tidak hanya berpotensi sebagai roda ekonomi lokal, melainkan jalan bagi pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Dalam hal ini, kelompok sadar wisata (pokdarwis) memegang kunci utama dalam pengelolaan UMKM terutama di bidang pariwisata.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan upaya yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, dilihat dari terciptanya lapangan kerja ataupun dilihat dari segi jumlah usahanya. UMKM ini merupakan bentuk bisnis yang dikerjakan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, ataupun rumah tangga Indonesia. UMKM menjadi pondasi utama pada sektor perekonomian masyarakat di negara berkembang khususnya Indonesia, karena berfungsi untuk mendorong kemandirian dan pengembangan masyarakat khususnya pada bidang ekonomi.<sup>1</sup> UMKM merupakan elemen yang menyumbang peranan besar bagi perekonomian negara, hal ini di karenakan dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat dan keberadaan UMKM menjadi aset berharga dalam pertumbuhan ekonomi serta bisa memberi manfaat dan menjadi media distribusi bagi pendapatan masyarakat.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah lama menjadi sendi perekonomian di banyak negara, khususnya Indonesia. Terciptanya lapangan kerja, menggerakkan laju perekonomian, serta meningkatkan kesejahteraan

---

<sup>1</sup> Satriaji Vinatra, "Peran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara Dan Masyarakat," *Jurnal Akuntan Publik* 1, no. 3 (July 6, 2023): 01–08.

masyarakat. Berlandaskan pada data dari Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2019 Indonesia memiliki 65,4 juta UMKM. Melalui jumlah unit usaha tersebut maka dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 123,3 ribu tenaga kerja. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa UMKM berkontribusi besar terhadap pengurangan laju pengangguran di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa eksistensi UMKM tidak perlu diragukan lagi melihat pada zona UMKM ini banyak menyerap tenaga kerja yang dinilai mampu bertahan dari krisis ekonomi serta menjadi sendi perekonomian.<sup>2</sup> Seperti halnya di Kabupaten Purbalingga, banyaknya tenaga kerja yang diserap oleh UMKM pada tahun 2021 yaitu sebanyak 107.477 tenaga kerja mencakup pekerja umur 15-24 tahun sejumlah 4.670 pekerja, umur 25-64 tahun sejumlah 99.248 tenaga kerja dan umur lebih dari 64 tahun sebanyak 3.559 tenaga kerja. Sedangkan terdapat 6.799 UMKM yang terdapat di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.<sup>3</sup>

Peranan penting yang dipegang oleh UMKM di Indonesia yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi bagian terbesar perekonomian Indonesia yang kuncinya dipegang oleh partisipasi masyarakat di berbagai sektor ekonomi.<sup>4</sup> Sampai pada bulan Juni Tahun 2023, terdapat lebih dari 1.000 izin usaha yang terdapat pada sektor wisata di Kabupaten Purbalingga yang terdaftar di *online submission system* (OSS) dan yang paling banyak yaitu pada sektor usaha kuliner hingga mencapai angka 900.<sup>5</sup> Pemerintah Daerah juga melakukan banyak dorongan untuk lebih memajukan UMKM di Kabupaten Purbalingga melalui berbagai strategi maupun program-program guna lebih mengembangkan sektor UMKMinya. Salah satu model pemberdayaan yang semakin berkembang yaitu melalui

---

<sup>2</sup> Gunartin, "Penguatan UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa", Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis, Vol. 1 No. 5, Desember 2017, hal. 58.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga.

<sup>4</sup> Sri Wahyunti, "Peran Strategis UMKM Dalam Menopang Perekonomian Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19" *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3, no. 2 (December 7, 2020): 280–302.

<sup>5</sup> Amin Wahyudi, "Sampai Juni 2023, Tercatat Ada Sekitar 900 Pengusaha Sektor Kuliner di Purbalingga", Serayunews, 17 Juli 2023, <https://serayunews.com/sampai-juni-2023-tercatat-ada-sekitar-900-pengusaha-sektor-kuliner-di-purbalingga>.

Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Pokdarwis merupakan kelompok masyarakat yang memegang kendali atas pengelolaan destinasi wisata guna meningkatkan perekonomian lokal.

Meskipun memiliki potensi yang sangat besar, pemberdayaan ekonomi melalui UMKM khususnya bidang kuliner yang dikelola oleh pokdarwis tentunya tidak lepas dari berbagai tantangan yang di hadapi. Beberapa diantaranya yaitu termasuk kurangnya akses terhadap modal, rendahnya efisiensi dalam distribusi barang, permasalahan manajerial, persaingan pasar yang cukup ketat, minimnya pengetahuan serta penguasaan terhadap teknologi, dan kendala regulasi. Selain itu, dalam lingkup pariwisata, indikasi seperti perubahan tren wisatawan, keberlanjutan lingkungan, serta pengelolaan destinasi yang baik juga menjadi *challenge* yang perlu diatasi.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Banjarandap merupakan salah satu kelompok masyarakat yang mengatur serta memegang kendali atas pemberdayaan masyarakat di Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga dengan memanfaatkan potensi yang ada baik itu berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Dengan memaksimalkan seluruh potensi ini akan memberikan dampak berupa meningkatnya pemberdayaan masyarakat lokal terutama dalam bidang ekonomi melalui UMKM khususnya bidang kuliner yang dikelola oleh Pokdarwis Banjarandap.

Pokdarwis Banjarandap bertugas untuk mengelola UMKM yang terdapat di Obyek Wisata Banjarandap Desa Banjaran, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga dengan berkolaborasi antara obyek wisata dan UMKM untuk menarik minat pengunjung sehingga nantinya pengunjung tidak akan bosan karena hanya menikmati salah satu destinasi. Dengan adanya kolaborasi antara UMKM kuliner dan obyek wisata ini maka akan memberikan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat lokal.

Adapun cara Pokdarwis Banjarandap dalam mengelola UMKM di obyek wisata Banjarandap yaitu dengan membangun kerjasama dan berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat mulai dari pemerintahan desa hingga

masyarakat lokal guna mensukseskan UMKM agar mampu memberdayakan masyarakat terutama dalam sektor ekonomi.

Kelebihan yang dimiliki oleh Pokdarwis Banjarandap yaitu pada cara pendekatan kepada masyarakat yang awalnya menolak keras hingga luluh dan mau bekerjasama guna kemaslahatan bersama. Hal ini menjadi menarik karena tidak mudah dalam mengubah mindset masyarakat, yang awalnya menolak namun pada akhirnya mau bekerjasama.

Keadaan masyarakat sebelum bergabung dengan UMKM yang berada di bawah Pokdarwis Banjarandap sangat berbeda dibandingkan setelah bergabung dengan UMKM Banjarandap. Hal ini disebabkan oleh terbukanya kesempatan kerja atau lapangan usaha untuk masyarakat lokal supaya nantinya masyarakat setempat memiliki penghasilan dan peluang usaha di Obyek Wisata Banjarandap Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. Latar belakang pelaku usaha UMKM yang berada di bawah Pokdarwis Banjarandap berbeda-beda, mulai dari pengangguran, mantan karyawan PT, ibu rumah tangga, hingga pedagang keliling. Dengan bergabungnya masyarakat lokal ke dalam kelompok UMKM yang berada dibawah Pokdarwis Banjarandap maka memberikan nilai ekonomi dan mampu memperbaiki taraf hidup masyarakat yang mulanya tidak memiliki penghasilan menjadi memiliki penghasilan, yang mulanya harus berdagang keliling kini tidak perlu lagi berkeliling untuk mencari konsumen, hingga yang sudah memiliki usaha mampu meningkatkan penghasilan. Dengan dibukanya peluang usaha untuk masyarakat lokal maka mampu memberikan akses kepada masyarakat dengan menyediakan lapak untuk pedagang dengan biaya sewa yang murah, peluang pasar karena berada di lokasi Obyek Wisata, melakukan sosialisasi kepada para pelaku UMKM serta memberikan panduan cara menarik pelanggan.

Mengacu pada upaya yang dilakukan Pokdarwis Banjarandap dalam mengelola UMKM guna memberdayakan perekonomian masyarakat di Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga cukup penting untuk diteliti karenan nantinya dapat memunculkan dampak positif terhadap kemajuan UMKM di wilayah setempat. Selain itu dapat pula dijadikan sebagai



contoh maupun acuan bagi daerah lain guna meningkatkan UMKM yang terdapat di daerah masing-masing. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan kajian berjudul “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI UMKM YANG DIKELOLA OLEH POKDARWIS BANJARANDAP DI DESA BANJARAN KECAMATAN BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA”.

## B. Penegasan Istilah

Pemberdayaan diambil dari kata dasar daya yang memiliki arti “kekuatan”, yang merupakan terjemahan yang berasal dari istilah dalam bahasa Inggris “*empowerment*”.<sup>6</sup> Totok dan Poerwoko berpendapat bahwa istilah pemberdayaan ini dapat diartikan sebagai bentuk dalam membantu masyarakat yang kurang mampu atau kurang berdaya ketika mereka mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak, maupun dalam pemenuhan kebutuhan. Dengan demikian, pemberdayaan akan mampu memilih dan mengontrol masyarakat disekitarnya agar nantinya dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya termasuk dalam aksesibilitas.<sup>7</sup>

Pemberdayaan yang dimaksud dalam kajian ini yaitu upaya pengelolaan UMKM yang dilakukan oleh Pokdarwis Banjarandap guna memberdayakan masyarakat yang terdapat di Obyek Wisata Banjarandap Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga agar mereka mampu berkembang dan mandiri dalam usahanya.

### 1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha kecil mikro dan menengah dapat diartikan sebagai usaha yang dijalankan secara individu, rumah tangga ataupun usaha kecil. UMKM memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia dan memberikan kontribusi yang besar terhadap struktur perekonomian negara. Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008, UMKM adalah usaha

---

<sup>6</sup> Dedeh Maryani and Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat* (Deepublish, 2019).

<sup>7</sup> Ayuni Latifah, “*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Asosiasi Mekarsari Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*”. (Semarang: UNNES), 2019. Hal, 11.

produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu. Mereka kemudian dikategorikan menjadi usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan parameter tertentu seperti nilai aset dan jumlah karyawan.<sup>8</sup>

UMKM merupakan aktor utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. UKM merupakan usaha padat karya yang tidak membutuhkan persyaratan tertentu misalnya batas pendidikan, keterampilan pekerja atau *skill*, minimnya pengeluaran modal serta pemanfaatan teknologi yang cenderung sederhana.<sup>9</sup>

pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dimaksud dalam kajian ini merupakan suatu perkumpulan para UMKM yang berada di Obyek Wisata Banjarandap yang dikelola oleh Pokdarwis Banjarandap di Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga dengan tujuan untuk mengembangkan dan memberdayakan para pelaku usaha sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup serta ekonominya.

## 2. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)

Porkdarwis adalah organisasi swadaya masyarakat yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di komunitasnya. Porkdarwis memiliki peran dan kedudukan yang penting dalam pembangunan kepariwisataan yaitu sebagai agen pembangunan, sebagai penerima manfaat, dan sebagai motor penggerak dalam menciptakan lingkungan dan iklim yang kondusif bagi kepariwisataan serta mewujudkan sapta pesona di masyarakat.<sup>10</sup>

Kelompok swadaya masyarakat yaitu pokdarwis dalam aktivitas sosialnya yaitu meningkatkan pemahaman kepariwisataan, meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam sektor pembangunan pariwisata,

---

<sup>8</sup> Undang- Undang No. 20 tahun 2008

<sup>9</sup> Amin Dwi Ananda and Dwi Susilowati, "Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif Di Kota Malang," *Jurnal Ilmu Ekonomi* 1, no. 1 (2017): 120–42.

<sup>10</sup> Maleny Zulaika and Febby Amelia Trisakti, "Community Based Ecotourism: Partisipasi Pokdarwis Dalam Mengembangkan Objek Wisata Pantai Pelawan Kabupaten Karimun," *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi* 3, no. 5 (August 11, 2022): 295–305, <https://doi.org/10.24014/jrmdk.v3i5.18770>.

meningkatkan manfaat obyek wisata untuk masyarakat/anggota pokdarwis dan menyukseskan kepariwisataan dalam sektor pembangunan.<sup>11</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat desa oleh Pokdarwis Banjarandap di Obyek Wisata Banjarandap, Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat desa oleh Pokdarwis Banjarandap di Obyek Wisata Banjarandap, Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga?
3. Bagaimana pendekatan pemberdayaan masyarakat desa oleh Pokdarwis Banjarandap di Obyek Wisata Banjarandap, Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat desa oleh Pokdarwis Banjarandap di Obyek Wisata Banjarandap, Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.
2. Mengetahui proses pemberdayaan masyarakat desa oleh Pokdarwis Banjarandap di Obyek Wisata Banjarandap, Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.
3. Mengetahui pendekatan pemberdayaan masyarakat desa oleh Pokdarwis Banjarandap di Obyek Wisata Banjarandap, Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya mengharapkan adanya manfaat dan fungsi adanya penelitian ini, hal ini disebabkan karena aspek terpenting dari suatu penelitian ditinjau dari besarnya manfaat yang bisa diperoleh dari

---

<sup>11</sup> Eko Punto G, "Penguatan Organisasi Pokdarwis Sebagai Ujung Tombak Pengembangan Wisata Kampung Pelangi Kota Semarang," *Harmoni: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (December 4, 2019): 40–46.

adanya penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari kajian ini antara lain:

a. Manfaat Praktis

- 1) Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat menyumbangkan informasi kepada masyarakat lokal maupun para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM yang dikelola oleh Pokdarwis Banjarandap di Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga.
- 2) Dengan kajian ini diharapkan memberikan masukan bagi Pokdarwis Banjarandap sebagai alat evaluasi untuk kelompok tersebut guna nantinya dapat lebih maju dan berkembang untuk kedepannya.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Kajian ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai referensi penelitian ilmiah untuk mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM yang dikelola oleh Pokdarwis Banjarandap di Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga.
- 2) Kajian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan materi untuk pembelajaran bagi mahasiswa khususnya Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM yang dikelola oleh Pokdarwis Banjarandap di Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga.

## **F. Kajian Pustaka**

Kumpulan teori yang diperoleh dari beragam sumber yang digunakan untuk bahan rujukan ketika melakukan penelitian merupakan salah satu fungsi dari kajian pustaka. *Pertama*, dalam hasil skripsi yang ditulis oleh Rizqa Fatharani Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam 2023 dengan judul “Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Era



Adaptasi Kebiasaan Baru Pandemi Covid-19 (Studi Tentang Peran Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Banyumas (Aspikmas) Di Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Peran Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Banyumas (Aspikmas) dalam Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di era Adaptasi Kebiasaan Baru pada Pandemi Covid-19 di Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Kajian ini memanfaatkan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang dimanfaatkan dalam kajian ini berupa penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa Peran Aspikmas adalah membangun kapasitas bisnis melalui program pelatihan, memfasilitasi badan usaha untuk mendapatkan izin usaha dan akses terhadap modal, serta meningkatkan jangkauan pemasaran UKM melalui kegiatan promosi dan pemasaran.<sup>12</sup> Kesamaan antara penelitian Rizqa Fatharani dan penelitian yang akan penulis ulas yaitu sama-sama membahas mengenai peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan perekonomian. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis akan membahas peranan organisasi yang mewadahi UMKM di Obyek Wisata Banjarandap melalui Pokdarwis Banjarandap Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Rezy Riannada *at all*, program studi Pendidikan Luar Sekolah 2021 dengan judul “ Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kencana Dalam Pengembangan Desa Wisata Adat Osing Kemiren”. Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui peranan Pokdarwis Kencana dalam pengembangan desa wisata. Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, serta dokumentasi. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Pokdarwis Kencana berperan sebagai motivator, fasilitator/penggerak, dan penyampai kerangka kerja pengembangan pariwisata

---

<sup>12</sup> Fatharani Rizqa, “Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru Pandemi Covid-19 (Studi Tentang Peran Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Banyumas (ASPIKMAS) Di Kecamatan Ajibarang Kbupaten Banyumas)” (skripsi, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2023), <https://repository.uinsaizu.ac.id/19274/>.



berbasis masyarakat (CBT) yang terdiri atas dimensi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik di desa wisata tradisional Osing Kemiren.<sup>13</sup> Persamaan kajian Rezy Riannada dengan skripsi yang akan ditulis oleh peneliti yaitu mengetahui bagaimana peranan Pokdarwis dalam mensejahterakan masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus strategi, proses dan pendekatan pemberdayaan masyarakat desa.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Amin Dwi Ananda dan Dwi Susilowati 2017 dengan judul “Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif Di Kota Malang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang pada sektor kuliner, kriya, fashion, musik dan permainan interaktif di Kota Malang dan menentukan strategi dan taktik utama untuk mengembangkan UKM berbasis industri kreatif pada sektor kuliner, kriya, fashion, musik dan permainan interaktif di Kota Malang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, Kota Malang telah memiliki banyak potensi di 15 sektor industri kreatif dan setiap sektor memiliki kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang berbeda, serta banyak tantangan di setiap sektor kuliner, kriya, fashion dan permainan interaktif. Faktor kelembagaan seperti sektor kuliner, musik, kerajinan, permainan interaktif, faktor instruktur dan teknologi seperti sektor kerajinan, permainan interaktif, dan faktor pemasaran, semua sektor industri kreatif seperti sektor kuliner, kriya, fashion, musik dan lain-lain perlu bekerja sama dengan pemerintah dan swasta untuk bersinergi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor kuliner berada di kuadran 1, kerajinan di kuadran 1, fashion di kuadran 1, musik di kuadran 4, dan permainan interaktif di kuadran 3.<sup>14</sup> Persamaan kajian oleh Amin Dwi Ananda dan Dwi Susilowati dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu membahas mengenai strategi

---

<sup>13</sup> Rezy Riannada and Sjafiatul Mardiyah, “Peran Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kencana Dalam Pengembangan Desa Wisata Adat Osing Kemiren”, Vol. 10, *Jurnal Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah*, 2021, hal. 315-328.

<sup>14</sup> Ananda and Susilowati, “Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif Di Kota Malang”, Vol. 1, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2017, 120-142.

pengembangan UMKM. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis memfokuskan penelitian mengenai bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui UMKM yang di kelola oleh lembaga kemasyarakatan yaitu Pokdarwis.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Bhisma Wifhanda Aldiansyah dengan judul Program Studi Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan masyarakat 2016 dengan judul “Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis UMKM Kopi di Desa Wisata Kampong Kopi Gombengsari Kabupaten Banyuwangi” fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengembangan ekonomi kreatif berbasis UMKM kopi di Kampung Kopi Gombengsari serta faktor pendukung dan penghambatnya. Model penelitian ini memanfaatkan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan deduktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif berbasis UMKM kopi menyumbangkan kontribusi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terutama pada bidang penjualan produk kopi dan terciptanya lapangan kerja untuk masyarakat lokal. Para pemangku kepentingan untuk menjalankan fungsi dan perannya berupaya secara konsisten dan berusaha semaksimal mungkin untuk berinovasi dan berkreasi guna menjamin kesuksesan pengembangan ekonomi kreatif berbasis UMKM kopi di Desa Wisata Kampung Kopi Gombengsari.<sup>15</sup> Persamaan kajian oleh Bhisma Wifhanda Aldiansyah dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu menganalisis pengembangan ekonomi berbasis UMKM yang nantinya memberikan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat. Sedangkan perbedaannya penulis akan membahas peranan organisasi yang mewadahi UMKM di Obyek Wisata Banjarandap melalui Pokdarwis Banjarandap Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, terdapat kesamaan antara keempat kajian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama mengkaji mengenai peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada pertumbuhan ekonomi, namun terdapat perbedaan antara keempat kajian

---

<sup>15</sup> Bhisma Wifhanda Aldiansyah, “Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis UMKM Kopi Di Desa Wisata Kampong Kopi Gombengsari Kabupaten Banyuwangi” .

tersebut kajian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai perbedaan subjek dan objek yang dikaji, kapan penelitian dilakukan, wilayah atau tempat penelitian, dan bagaimana cara penelitian dilakukan dan penyelesaian masalahnya yang memiliki perbedaan dari keempatnya. Selain itu kajian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM yang dikelola oleh Pokdarwis Banjarandap di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. Oleh sebab itu, kajian yang dilakukan oleh peneliti belum pernah ada yang melakukan serta dalam kajian ini terdapat perbedaan subjek dan objek yang baru pertama kali dilakukan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam laporan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

BAB I pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori. Dalam bab ini dua ini membahas mengenai Kerangka Teori yang mencakup Teori Pemberdayaan masyarakat desa dan Teori Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

BAB III Metodologi Penelitian. Pada bab membahas tentang Jenis Penelitian, Sumber Data yang digunakan dalam Penelitian, Metode Pengumpulan Data yang digunakan, dan Metode Analisis Data.

BAB IV pembahasan hasil mengenai Pemberdayaan Masyarakat Melalui UMKM Yang Dikelola Oleh Pokdarwis Banjarandap di Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga.

BAB V Kesimpulan dan Saran. Pada bab kesimpulan dan saran ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian Pemberdayaan Masyarakat Melalui UMKM Yang Dikelola Oleh Pokdarwis Banjarandap di Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Pemberdayaan

##### 1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Desa

Asal kata pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang memiliki makna kekuatan atau kemampuan. Dalam artian, pemberdayaan dapat dimaknai sebagai progres menjadi berdaya atau sampai bisa memperoleh *power/kekuatan/kemampuan*, atau metode seseorang yang memiliki kuasa memberikan *power/kekuatan/kemampuan* terhadap orang lain yang kurang berdaya, atau yang tidak berdaya menjadi berdaya.<sup>16</sup>

Dalam Undang-Undang Tentang Desa No. 6 Tahun 2014 Butir 12 menyatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan upaya untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran dan pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, serta pendampingan yang sesuai dengan permasalahan yang ada dan kebutuhan masyarakat yang diprioritaskan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan merupakan upaya yang didorong oleh perubahan ruang lingkup sistem ekonomi yang miskin sumber daya dan terbatas serta kebutuhan masyarakat dalam konsumsi, produksi, dan distribusi.<sup>17</sup> Hal ini merupakan konsep pembangunan melalui model pemberdayaan masyarakat guna memecahkan masalah yang dihadapi, yaitu dengan membangun kapasitas dan kapabilitas untuk memutus mata rantai kemiskinan serta mampu bergerak maju menuju masyarakat yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Proses pemberdayaan ini bisa dilakukan dengan mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan potensi,

---

<sup>16</sup> Pujayanti *et al*, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program CSR PT. PJB UBJOM PLTU Tenayan di Kelurahan Industri Tenayan”, *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik 1*, no. 2 (December 25, 2021): 101–16.

<sup>17</sup> I Putu Gede Diatmika *et al*, *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Dan Peran Pemerintah* (Malang: Ahlimedia Press, 2020), hal. 19-20 .



dan bekerja untuk mengembangkannya. Dengan demikian, maka akan memperkuat potensi atau kekuatan masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat seperti pengangguran, kemiskinan, permodalan, aksesibilitas, informasi teknis, infrastruktur, serta kesenjangan pengetahuan dan keterampilan. Jika dilakukan dengan benar, pemberdayaan dapat memberikan dampak yang luar biasa, tidak hanya dalam hal peningkatan akses, tetapi juga membuat masyarakat lebih berdaya dan lebih kuat.<sup>18</sup>

Terdapat tiga sisi dalam upaya pemberdayaan masyarakat, yaitu<sup>19</sup>:

- a. Pertama, melahirkan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan potensinya (*enabling*). Setiap orang, setiap komunitas, perlu diakui memiliki potensi untuk berkembang. Pemberdayaan adalah upaya untuk menumbuhkan potensi tersebut dengan cara mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran, dan berupaya mengembangkannya.
- b. Kedua, meningkatkan potensi atau kapasitas masyarakat (*empowering*). Hal ini membutuhkan tindakan yang lebih aktif daripada sekadar menciptakan lingkungan dan suasana. Pemberdayaan ini melibatkan langkah-langkah konkret dan mencakup penyediaan berbagai masukan serta membuka akses terhadap peluang yang dapat memperkuat kapasitas masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan ini, upaya yang paling penting adalah meningkatkan tingkat pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan akses terhadap sumber-sumber pengembangan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

---

<sup>18</sup> Ulfyatun Nadzifah, "Welfare Pluralism sebagai Metode Pemberdayaan di Dusun Gamol," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan* 4, no. 1 (June 24, 2020): 111–34, <https://doi.org/10.14421/jpm.2020.041-06>.

<sup>19</sup> M. Hassan dan M. Azis, *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal* (Makassar: CV. Nur Lina, 2018), Hal. 139.



- c. Ketiga, pemberdayaan juga berarti perlindungan. Dalam proses pemberdayaan, pihak yang lemah harus dicegah agar tidak semakin lemah dalam menghadapi pihak yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan keberpihakan kepada pihak yang lemah merupakan konsep dasar pemberdayaan masyarakat. Perlindungan harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi yang lemah oleh yang kuat. Pemberdayaan masyarakat bukan berarti membuat masyarakat menjadi lebih tergantung pada program-program amal.

## 2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Strategi adalah seni perencanaan yang mana merencanakan strategi berskala besar dan berorientasi jangka panjang. Menggerakkan kekuatan ke posisi yang menguntungkan dan mengaturnya dalam posisi sedemikian rupa sehingga memberi peluang organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam keadaan persaingan yang mengarah pada optimalisasi tujuan dan sasaran organisasi.<sup>20</sup>

Dalam Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Thomas Wheelen, dkk menyatakan bahwa manajemen strategi merupakan rangkaian putusan manajerial serta aktivitas-aktivitas yang menjadi penentu kesuksesan perusahaan dalam jangka panjang. Aktivitas tersebut mencakup perumusan/perencanaan strategi, implementasi/pelaksanaan, dan evaluasi.<sup>21</sup> Sedangkan Sedarmayanti dalam Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, memiliki dua penegasan mengenai konsep manajemen strategi, yaitu yang pertama dengan menghubungkan fungsi perencanaan dengan sistem administrasi serta struktur organisasi. Sedangkan yang kedua, yaitu strategi dan pelaksanaan merupakan kesinergian dengan memberikan gambaran tugas manajerial di seluruh bagian dan rangkaian organisasi.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Cepi Pahlevi dan Muhammad Ichwan Musa, *Manajemen Strategi* (Makassar: Penerbit Intelektual Karya Nusantara, 2023), hal. 2.

<sup>21</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Manajemen Strategis* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), hal. 5.

<sup>22</sup> *Ibid.*

Terdapat 5 (lima) aspek penting dalam strategi pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat miskin, yaitu:<sup>23</sup>

a. Motivasi

Setiap warga masyarakat perlu didorong untuk membentuk kelompok guna mengorganisir dan menjalankan aktivitas pemberdayaan masyarakat di desa atau kelurahannya. Kelompok ini harus diberikan motivasi agar mau terlibat dalam setiap program pemberdayaan dengan menggunakan sumber dan kemampuan mereka sendiri.

b. Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan

Usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bisa melalui pendidikan dasar, sosialisasi dan motivasi. Sedangkan kemampuan vokasional dapat dikembangkan lewat langkah partisipatif.

c. Manajemen Diri

Kelompok masyarakat harus memiliki kemampuan dalam memilih pemimpin/ketua dan mengatur aktivitas mereka sendiri seperti dalam mengadakan pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, pengoperasian tabungan dan kredit, *problem solving* dan manajemen kepemilikan.

d. Pengelolaan Sumber Daya

Mobilisasi sumber daya perlu dilakukan dengan teliti sehingga tidak ada kesenjangan pada setiap anggota.

e. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan

Kelompok swadaya masyarakat dalam pengorganisasiannya perlu disertai dengan peningkatan kemampuan tiap anggota dalam membangun dan mempertahankan koneksi dengan memanfaatkan sistem sosial. Koneksi ini bermanfaat untuk menyediakan dan

---

<sup>23</sup> Ismail Suardi Wekke, *Metode Pengabdian Masyarakat: Dari Rancangan Ke Publikasi* (Indramayu: Penerbit Adab CV. Adanu Abimata, 2020), hal. 74-76.

mengembangkan akses terhadap sumber dan peluang guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Terdapat 5 (lima) program strategi pemberdayaan yang digagas oleh Ismawan dalam Lin Sarinah, program strategi pemberdayaan tersebut yaitu:<sup>24</sup>

- a. Pengembangan sumber daya manusia, fasilitas yang diberikan kepada masyarakat berupa pelatihan pengembangan keterampilan, dan lain-lain untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia.
- b. Pengembangan kelembagaan kelompok, dalam hal ini fasilitator memberikan dukungan secara langsung kepada masyarakat, seperti mendapatkan legitimasi kelompok dan usaha yang akan dilakukan.
- c. Pemupukan modal masyarakat, dalam hal ini memberikan modal awal kepada masyarakat untuk menciptakan usaha yang dapat membantu meningkatkan perekonomian mereka dari sebelumnya. Hal ini dapat berupa pendanaan, tetapi juga dapat berupa sarana dan prasarana.
- d. Pengembangan usaha produktif, pengembangan usaha membutuhkan dukungan dari pemerintah agar masyarakat mengetahui apa strateginya.
- e. Pemberian informasi yang memadai, ketika masyarakat menghadapi kesulitan atau hambatan, mereka perlu diberikan informasi yang dapat memberikan arahan atau solusi atas masalah mereka. Memperluas jaringan penjualan melalui website, dll.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan bagian penting dari agenda pembangunan nasional bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, dan langkah-langkah praktis harus diambil untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat berjalan dengan cepat. Diharapkan melalui pemberdayaan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan menjadi lebih baik.

---

<sup>24</sup> Iin Sarinah, Aan Anwar Sihabudin, and Erlan Suwarlan, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5, no. 3 (August 11, 2019): 267–77, <https://doi.org/10.25147/moderat.v5i3.2709>.

### 3. Proses Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tentu saja sebagai sebuah proses, program/intervensi pemberdayaan masyarakat dapat diimplementasikan secara penuh oleh seluruh peserta, terutama para aktor yang bertindak sebagai fasilitator. Memberdayakan masyarakat membutuhkan proses yang panjang (tidak bersifat sementara) untuk membuat masyarakat menjadi lebih mampu. Proses pemberdayaan biasanya terkait dengan faktor sosial ekonomi dan politik. Pemberdayaan adalah upaya dan proses untuk bertindak sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan mengembangkan diri.

Proses dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat menurut Sarintan Efratani Damanik terdapat 5 tahapan yang dimulai dari proses seleksi lokasi hingga pemandirian masyarakat. Tahapan-tahapan tersebut, yaitu:<sup>25</sup>

#### a. Tahap Seleksi Wilayah

Seleksi desa atau dusun dilakukan sesuai dengan kesepakatan lembaga dengan menyesuaikan kriteria yang disepakati bersama oleh pihak-pihak terkait dan juga masyarakat. Pengenalan wilayah pemberdayaan masyarakat ini bertujuan agar nantinya masyarakat mengenali wilayah pemberdayaannya sendiri karena setiap desa terdapat potensi, kondisi wilayah serta karakteristik masyarakat yang berbeda sehingga nantinya mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada.<sup>26</sup>

#### b. Tahap Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat

Sosialisasi pemberdayaan merupakan kegiatan yang penting dilakukan guna menciptakan komunikasi serta dialog dengan masyarakat. Sosialisasi pemberdayaan ini akan membantu

---

<sup>25</sup> Sarintan Efratani Damanik, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hal. 44-52

<sup>26</sup> Efri S. Bahri, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi* (Kediri: Penerbit FAM Publishing, 2013) hal. 33.

meningkatkan pemahaman program, menyatukan visi dan misi program pemberdayaan yang akan dilaksanakan.<sup>27</sup>

c. Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat, maka masyarakat juga harus andil dalam prosesnya dengan bersama-sama melakukan hal sebagai berikut:

1) Mengkaji dan mengidentifikasi masalah, potensi dan peluang.

Pada tahap ini dikenal sebagai kajian keadaan pedesaan partisipatif atau *Participatory Rural Appraisal* (PRA). PRA merupakan teknik dan alat guna menganalisa keadaan pedesaan. Hal yang harus dijaga guna keberhasilan teknik ini adalah teknik dan alat PRA, peran fasilitator dan berbagi.<sup>28</sup> PRA sendiri berfungsi sebagai visualisasi guna proses analisis keadaan sehingga diperoleh gambaran mengenai aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek kelembagaan.

2) Menyusun rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian.

Penyusunan program pemberdayaan diawali dengan menyusun rencana program guna dijadikan sebagai acuan dalam pendampingan target penerima manfaat. Penyusunan program pemberdayaan juga harus direncanakan bersama-sama dengan berbagai pihak/lembaga yang terkait dengan program pemberdayaan tersebut. Program yang akan disusun memuat penetapan tujuan program yang ingin dituju berlandaskan visi dan misi yang telah disepakati, selanjutnya menyusun startegi untuk mengimplementasikan program yang di dalamnya memuat indikator-indikator perubahan yang diharapkan dari penerima manfaat program.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Idham, *Perda Tata Ruang Dalam Dimensi Pengelolaan Sumber Daya Agraria dan Sumber Daya Alam* (Penerbit Akumni: 2022), hal. 349.

<sup>28</sup> Suratman & Abdul Aziz Zuhakim, *Perencanaan Pengawasan Pembangunan* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020) hal. 91

<sup>29</sup> Adie Nugroho *et al.*, *Menumbuhkembangkan Socioecopreneur Melalui Kerja Sama Strategis* (Jakarta Timur: Penebar Swadaya, 2013), hal. 138-139.



3) Menerapkan rencana kegiatan kelompok.

Rencana program yang telah disusun dengan kesepakatan bersama selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan dengan memperhatikan realisasi dan rencana awal. Pemantauan pelaksanaan dan kemajuan program menjadi perhatian bagi semua pihak, selain itu dilakukan perbaikan jika diperlukan.<sup>30</sup>

4) Memantau proses dan hasil kegiatan secara berkesinambungan.

Proses pengamatan, inspeksi, dan pemantauan program dilakukan guna melihat perkembangan program sejauh mana program pemberdayaan berjalan sesuai dengan rencana yang sebelumnya telah disepakati bersama. Pemantauan dilaksanakan untuk meninjau permasalahan, hambatan, dan ancaman yang dihadapi di lapangan selama program pemberdayaan berjalan.<sup>31</sup>

d. Tahap Pemandirian Masyarakat

Proses Pemberdayaan Masyarakat merupakan pembelajaran yang berjalan secara berkesinambungan dengan tujuan agar masyarakat mampu mengorganisir diri untuk mengatur dan mengelola program kegiatan yang dikembangkan dengan berpegang pada prinsip pemberdayaan sehingga mampu memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya.<sup>32</sup>

e. Tahap Evaluasi

Evaluasi program merupakan suatu kajian evaluatif yang dilakukan secara sistematis guna pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan suatu program pemberdayaan dengan menentukan solusi yang tepat untuk

---

<sup>30</sup> Syed Agung Afandi *et al.*, *Pengantar Teori Pembangunan* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2021), hal. 89.

<sup>31</sup> Suhadi, *Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Masyarakat* (Jawa Tengah: CV. Sarnu Untung, 2023) hal. 37.

<sup>32</sup> Ismail Suardi Wekke, *Metode Pengabdian Masyarakat: Dari Rancangan Ke Publikasi* (Indramayu: Penerbit Adab CV. Adanu Abimata, 2020), hal. 81.

menyempurnakan program yang sedang dievaluasi.<sup>33</sup> Evaluasi ini perlu melibatkan masyarakat dengan harapan nantinya dapat terbentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan internal dan membangun komunikasi masyarakat. Adapun hal-hal yang perlu dievaluasi yaitu pencapaian hasil, evaluasi program dan pengawasan mutu, seleksi lokasi dan sasaran kemiskinan, organisasi masyarakat, efektivitas biaya, pengembangan kualitas SDM, kepuasan terhadap program dan keberlanjutan program.

Sedangkan dalam buku Dedeh Maryani, Soekanto menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat mempunyai beberapa tahapan yang harus dilakukan, diantaranya yaitu:<sup>34</sup>

a. Fase persiapan

Ada dua langkah yang harus dilakukan dalam tahap ini. Pertama, penyediaan fasilitator untuk para pekerja pemberdayaan, yang biasanya dilakukan oleh pekerja komunitas untuk melakukan penjangkauan; dan kedua, adalah tahap persiapan di lapangan, yang dilakukan terlebih dahulu ketika sudah ada strategi untuk melakukan penjangkauan di lapangan.

b. Fase Penilaian "Assessment"

*Assessment* merupakan tahap pengidentifikasian masalah guna menganalisa kebutuhan yang dirasakan (*felt needs*) atau kebutuhan yang diekspresikan (*expressed needs*) serta sumber daya yang komunitas sasaran miliki. Pada tahap *assessment*, partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar mereka dapat menemukan permasalahan mereka sendiri. *Assessment* dapat dilakukan secara individu atau kelompok melalui tokoh-tokoh masyarakat atau anggota masyarakat tertentu. Jika dalam analisisnya ditemukan perbedaan cara pandang antara pemberdaya dengan kelompok

---

<sup>33</sup> Dewa Gede Hendra Divayana, *Evaluasi Program Konsep Dasar dan Pengimplementasiannya* (Depok: Rajawali Printing, 2018), hal. 6-7

<sup>34</sup> Dedeh Maryani, Ruth Roselin E N, *Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), Hal. 13-14.

sasaran dan instansi terkait maka diperlukan *problem solving* secara rasional .<sup>35</sup>

c. Fase perencanaan alternatif program atau kegiatan

Pada tahap ini, pendamping sebagai agen perubahan mencoba melibatkan masyarakat untuk memikirkan masalah yang mereka hadapi dan bagaimana pemecahannya. Dengan memecahkan masalah, diharapkan masyarakat juga terlibat dalam proses pemberdayaan dan dalam pengembangan strategi, program dan kegiatan.

d. Fase merumuskan rencana aksi

Pada fase ini, pendamping melakukan negosiasi dengan masyarakat untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi masyarakat dalam hal kegiatan dan program yang akan dilaksanakan dan masyarakat juga terlibat dalam pengembangan kegiatan dan program.

e. Fase menjalankan program atau kegiatan

Pada tahap ini, semua peserta program telah memiliki pemahaman yang jelas mengenai maksud, tujuan, dan sasaran program, sehingga Anda harus terlebih dahulu mensosialisasikan program tersebut agar tidak terjadi kendala besar dalam pelaksanaannya.

f. Fase evaluasi

Pada fase ini, Anda harus memiliki gambaran yang jelas dan terukur tentang seberapa besar keberhasilan program yang telah dijalankan, sehingga Anda dapat mengantisipasi kendala-kendala untuk mengatasi masalah atau hambatan yang Anda hadapi pada periode berikutnya.

g. Fase Terminasi

Tahap ini yaitu membangun kerja sama guna menyelesaikan tujuan akhir dari petugas pemberdayaan atau

---

<sup>35</sup> Atik Rahmawati, *Suku Laut Pulau Batam* (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2015), hal. 74-75.

kelompok masyarakat. Tahap terminasi merupakan tahapan akhir pemberdayaan masyarakat dimana pemutusan hubungan kerja dilakukan ketika masyarakat dinilai sudah bisa mandiri dalam memberdayakan dirinya sendiri.

Seperti pemberdayaan yang dilakukan oleh Pokdarwis Banjarandap kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Obyek Wisata Banjarandap Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, pemberdayaan merupakan proses yang bertahap dan berkelanjutan. Langkah-langkah pemberdayaan yang dilakukan melibatkan individu, kelompok, atau komunitas yang bekerja sama untuk mengkaji masalah, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program AspiKmas yang telah direncanakan.

#### **4. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Pendekatan pemberdayaan masyarakat desa merupakan suatu proses pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat agar masyarakat dapat memaksimalkan jati diri, kemandirian, swasembada dan penguatan posisi tawar masyarakat kelas bawah terhadap kebijakan pembangunan. Pendekatan pemberdayaan masyarakat desa menekankan pada pemandirian masyarakat lokal supaya mampu mengorganisir diri mereka sendiri.<sup>36</sup>

Terdapat banyak bentuk-bentuk pendekatan pemberdayaan salah satunya yaitu pendekatan berbasis masyarakat lokal (*locality development*). Pendekatan berbasis masyarakat lokal (*locality development*) merupakan pendekatan yang melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam proses pemberdayaan, sehingga masyarakat menjadi subjek pemberdayaan, bukan sekedar objek penerima bantuan. Model intervensi *locality development* digunakan untuk menghasilkan perubahan,

---

<sup>36</sup> Idham, *Perda Tata Ruang Dalam Dimensi Pengelolaan Sumber Daya Agraria dan Sumber Daya Alam* (Penerbit Akumni: 2022), hal. 349.

sehingga memerlukan keterlibatan komunitas dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.<sup>37</sup>

Dalam bukunya, Rothman menyatakan bahwa tujuan dari penerapan model pengembangan masyarakat adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, kerja sama atau saling mendukung, dan integrasi. Proses evaluasi yang berguna diperlukan sebagai alat untuk mengukur partisipasi setiap orang dalam masyarakat.<sup>38</sup> *Locality development* sangat cocok dilakukan di negara berkembang khususnya Indonesia. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan pendekatan *locality development* ini dapat meruntuhkan hambatan dalam masyarakat dengan mendorong dan meningkatkan komunitas. Dengan terciptanya interaksi masyarakat dari lapisan yang berbeda-beda akan mendorong masyarakat untuk terus tumbuh dan berkembang sehingga nantinya akan menciptakan sikap kepemimpinan di dalam diri individu. Selain itu, melalui *locality development* masyarakat akan memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru sehingga dapat memanfaatkan aset yang ada di lingkungannya secara cerdas dan maksimal. Kemandirian masyarakat dalam mengidentifikasi dan melakukan pemecahan masalah berdasarkan keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan masyarakat juga akan terlatih dari adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap program pemberdayaan. Selain itu, *locality development* juga dapat digunakan sebagai media dalam membangun pemerataan masyarakat akibat adanya ikatan yang mampu mengikat masyarakat itu sendiri.

Dalam bukunya Sarintan Efratani Damanik berpendapat bahwa terdapat 3 pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan, diantaranya yaitu:<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Thesalonika Tarigan and Risna Resnawaty, "Praktik dan Dampak Model Locality Development di Indonesia Terhadap Masyarakat Setempat," *Journal of Sustainable Community Development (JSCD)* 4, no. 2 (December 11, 2022): 66–73, <https://doi.org/10.32924/jscd.v4i2.70>.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Sarintan Efratani Damanik, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hal. 46.



a. Pendekatan Berdasarkan Kesamaan Masalah

Melalui pendekatan kesamaan masalah yang tengah dihadapi ini memiliki kekuatan karena mempermudah dalam pendampingan. Namun, kelemahannya yaitu sulit melakukan pendampingan secara kelompok karena wilayah tempat tinggal yang saling berjauhan.

b. Pendekatan Berdasarkan Tempat Berkumpul

Pendekatan ini memberi keuntungan dari segi pengelompokan karena sudah berkumpul di lokasi tertentu.

c. Pendekatan Berdasarkan Tempat Tinggal

Pendampingan dilaksanakan di tempat pemukiman masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat ini memberikan keunggulan karena memudahkan analisis latar belakang target pemberdayaan.

Selain 3 pendekatan diatas, terdapat 3 jenis pendekatan yang biasanya digunakan oleh pekerja sosial untuk membantu tenaga penyuluh, agen, fasilitator, aktifis LSM, agen pembaharu dan lembaga pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu:<sup>40</sup>

a. Pendekatan Mikro

Pendekatan mikro pada pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui bimbingan, konseling dan *crisis intervention*. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bimbingan atau pelatihan terhadap individu dalam menjalankan tugas-tugas kesehariannya. Pendekatan mikro juga biasa disebut sebagai pendekatan yang berorientasi pada tugas.<sup>41</sup>

b. Pendekatan Mezzo

Pendekatan mezzo merupakan pendekatan yang dilakukan terhadap kelompok sasaran pemberdayaan. Kelompok ini digunakan sebagai media intervensi melalui proses pendidikan, dan pelatihan serta terdapat dinamika kelompok pada target pemberdayaan.

---

<sup>40</sup> Andi Haris, "Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat," *JUPITER* 13, no. 2 (2014), <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jupiter/article/view/1647>.

<sup>41</sup> Okke Rosmaladewi, *Manajemen Kemitraan Multistakeholder Dalam Pemberdayaan Masyarakat* (Sleman: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2019), hal 37.

pendekatan mezzo merupakan alat untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan sasaran pemberdayaan agar nantinya mereka mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi.<sup>42</sup>

c. Pendekatan Makro

Pendekatan makro juga sering disebut sebagai strategi sistem pasar (*large-system strategy*). Hal ini disebabkan karena sasaran pemberdayaan ditujukan pada sistem lingkungan yang luas. Sasaran ini dilakukan dengan menggunakan strategi perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, pengorganisasian, aksi sosial dan pengembangan masyarakat.<sup>43</sup>

Selain berbagai pendekatan yang biasa digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti yang telah disebutkan di atas, ada beberapa jenis pendekatan yang dapat digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ada juga tiga jenis pendekatan pemberdayaan masyarakat yaitu:<sup>44</sup>

a. Pendekatan Kesejahteraan

Pendekatan ini lebih menekankan pada pemberian dukungan kepada masyarakat, termasuk mereka yang menghadapi bencana seperti banjir, letusan gunung berapi, kekeringan yang berkepanjangan, atau bentuk-bentuk bencana alam lainnya.

b. Pendekatan Pembangunan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui model pendekatan ini lebih menitikberatkan pada upaya peningkatan kemandirian, keswadayaan, dan kapasitas masyarakat.

---

<sup>42</sup> Syamsuddin AB, *Benang-Benang Putih Nilai Dan Etika Hak Asasi Manusia Pekerja Sosial* (Makassar: PT. Nas Media Indonesia, 2023) hal. 145.

<sup>43</sup> Okke Rosmaladewi, *op.cit.*, hal. 38

<sup>44</sup> Andi Haris, "Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media," Vol. 13, Jurnal Unhas, 2014, hal. 50-62.

c. Pendekatan Pemberdayaan

Dalam hal ini perlu dilakukan berbagai bentuk kegiatan pendidikan untuk membantu kelompok sasaran (klien) melepaskan diri dari kemiskinan, keterpurukan, keterbelakangan, dan berbagai perasaan tidak berdaya untuk membentuk kelompok yang maju dan mandiri.

## B. Deskripsi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

### 1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah cukup lama menjadi tumpuan perekonomian di banyak negara, tidak terkecuali Indonesia. UMKM turut andil dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengembangkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan UMKM memiliki potensi yang besar dalam memberikan dampak yang baik terhadap kesejahteraan rakyat.<sup>45</sup> UMKM dalam bidang ekonomi merujuk pada usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.<sup>46</sup>

Dalam UU No. 20 Tahun 2008 yang di dalamnya membahas mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menerangkan bahwa:

- a. Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan besar yang

---

<sup>45</sup> Satriaji Vinatra, "Peran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara Dan Masyarakat," *Jurnal Akuntan Publik* 1, no. 3 (July 6, 2023): 01–08.

<sup>46</sup> Sri Wahyunti, "Peran Strategis UMKM Dalam Menopang Perekonomian Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19," *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3, no. 2 (December 7, 2020): 280–302.

memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang lebih besar, yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha menengah yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

## 2. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Karakteristik UMKM yaitu usaha menengah ke bawah yang pada umumnya dikelola berdasarkan etika dengan kejujuran dijadikan sebagai dasarnya, hal ini menjadi lebih kuat saat menghadapi krisis.<sup>47</sup>

Karakteristik UMKM di Indonesia tidak jauh berbeda dengan karakteristik UMKM di negara-negara transisi lainnya. Secara umum, UMKM memiliki karakteristik bisnis sebagai berikut dalam menjalankan usahanya:<sup>48</sup>

- a. Umumnya, sektor UMKM dicirikan oleh para pengusaha atau pemilik yang memulai usahanya dengan modal kecil dan keterampilan yang kurang.
- b. Terbatasnya sumber pendanaan yang tersedia untuk mendukung kelancaran operasional usaha, seperti kredit dan pinjaman bank dari pemasok atau bank yang bersedia melayani UMKM.
- c. Kemampuan untuk mendapatkan pinjaman bank relatif rendah karena ketidakmampuan mereka untuk menyediakan agunan, pembukuan, dll.

<sup>47</sup> Singgih Muheramtohad, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (June 1, 2017): 65–77, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.65-77>.

<sup>48</sup> Nuramalia Hasanah M.Ak SE, Dr Saparuddin Muhtar M.Si, and Indah Muliasari M.Ak SE, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)* (uwais inspirasi indonesia, n.d.).

- d. Banyak pelaku ekonomi UMKM yang tidak memahami pencatatan/akuntansi. Bahkan mereka yang sudah berpengalaman dengan pencatatan keuangan pun mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan.
- e. Pada umumnya sektor UMKM kurang mampu membangun hubungan dengan bank.

Selain karakteristik UMKM diatas, terdapat pula karakteristik lain yang menjadi ciri khas UMKM dalam mengakses pinjaman modal pada perbankan, diantaranya yaitu:<sup>49</sup>

- a. Umur

Semakin lama umur suatu badan usaha untuk eksis maka kemampuan bertahan badan usaha tersebut semakin mampu bertahan saat mengalami kondisi ekonomi yang buruk. UMKM dengan usia yang terbilang muda akan mengalami kesulitan dibandingkan dengan badan usaha/perusahaan besar. Hal ini disebabkan karena badan usaha/perusahaan baru akan kesulitan dalam akses lembaga keuangan.

- b. Jaminan

Jaminan merupakan faktor penting bagi UMKM karena dijadikan sebagai syarat dalam mengakses pinjaman perbankan. Kesulitan akses pinjaman ini merupakan masalah yang umum terjadi di Indonesia, hal ini disebabkan karena tidak adanya aset yang dimiliki sebagai jaminan ketika UMKM tidak bisa memenuhi kewajiban pinjaman. Minimnya akses bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan kesulitan terhadap penyediaan agunan yang di tetapkan oleh bank. Selain itu, pelaku usaha mikro dan kecil juga

---

<sup>49</sup> Kurniawan & Mokhammad Kodir, "Analisis Pengaruh Karakteristik UMKM dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Akses Keuangan Pinjaman Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Brebes," Vol. 2, Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAKA), 2015, hal. 31-39.



mengalami hambatan dalam memenuhi persyaratan administrasi dan prosedur peminjaman kresit yang ditetapkan oleh bank.<sup>50</sup>

c. Lokasi

Dalam menjalankan bisnis tentunya harus pada lokasi yang strategis karena akan memengaruhi pada akses pasar maupun sumber daya. Selain itu, letak geografis kedekatan konsumen dengan perbankan juga turut memengaruhi karena akan memberikan akses informasi kualitatif yang baik mengenai kualitas kredit badan usaha-perusahaan.

d. Jenis Industri

Lokasi pengoperasian bisnis secara tidak langsung dapat memengaruhi struktur modal karena terjadi secara alamiah pada struktur aset perusahaan. Risiko usaha juga berbeda-beda tergantung pada jenis usaha yang dijalankan. Maka dari itu klasifikasi jenis usaha juga turut andil dalam memengaruhi akses keuangan untuk melakukan pinjaman UMKM.

### 3. Jenis-Jenis UMKM

UMKM dapat digolongkan menjadi beberapa jenis atau kriteria yang dimuat sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kriteria-kriteria tersebut, yaitu:<sup>51</sup>

- a. Usaha mikro mempunyai aset bersih maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak meliputi tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Usaha mikro harus menghasilkan penjualan tahunan maksimal Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Usaha kecil harus mempunyai aset bersih lebih dari usaha mikro yaitu mulai dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga

<sup>50</sup> Siti Fatonah, *Strategi Pengembangan UMKM* (DIY: Pohon Tua Pustaka), hal. 37

<sup>51</sup> Fibriyanti S., *Monograf: Literasi Keuangan UMKM Dalam Menghadapi Era Society 5.0 di Kabupaten Boalemo* (Solok: CV. Mitra Cendekia Media, 2022), hal. 26-27.

- maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak mencakup tanah dan bangunan tempat usaha
- d. Usaha kecil harus mencapai hasil penjualan tahunan hingga Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak mencakup tanah dan bangunan tempat usaha
  - e. Usaha menengah mempunyai aset bersih lebih besar dari usaha kecil hingga maksimal Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak mencakup tanah dan bangunan tempat usaha.
  - f. Usaha menengah harus mencapai target penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) hingga maksimal Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terdapat beberapa jenis diantaranya:<sup>52</sup>

- a. *Livelihood activities* adalah usaha kecil yang digunakan untuk memulai bisnis untuk kesempatan kerja atau mata pencaharian, umumnya dikenal sebagai sektor informal. Usaha-usaha ini membuka kesempatan kerja dan juga dapat mengurangi pengangguran. Dalam hal ini, penulis memberikan contoh pedagang kaki lima, pedagang asongan, wiraswasta, dll.
- b. *Micro enterprise* merupakan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan agar dapat menghasilkan uang tidak hanya untuk karyawan di kantor tetapi juga dapat menginspirasi orang lain yang merasa dapat memulai usaha sendiri.
- c. *Small dynamic enterprises* adalah bahwa usaha kecil membutuhkan kewirausahaan untuk dapat melakukan perubahan dalam menjalankan usahanya, sehingga pengusaha atau wirausaha harus

---

<sup>52</sup> Bambang Agus Sumantri et al., "Manajemen Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)," n.d.

memiliki jiwa kewirausahaan yang kuat agar tidak mudah menyerah atau putus asa.

- d. *Fast moving enterprises*, pelaku usaha yaitu wirausaha harus memiliki motivasi diri agar dapat melebarkan sayapnya dalam dunia bisnis yang banyak pesaingnya, sehingga harus memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan usaha modal kecil ini agar usaha kecil tersebut dapat meningkatkan perekonomian.

#### 4. Strategi Pengembangan UMKM

Strategi pada umumnya didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan yang terdiri dari aktivitas-aktivitas penting guna mencapai tujuan. Penyusunan strategi merupakan upaya untuk mencapai tujuan suatu perusahaan/komunitas/kelompok, baik dalam jangka waktu menengah maupun jangka panjang.<sup>53</sup>

Menurut Primiana (2009), ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan faktor internal UMKM. Langkah pertama adalah identifikasi, analisis potensi, dan inventarisir dukungan yang telah diterima selama ini, yaitu:<sup>54</sup>

##### a. Analisis Potensi

Analisis potensi dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari masing-masing UMKM. UMKM yang memiliki potensi tinggi diprioritaskan untuk mendapatkan dukungan berdasarkan kelemahan yang ada.

##### b. Membentuk Badan/Pusat Kerja Sama Antar Lembaga/Instansi

Format yang disediakan untuk merumuskan strategi pengembangan UMKM adalah dengan membentuk suatu badan/pusat kerjasama antar instansi/lembaga untuk memfasilitasi UMKM mendapatkan dukungan dari sisi manajemen dan pembiayaan. Dalam badan/pusat ini, akan ada pembagian kerja

<sup>53</sup> Arif Yusuf Hamali, *Pemahaman Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 16-17.

<sup>54</sup> Novegya Ratih Primandari M.Si S. E. et al., *Strategi Pengembangan UMKM* (Deepublish, 2023).

sehingga instansi/lembaga akan bertanggung jawab dalam hal seleksi, bimbingan, pengembangan, dan pembiayaan. Hal ini akan menghilangkan kebutuhan UMKM untuk mencari kredit dari bank atau lembaga keuangan non-bank.

c. Membuat Kriteria Penilaian UMKM

Pada langkah berikutnya, lembaga/institusi yang berkolaborasi akan menentukan potensi/kemampuan UKM secara keseluruhan melalui kriteria evaluasi yang disepakati bersama dan mengelompokkannya ke dalam matriks untuk membedakan antara UKM yang berpotensi tinggi dan yang berpotensi rendah.

d. Membuat perencanaan, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UMKM.

Jika langkah sebelumnya telah mengidentifikasi kelemahan UMKM yang memiliki potensi (seperti manajemen atau pendanaan), langkah selanjutnya adalah menghubungkan UMKM dengan lembaga/organisasi sesuai dengan peran dan kemampuan masing-masing, yaitu pada tahap ini dilakukan pembagian tugas dan peran. Keluaran dari proses ini adalah profil UMKM yang memberikan gambaran umum tentang tahun pendirian, produk yang dihasilkan, target pasar, omset per tahun, jumlah pekerja, jenis dukungan yang diterima, pengembangan pasca dukungan, dll. Tentu saja, pekerjaan ini memiliki batas waktu dan membutuhkan evaluasi dan pemantauan yang konstan.

Selain strategi pengembangan UMKM diatas, strategi pengembangan UMKM juga bisa dilakukan berdasarkan beberapa strategi lainnya, diantaranya yaitu:<sup>55</sup>

a. *Teori Business Continuity Management (BCM)*

Menyesuaikan tingkat pembelanjaan yang melibatkan inventory sebagai pengontrol stok barang yang menjadi dasar pembelian baik itu mendesak atau berkala. Hal ini disebabkan

---

<sup>55</sup> Siti Fatonah, *Strategi Pengembangan UMKM* (DIY: Pohon Tua Pustaka), hal. 38-47.

karena proses bisnis tergantung dari bahan bakunya. Bidang investasi dan operasional harus melakukan analisis proses bisnis dengan menitikberatkan unsur prioritas guna efisiensi dan efektifitas usaha. Strategi tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) *Business Continuity Management* merupakan mekanisme manajemen secara holistik pada organisasi dengan melakukan identifikasi peluang ancaman yang nantinya berdampak terhadap operasional bisnis. Penerapannya dengan membentuk kerangka kerja yang memberikan ketahanan serta kemampuan merespon dengan efektif untuk kepentingan stakeholder, nama baik, brand dan aktivitas pengembangan.
- 2) *Business Continuity Plan* merupakan prosedur dan kebijakan yang mencakup rangkaian kegiatan secara terencana dan terkoordinir terhadap langkah-langkah pengurangan risiko, penanggulangan efek gangguan/bencana dan proses pemulihan agar operasional dan pelayanan tetap berjalan.

b. *Business Sustainability Management* (BSM)

*Sustainability* mempertimbangkan tingkat sumber daya yang dikonsumsi oleh organisasi mengenai sejauh mana sumber daya dapat dikembangkan. Pelaku usaha dalam mencapai *Sustainability* dapat dilakukan dengan cara meningkatkan efisiensi sumber daya yang digunakan karena operasi yang tidak *sustainable* dapat organisir dengan cara mengembangkan operasi yang *sustainable* ataupun dengan melalui perencanaan terhadap kesenjangan sumber daya yang dibutuhkan di masa depan.

c. *Analisis OODA Loop*

*OODA Loops* ( *Observe, Orientation, Decision, Action*) merupakan strategi yang digunakan untuk tujuan usaha yang berkesinambungan sesuai dengan teori BCM dan *sustainability*



usaha sesuai teori BSM.<sup>56</sup> Dalam hal ini fokus yang menjadi sasaran utama yaitu gambaran mengenai tindakan terencana yang dilakukan oleh pelaku usaha UMKM dalam mempertahankan bisnisnya di masa atau bencana. OODA loop merupakan teknik yang digunakan dalam situasi paling ekstrim untuk menentukan keputusan yang rasional dan cepat. Analisis aksi dengan konsep OODA loop yaitu aktivitas berdiri guna pengamatan (*to observe*), identifikasi sesuai tujuan (*to Orient*), Putusan (*decide*), dan aksi (*to Act*).

1) *Observe* (Observasi)

Dalam penanganan krisis bisnis, haruslah menggunakan OODA loop untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi. Langkah ini bisa dilakukan dengan mengidentifikasi situasi, mengumpulkan data dan fakta, kemampuan membedakan situasi dari sebelum dan setelah munculnya permasalahan, dan yang terakhir yaitu terbuka dengan segala kemungkinan yang terjadi pada pelaku UMKM.

2) *Orientation* (Orientasi)

Pelaku usaha harus mampu mengkondisikan diri terhadap bencana yang akan datang ataupun saat menghadapi bencana hingga krisis tersebut terlewati.

3) *Decision* (Memutuskan)

Proses manajemen seperti perencanaan, analisis, *design*, dan implementasi harus diterapkan saat pengambilan keputusan. Proses manajemen yang teridentifikasi bertujuan untuk membentuk sistem baru yang lebih maju dan berkembang. Analisis ini bisa memanfaatkan teknik analisis SWOT untuk melihat langkah strategis.

---

<sup>56</sup> M.I. Retno Susilorini *et al.*, *Kearifan Lokal Jawa Tengah: Tak Lekang Oleh Waktu* (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2021) hal. 49.

#### 4) *Act* (Tindakan)

Tindakan dilakukan sesuai dengan proses sistem manajemen. Penerapan langkah kritis harus mengacu pada pencegahan masalah guna pengambilan keputusan. Setiap tindakan dianalisis apakah efektif dan mampu menjadi solusi dalam menangani krisis atau sebaliknya.

### 5. Tantangan Yang Dihadapi UMKM

Saat menjalankan suatu usaha maka sering kali terdapat tantangan yang harus diatasi oleh para pelaku usaha. Tantangan yang umum dialami oleh pelaku UMKM, yaitu sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. Keterbatasan akses terhadap modal dan pembiayaan karena sulitnya mendapatkan pinjaman untuk memulai bisnis maupun pengembangan bisnis.
- b. Keterbatasan teknologi dan inovasi yang mana masih minimnya pemahaman pelaku usaha sehingga kurang bisa berinovasi dalam perkembangan tren pasar dan kebutuhan konsumen.
- c. Persaingan yang ketat antar pelaku UMKM maupun pelaku usaha lain yang memiliki sumber daya dan daya tawar lebih tinggi.
- d. Manajemen yang kurang efisien karena kurangnya pengetahuan mengenai perencanaan bisnis, strategi pemasaran, pengelolaan bahan baku, dan manajemen operasional.
- e. Peraturan dan birokrasi yang rumit terkait perizinan, regulasi, serta birokrasi yang berbelit-belit sehingga menghambat pertumbuhan usaha dan munculnya beban administratif.

Selain permasalahan diatas, tantangan yang dihadapi oleh Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga terbagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor tantangan yang dihadapi

---

<sup>57</sup> Siti Anugrahini Irawati, *Ekonomi Kreatif dan UMKM Kuliner Pendongkrak Ekonomi Rakyat* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), n.d.).

oleh UMKM ini dipaparkan oleh Lilis Sulastris dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>58</sup>

a. Faktor Internal

1) Kurangnya modal dan terbatasnya akses pembiayaan

Permodalan pada UMKM lebih banyak menggunakan modal pribadi. Hal ini disebabkan karena minimnya kemampuan administrasi yang dijadikan sebagai syarat perolehan modal dari pihak ketiga. Selain itu UMKM juga tidak memiliki agunan yang bisa digunakan sebagai jaminan pada pihak ketiga.<sup>59</sup>

2) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Rendahnya kualitas SDM menjadi halangan dalam meningkatkan daya saing dan kinerja UMKM yang meliputi aspek kompetensi, keterampilan, karakter, etos kerja, standarisasi produk, kesadaran mengenai pentingnya konsistensi mutu produk dan wawasan kewirausahaan. Sebagian pelaku UMKM masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang belum bisa ditangani dengan baik. Permasalahan ini yang sering dihadapi misalnya keahlian, kemampuan, keterampilan dan profesionalisme SDM yang relatif masih rendah. Pelaku UMKM harus memiliki kemampuan dalam aspek kewirausahaan, teknik produksi, manajemen, pengembangan produk, *quality control*, *engineering design*, organisasi bisnis, pemrosesan data, teknik pemasaran hingga kajian pasar.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Lilis Sulastris, *Manajemen Usaha Kecil Menengah* (Bandung: LaGood's Publishing, 2016), Hal. 13-17.

<sup>59</sup> Lila Bismala *et al.*, *Strategi Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah* (Medan: Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018), hal. 3.

<sup>60</sup> Rachmawan Budiarto *et al.*, *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual Dan Pengalaman Praktis* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018) hal. 26-27.

## b. Faktor Eksternal

### 1) Belum kondusifnya iklim usaha

Masih kurangnya koordinasi antar *stakeholder* UMKM dengan lembaga pemerintah, lembaga keuangan, institusi pendidikan, dan asosiasi usaha yang lebih sering berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, masih sulitnya penanganan aspek legalitas dan perizinan badan usaha, biaya transaksi tinggi, infrastruktur dan kebijakan dalam aspek pendanaan UMKM juga menjadi faktor penghambat UMKM berkembang karena tidak efisiensinya waktu dan tenaga dalam usaha.<sup>61</sup>

### 2) Kurangnya sarana dan prasarana usaha

Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi terkait kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sarana dan prasarana yang ada tidak berkembang dengan cepat dan tidak mendukung kemajuan usaha seperti yang diharapkan. Selain itu, tidak jarang UMKM mengalami kesulitan untuk mencari tempat usaha karena mahalnya biaya sewa atau lokasi yang kurang strategis.<sup>62</sup>

### 3) Praktik pungutan tidak resmi

Praktik pungutan tidak resmi atau lebih dikenal dengan pungutan liar, juga menjadi kendala karena menambah biaya bagi UKM. Pungutan liar tidak hanya terjadi sekali, tetapi bisa berulang secara berkala, seperti mingguan atau bulanan.

### 4) Implikasi Pemerintah Daerah

Dengan berlakunya UU No. 22 tentang Pemerintah Daerah pada tahun 1999 dan amandemen UU No. 32 pada

---

<sup>61</sup> Stefanus Yufra M. Taneo *et al.*, *Inovasi Disruptif: Strategi Untuk Memenangkan Usaha* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2021) hal. 10

<sup>62</sup> Reza Nurul Ichsan *et al.*, *Ekonomi Koperasi Dan UMKM* (Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2021), hal 187-188.

tahun 2004, pemerintah daerah memperoleh otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya. Perubahan kelembagaan ini akan berdampak pada pelaku usaha berupa pungutan-pungutan baru yang dibebankan kepada UMKM. Jika situasi ini tidak segera diatasi, maka akan menurunkan daya saing UMKM. Selain itu, sentimen lokal yang berlebihan terkadang menciptakan kondisi yang tidak menarik bagi pengusaha dari luar daerah untuk berbisnis di daerah tersebut.

#### 5) Implikasi perdagangan bebas

Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Korea (AFTA) pada tahun 2003 dan APEC pada tahun 2020 diketahui memiliki implikasi yang luas bagi UMKM yang bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, UMKM perlu melakukan proses produksi secara produktif dan efisien, serta mampu menghasilkan produk yang memenuhi frekuensi pasar global, bersama dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000), dan isu hak asasi manusia dan tenaga kerja. Isu-isu tersebut sering kali secara tidak adil digunakan sebagai hambatan (hambatan perdagangan non-tarif) di negara-negara maju. Oleh karena itu, UMKM harus siap untuk bersaing dalam hal keunggulan komparatif dan kompetitif.

#### 6) Daya tahan produk yang pendek

Sebagian besar produk UMKM memiliki karakteristik sebagai produk dan kerajinan yang berdaya tahan pendek, yang berarti bahwa produk yang dihasilkan oleh UMKM Indonesia mudah rusak dan kurang tahan lama.



7) Akses pasar yang terbatas

Akses pasar yang terbatas berarti produk tidak dapat dijual secara kompetitif baik di pasar domestik maupun internasional.

8) Terbatasnya akses informasi

Kurangnya informasi yang tersedia bagi UMKM mempengaruhi kemampuan produk atau layanan mereka untuk bersaing dengan yang lain dalam hal kualitas. Akibatnya, produk dan layanan UMKM tidak dapat memasuki pasar ekspor.

### C. Deskripsi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

#### 1. Pengertian Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan merupakan dasar hukum yang kuat bagi keberadaan Pokdarwis. Undang-Undang ini mengatur mengenai hak dan kewajiban masyarakat wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pembangunan Kepariwisataan, serta berbagai hal terkait kepariwisataan lainnya. Meskipun tidak secara khusus membahas mengenai Pokdarwis, namun keberadaan Pokdarwis diatur dalam undang-undang ini sebagai kelembagaan di tingkat masyarakat yang bertujuan untuk menggerakkan kegiatan pariwisata di suatu wilayah destinasi wisata.

Porkdarwis adalah organisasi swadaya masyarakat yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di komunitasnya. Porkdarwis memiliki peran dan kedudukan yang penting dalam pembangunan kepariwisataan yaitu sebagai agen pembangunan, sebagai penerima manfaat, dan sebagai motor penggerak dalam menciptakan lingkungan dan iklim yang kondusif bagi kepariwisataan serta mewujudkan sapta pesona di masyarakat.<sup>63</sup> Kelompok swadaya masyarakat yaitu pokdarwis dalam aktivitas sosialnya

---

<sup>63</sup> Maleny Zulaika and Febby Amelia Trisakti, "Community Based Ecotourism: Partisipasi Pokdarwis Dalam Mengembangkan Objek Wisata Pantai Pelawan Kabupaten Karimun," *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi* 3, no. 5 (August 11, 2022): 295–305, <https://doi.org/10.24014/jrmdk.v3i5.18770>.

yaitu meningkatkan pemahaman kepariwisataan, meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam sektor pembangunan pariwisata, meningkatkan manfaat obyek wisata untuk masyarakat/anggota pokdarwis dan menyukseskan kepariwisataan dalam sektor pembangunan.<sup>64</sup>

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai tangan kanan dari Dinas Pariwisata yang memiliki tugas dan fungsi sebagai motivator, penggerak serta komunikator dalam meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga dalam mengelola, melestarikan serta memanfaatkan potensi alam sehingga nantinya mampu menarik pengunjung. Sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas kegiatan pariwisata, Pokdarwis mendukung dan memandu anggota masyarakat yang terlibat dalam industri pariwisata, membuat paket wisata, pendampingan dan pengelolaan UMKM serta mempromosikan obyek wisata melalui media masa.

## 2. Aturan Pembentukan Pokdarwis

Kelompok Sadar Wisata, atau biasa disebut dengan Pokdarwis, adalah kelompok masyarakat yang bertugas untuk menjaga dan mengembangkan pariwisata. Pokdarwis tidak terlepas dari aturan yang dibuat oleh pemerintah pada saat pembentukannya, yang berarti keberadaannya memiliki dasar hukum yang kuat. Dasar hukum yang menjadi payung pembuatan pedoman kelompok sadar wisata ini antara lain:<sup>65</sup>

### a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

Kaitan antara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan Pokdarwis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan masyarakat: UU No. 10/2009 menekankan pemberdayaan masyarakat dalam kaitannya dengan pengembangan pariwisata di komunitas pulau kecil. Fokdarwis, sebuah lembaga di

<sup>64</sup> Eko Punto G, "Penguatan Organisasi Pokdarwis Sebagai Ujung Tombak Pengembangan Wisata Kampung Pelangi Kota Semarang," *Harmoni: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (December 4, 2019): 40–46.

<sup>65</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahu 2009 Tentang Kepariwisata.

tingkat desa, dapat menjadi wadah bagi masyarakat setempat untuk berpartisipasi aktif dalam mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata di desa mereka.

- 2) Pengembangan Pariwisata Desa: Undang-undang ini juga mendukung pengembangan pariwisata di wilayah desa. Dengan fokusnya pada pengembangan pariwisata desa, Fokdarwis dapat menjadi alat untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip UU tersebut di tingkat lokal. Penduduk desa yang tergabung dalam fokdarwis dapat bekerja sama untuk merencanakan, mengelola, dan mempromosikan atraksi wisata di daerah mereka.
- 3) Kelestarian dan keberlanjutan: UU No. 10/2009 menekankan keberlanjutan dan kelestarian dalam pengelolaan pulau-pulau kecil. Sebagai anggota masyarakat setempat, Fokdarwis dapat berperan dalam memastikan bahwa pengembangan pariwisata di desa dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, termasuk pelestarian lingkungan dan budaya setempat.

Oleh karena itu, Fokdarwis dapat berperan sebagai mitra lokal yang tepat dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UU No. 10/2009, khususnya dalam kaitannya dengan pengembangan pariwisata desa di wilayah pulau-pulau kecil.

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 tahun 2005

Peraturan ini membahas mengenai kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Indonesia. Inpres ini menekankan pentingnya pembangunan budaya dan pariwisata sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Meskipun arahan ini tidak secara langsung membahas Pokdarwis secara rinci, ada beberapa aspek kebijakan yang relevan dengan peran dan fungsi Pokdarwis, yaitu:<sup>66</sup>

- 1) Pemberdayaan masyarakat: Peraturan Presiden No. 16/2005 menekankan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengembangan budaya dan pariwisata. Fokdarwis, kelompok

---

<sup>66</sup> Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional.

masyarakat tingkat desa yang terlibat dalam pengembangan pariwisata, dapat menjadi salah satu mekanisme pemberdayaan masyarakat dalam semangat arahan ini.

- 2) Pengembangan pariwisata berbasis budaya: Inpres ini mendorong pengembangan pariwisata berbasis budaya Indonesia. Dengan fokusnya pada pengembangan pariwisata desa, pokdarwis dapat memainkan peran penting dalam melestarikan dan mempromosikan aspek budaya daerah sebagai daya tarik wisata.
- 3) Peran pemerintah daerah: Pedoman Presiden mengakui pentingnya peran pemerintah daerah dalam pengembangan budaya dan pariwisata. Pemerintah daerah harus mendukung inisiatif masyarakat, seperti folkdarwis, untuk mengembangkan potensi pariwisata di tingkat desa.
- 4) Koordinasi antar lembaga: Instruksi Presiden mengamanatkan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan kebijakan budaya dan pariwisata. Dalam konteks ini, Fokdawis dapat berperan sebagai mitra untuk mengkoordinasikan kegiatan pengembangan pariwisata di tingkat desa dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, dinas terkait, dan masyarakat.

Meskipun pedoman ini tidak secara khusus menyebutkan pokdarwis, prinsip-prinsip dalam pedoman ini dapat menjadi dasar bagi pokdarwis untuk menjalankan perannya dalam pengembangan pariwisata desa berbasis budaya di Indonesia.

- c. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 07/HK.001/MKP-2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi Pedoman Kelompok Sadar Wisata dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata berisi tentang tata cara pendaftaran usaha kawasan pariwisata. Hal ini termasuk dalam upaya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Lebih lanjut, peraturan ini juga mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KEP-012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata.<sup>67</sup>

d. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008

Peraturan ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kesadaran wisata. Di bawah ini adalah beberapa aspek yang diatur oleh peraturan ini yaitu.<sup>68</sup>

- 1) Prosedur Pendaftaran Sadar Wisata: Peraturan ini menetapkan prosedur pendaftaran sadar wisata, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon.
- 2) Manajemen Sadar Wisata: Peraturan ini juga mengatur pengelolaan sadar wisata, termasuk tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang berwenang dalam melaksanakan kegiatan sadar wisata.
- 3) Inspeksi dan Evaluasi Sadar Wisata: Peraturan ini mencakup inspeksi dan evaluasi kesadaran wisata, termasuk prosedur dan standar yang harus dipenuhi ketika melakukan inspeksi dan evaluasi.
- 4) Pengawasan kesadaran pariwisata: Peraturan ini juga menetapkan pengawasan kesadaran pariwisata, termasuk tugas dan tanggung jawab pihak berwenang yang melakukan pengawasan kesadaran pariwisata.
- 5) Menyelesaikan masalah dan keluhan: Peraturan ini mencakup penyelesaian masalah dan keluhan yang terkait dengan kesadaran pariwisata, termasuk prosedur dan kriteria yang harus dipenuhi untuk melakukan penyelesaian masalah dan keluhan.

---

<sup>67</sup> Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007 Tentang Organisasi Pedoman Kelompok Sadar Wisata dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

<sup>68</sup> Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP Tahun 2008 tentang Sadar Wisata.



Peraturan ini dimaksudkan untuk menerapkan dan melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

- e. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 11 PM.17/PR.001/MKP/2010

Peraturan Menteri tersebut membahas mengenai Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 2010-2014 mencakup berbagai aspek yang terkait dengan perencanaan strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Berikut ini adalah beberapa aspek yang diatur dalam peraturan ini, yaitu:<sup>69</sup>

- 1) Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata: Peraturan ini menetapkan visi, misi, dan tujuan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, termasuk tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis pada kesejahteraan masyarakat.
- 2) Prioritas dan Program Strategis: Peraturan ini juga menetapkan prioritas dan program strategis yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, termasuk pengembangan pariwisata, pengembangan kesenian, dan pengembangan budaya.
- 3) Struktur Organisasi dan Tata Kerja: Peraturan ini membahas struktur organisasi dan prosedur kerja Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, termasuk tugas dan tanggung jawab masing-masing departemen dalam mengimplementasikan rencana strategis.
- 4) Pengembangan sumber daya manusia: Peraturan ini juga menetapkan pengembangan sumber daya manusia di dalam Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, termasuk pengembangan staf profesional dan non-profesional.
- 5) Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas: Peraturan ini membahas pengembangan infrastruktur dan fasilitas di lingkungan

---

<sup>69</sup> Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 11 PM.17/PR.001/MKP Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, termasuk pengembangan fasilitas pariwisata, seni, dan budaya.

- 6) Pengembangan Kerjasama dan Kolaborasi: Peraturan ini juga mengatur pengembangan kerja sama dan kolaborasi di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, termasuk pengembangan kerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal.

Peraturan ini dimaksudkan untuk menerapkan dan melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

### **3. Tujuan dan Fungsi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)**

#### **a. Tujuan Pembentukan Pokdarwis**

Tujuan dari pokdarwis yaitu melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat serta pengembangan pariwisata secara berkesinambungan. Meningkatkan peran serta masyarakat yang menjadi subjek hingga mampu menumbuhkan sikap masyarakat sebagai tuan rumah.<sup>70</sup>

- 1) Meningkatkan status dan peran masyarakat lokal sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta bekerja sama dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kualitas pembangunan kepariwisataan lokal.
- 2) Membangun dan menumbuhkan sikap positif dan dukungan masyarakat setempat melalui penyadaran nilai-nilai kepariwisataan bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan setempat serta manfaat kepariwisataan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>70</sup> Ika Barokah *et al*, *Manajemen Pemasaran Pariwisata dan Indikator Pengukuran* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2020) hal. 156

3) Memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing daerah.<sup>71</sup>

b. Fungsi Pokdarwis

1) Sebagai penggiat sadar wisata di lingkungan lokal daerah tujuan wisata.

2) Sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah (kabupaten/kota) untuk mewujudkan dan mengembangkan peningkatan sadar wisata di daerah. Lokasi Kelompok Peningkatan Sadar Wisata.<sup>72</sup>

#### 4. Penguatan Kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Penguatan kelembagaan merupakan hal yang sangat penting karena akan menjadi penentu keberhasilan terhadap program yang menjadi tanggung jawab suatu lembaga terutama pokdarwis yang menjadi komponen masyarakat yang berkontribusi dan memiliki peranan penting dalam pengembangan masyarakat terutama sektor pariwisata. Maka dari itu diperlukan penguatan kelembagaan pokdarwis yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>73</sup>

a. Sosialisai Penguatan Kelembagaan Pokdarwis

Sebagai langkah awal dalam kegiatan pengabdian adalah sosialisasi dengan memberikan pengetahuan mengenai kelembagaan pokdarwis. Sosialisasi dimaksudkan untuk menyamakan kesadaran kelembagaan, tanggung jawab, dan tugas Fokdarwis dalam menciptakan suasana Saptah Pesona yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan berkesan. Pertemuan ini juga mengundang berbagai unsur pengurus Karantaruna, PKK, UMKM, dan Bumdes untuk mengirimkan perwakilannya dalam kepengurusan Fokdarwis. Ditegaskan pula bahwa tugas Pokdarwis adalah

---

<sup>71</sup> G, "Penguatan Organisasi Pokdarwis Sebagai Ujung Tombak Pengembangan Wisata Kampung Pelangi Kota Semarang.", Vol. 3, Jurnal Harmoni, 2019, hal. 40-46.

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Haniek Listyorini et al., "PENGUATAN KELEMBAGAAN POKDARWIS DALAM MERINTIS DESA WISATA MELALUI PENCIPTAAN IDENTITAS DAN KAPABILITAS PERENCANAAN ORGANISASI," n.d.

mengkoordinasikan pengemasan produk dan layanan seperti atraksi wisata, amenitas, dan aksesibilitas untuk memastikan bahwa nilai Saptah Pesona terasa selama beraktivitas di kota wisata.

b. Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD)

Memperkuat kelembagaan pada sektor pariwisata tentunya melibatkan seluruh aktor guna merumuskan kebijakan atau langkah-langkah yang akan diambil, salah satunya yaitu *Focus Group Discussion* (FGD) yang berguna untuk menyusun langkah-langkah yang akan diambil dalam perencanaan dan pengembangan hingga implementasinya.<sup>74</sup> Hal yang perlu dibahas dalam FGD ini diantaranya yaitu:

1) Penyusunan Identitas Kelembagaan

*Focus Group Discussion* (FGD) ini diperlukan guna menampung aspirasi pengurus dalam menentukan nama yang mencerminkan sejarah, karakter, serta pembuatan desain logo pokdarwis.

2) Penyusunan Visi dan Misi Kelembagaan

Mengembangkan visi, misi, strategi, dan program kegiatan adalah bentuk akuntabilitas organisasi Anda. Visi adalah tujuan jangka panjang dan impian untuk masa depan, dan memandu keputusan dan aktivitas sehari-hari anggota organisasi untuk mencapai visi tersebut. Pernyataan visi dianggap sebagai elemen penting dalam mengembangkan strategi organisasi. Fungsi visi termasuk memberikan panduan dalam menghubungkan masa kini dengan masa depan, menginspirasi komitmen, dan menetapkan standar keunggulan bagi organisasi.

3) Penyusunan Strategi dan Kegiatan Pokdarwis

---

<sup>74</sup> Izza Mafruhah *et al.*, *Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekologi dan Edukasi Di Kawasan Waduk Kedung Ombo Sragen (2E Tourism)* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021), hal. 145.

Visi dan misi yang telah dikembangkan akan menghasilkan strategi dan program kegiatan untuk diimplementasikan. Kepedulian anggota menjadi penentu kesuksesan mengenai program yang akan mereka jalankan. Partisipasi masyarakat dan berbagai elemen kelembagaan yang diperlukan juga diperlukan guna menentukan dan menemukan permasalahan serta mengajukan usulan kegiatan.

c. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Monitoring dan evaluasi merupakan proses yang penting karena disini lah suatu lembaga dapat meninjau hal apa yang menjadi hambatan program dan meninjau kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi saat pra pelaksanaan hingga tahap pelaksanaan program dan pencapaian yang telah berhasil didapatkan. Dengan monitoring dan evaluasi yang kuat pada setiap program dan kegiatan akan berada dalam sistem yang sesuai dengan perencanaan. Selain itu, problematika yang dihadapi juga bisa diprediksi lebih awal sehingga dapat meminimalisir ancaman yang lebih besar di kemudian hari.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Mulyono & Yumari, *Strategi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran* (Sleman: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2017), hal. 3.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Kajian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif, yaitu kajian yang memiliki tujuan guna memvisualisasikan peristiwa di lapangan agar memperoleh pemahaman mendalam yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat pada manusia dan sosial. Penelitian ini menafsirkan mengenai bagaimana subjek dapat mendapatkan arti melalui lingkungan sekitar dan bagaimana suatu lingkungan tersebut bisa memengaruhi tingkah laku mereka. Kajian ini diperoleh melalui hasil observasi di lapangan dalam latar (setting) yang alamiah bukan berasal dari hasil manipulasi variabel.<sup>76</sup>

Kajian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif karena peneliti menggambarkan bagaimana “pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM yang dikelola oleh Pokdarwis Banjarandap di Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga”.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif. Penggunaan pendekatan deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui umkm yang dikelola oleh Pokdarwis Banjarandap. Pendekatan deskriptif berfokus pada pengamatan yang lebih intensif guna menghasilkan catata yang selaras dengan fenomena berupa kalimat atau naratif yang dijadikan sebagai alat untuk mengambil kesimpulan.<sup>77</sup>

Bentuk kajian ini memiliki tujuan guna memberikan gambaran, memaparkan dan memetakan fakta yang selaras dengan kerangka

---

<sup>76</sup> Warul walidin AK, dkk, *Metodelogi Peneitian Kualitatif Dan Grounded Theory*, ( Aceh : FTK Ar-Raniry Press, 2015). hlm.76-77.

<sup>77</sup> Joana Maria, “Implementasi Community Based Tourism Dalam Pengelolaan Desa Wisata Candran Yogyakarta”, (Skripsi, UIN Sunan Klajjaga Yogyakarta, 2022), hal 28.

berfikir atau cara pandang.<sup>78</sup> Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Pemberdayaan Masyarakat Melalui UMKM Yang Dikelola Oleh Pokdarwis Banjarandap di Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Pendekatan ini dilakukan karena peneliti menganalisis dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi terkait pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pokdarwis Banjarandap serta dipaparkan dalam bentuk narasi.

## **B. Lokasi Penelitian**

Tempat penelitian di Obyek Wisata Banjarandap di Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga.

## **C. Data Dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dan sekunder ini yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer ialah data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya atau pihak pertama. Data primer merupakan jenis data utama yang digunakan dalam penelitian dan bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti. Dalam kajian ini penulis menggunakan hasil dari observasi dan wawancara secara langsung pada ketua kelompok Pokdarwis Banjarandap, anggota Pokdarwis Banjarandap, pelaku usaha UMKM dan tokoh masyarakat terkait dengan permasalahan yang dibahas.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder ini yaitu sumber data yang bermanfaat untuk menambah dan melengkapi sumber data primer. Perolehan data yang menjadi sumber data dalam kajian ini ialah dokumentasi dari data

---

<sup>78</sup> Aizul Ikhwan, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Manufaktur Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas", (Skripsi, UIN Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), hal 34.

pemerintah desa, buku, undang-undang, jurnal dan hasil penelitian yang nantinya dimanfaatkan sebagai penunjang dari data primer.

#### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

##### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan hal yang nantinya menjadi kesimpulan dari hasil penelitian, yaitu semua objek dimana terdapat beberapa narasumber atau informan yang bisa memberi informasi mengenai hal-hal penting berkaitan dengan kajian yang akan dilakukan.

Subjek kajian yang dijadikan sebagai sumber data yaitu orang-orang yang memiliki peran dan mengetahui mengenai informasi penelitian diantaranya yaitu Trio Irama (ketua Pokdarwis Banjarandap), Feni Feronika dan Saliman (anggota Pokdarwis Banjarandap), Pelaku usaha UMKM dan Lintang Salimin (tokoh masyarakat).

##### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan aktivitas penelitian yang ingin dikaji. Objek dari penelitian ini ialah mengkaji pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM yang dikelola oleh Pokdarwis Banjarandap di Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah deretan metode yang digunakan untuk menimbun data yang didapatkan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam kajian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi yaitu suatu tindakan pengamatan mengenai suatu objek tertentu yang dilakukan secara cermat dengan dilaksanakan langsung di lokasi penelitian. Observasi pada dasarnya merupakan aktivitas yang

menggunakan pancaindera, berupa penglihatan, penciuman, pendengaran, guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab problem kajian. Hasil observasi berupa kegiatan, kejadian, peristiwa, objek, situasi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang.<sup>79</sup>

Observasi bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat, mendapatkan kesimpulan, dan mendapatkan data serta informasi mengenai bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui UMKM yang dikelola oleh Pokdarwis Banjarandap di Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu melalui observasi secara langsung dengan mendatangi tempat yang akan diteliti yaitu Pokdarwis Banjarandap dan para Pelaku usaha UMKM di Objek Wisata Banjarandap dengan mengkaji bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui UMKM yang dikelola oleh Pokdarwis Banjarandap di Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga.

## 2. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan salah satu tindakan pengumpulan data yang bisa dimanfaatkan untuk penelitian sosial. Wawancara merupakan percakapan terstruktur dimana salah satu orang mengajukan pertanyaan dan pihak lain menjawab pertanyaan. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, mendalam dan objektif, serta mampu memberikan sudut pandang baru terhadap topik yang dibicarakan. Wawancara mengaruskan adanya pertemuan antara kedua belah pihak baik itu dari pihak peneliti maupun subjek kajian bertemu dan berkorelasi secara langsung dan

---

<sup>79</sup> Mudjia Rahardjo, *Metode Penelitian Data Penelitian Kualitatif*, (t.k: t.p, 2011), hlm. 2.

aktif supaya mencapai target dan memperoleh data yang baik dan akurat.<sup>80</sup>

Peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait guna memperoleh informasi yang dibutuhkan yaitu kepada Triono selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Banjarandap dan beberapa pelaku UMKM di Objek Wisata Banjarandap terkait aktivitas dan program-program pemberdayaan pelaku UMKM di Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu proses menimbun, pengolahan, pemilihan dan penyimpanan informasi dalam hal pengetahuan. Dokumentasi ini dapat berupa catatan kejadian yang telah berlalu, baik itu dalam bentuk tulisan, *image*, arsip, atau karya-karya monumental. Dokumentasi dilakukan guna mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kajian yang nantinya dimanfaatkan untuk memperoleh data tambahan mengenai data-data yang akan dianalisis sebelum pada akhirnya peneliti menuliskannya pada skripsi.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan mekanisme pengolahan atau penyusunan data supaya bisa dijelaskan secara lebih lanjut dengan mengharmonisasikan teori dan hasil penelitian.<sup>81</sup> Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data penelitian kualitatif Model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dikerjakan dengan interaktif dan berjalan secara terus-menerus, sehingga data yang dihasilkan sudah jenuh.<sup>82</sup> Kegiatan analisis data diantaranya yaitu:

---

<sup>80</sup> Mita Rosaliza, "Wawancara: Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11, No. 2, 2015.

<sup>81</sup> Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012). Hal, 146.

<sup>82</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 246.



### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan analisis yang dihasilkan dari pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui wawancara serta dokumentasi yang didapatkan dari informan berupa data primer maupun sekunder dengan mengkategorisasi dan merangkumnya supaya data tersebut menjadi lebih sederhana.<sup>83</sup> Data yang sudah direduksi memberikan refleksi yang lebih jelas serta akan memudahkan penulis nantinya guna mengumpulkan dan mencari data lebih lanjut bila diperlukan.

### 2. Penyajian data

Miles dan Huberman menyatakan bahwa penyajian data merupakan hasil informasi yang diperoleh saat dilapangan yang diolah terlebih dahulu sehingga kemudian disuguhkan dalam situasi yang sudah tersusun sehingga mudah dipahami dan memungkinkan untuk penyimpulan data.<sup>84</sup> Dalam penyajian data ini berbentuk teks naratif yang menyuguhkan bukti observasi dilapangan yaitu berupa catatan hasil wawancara ataupun rekaman, selain itu juga bisa berupa grafik, matriks atau bagan.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dalam teknik analisis data merupakan penarikan kesimpulan dimana akan mengambil inti dari penemuan peneliti yang mendefinisikan kondisi dilapangan apakah telah memperoleh jawaban dari apa yang dicari setelah itu mencari keterkaitan, persamaan maupun perbedaan dalam kajian ini. Dalam menarik suatu kesimpulan juga bisa bersifat sementara, hal ini dikarenakan terdapat kemungkinan

---

<sup>83</sup> Nurul Hidayah, Khairulyadi, "Upaya Institusi Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Anak Di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Institusi Formal Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Di Kota Banda Aceh)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 2 No. 2, 2017: 737-763, hal. 750.

<sup>84</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, "Dasar Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Hal. 123.

perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang menunjang penelitian ini.<sup>85</sup>



---

<sup>85</sup> Hardani dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, ..... Hal. 171

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Tempat Penelitian**

##### **1. Kondisi Geografis Desa Banjaran**

Desa banjaran merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga bagian utara dengan luas wilayah 327.99 Ha atau sekitar 0,24% dari luas wilayah Kabupaten Purbalingga. Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari memiliki batas-batas administratif yaitu wilayah bagian utara berbatasan dengan Desa Sindang Kecamatan Mrebet, wilayah bagian timur berbatasan dengan Desa Slinga Kecamatan Kaligondang, wilayah bagian selatan berbatasan dengan Desa Galuh dan Desa Gembong Kecamatan Bojongsari, sedangkan wilayah bagian barat berbatasan dengan Desa Bojongsari dan Desa Patemon Kecamatan Bojongsari.

Secara administratif Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari terbagi menjadi 5 (lima) Kepala Dusun dengan 12 (dua belas) RW dan 25 (dua puluh lima) RW. Dalam pemanfaatan lahan, sebagian besar merupakan tanah kering dengan luas 199,79 Ha (60,91%), untuk pemukiman seluas 100 Ha (50,05%), tegalan 78 Ha (32,7%), lahan persawahan seluas 128,20 Ha (39,7%), sedangkan sisanya terdiri dari perkebunan, lahan usaha perikanan dll.<sup>86</sup>

##### **2. Kondisi Demografis Desa Banjaran**

###### **a. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk suatu wilayah sangat beragam karena dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti luas wilayah, lahan pertanian, pekerjaan, tingkat pendidikan, tingkat urbanisasi, tingkat kelahiran dan kematian. Berikut merupakan data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2019 sampai 2021, yaitu:

---

<sup>86</sup> Data Profil Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari 2021

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Banjaran**

URAIAN	2019	2020	2021
Laki-laki	3.012 jiwa	3.032 jiwa	3.084 jiwa
Perempuan	2.976 jiwa	3.001 jiwa	3.028 jiwa
Jumlah	5.988 jiwa	6.033 jiwa	6.112 jiwa

*Sumber: Data Profil Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari*  
2021

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa, penduduk di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga didominasi oleh laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari data tahun 2019 hingga 2021 jumlah penduduk laki-laki lebih unggul dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Angka kelahiran di Desa Banjaran tergolong cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel data diatas yang menunjukkan penambahan jumlah penduduk dari tahun 2019 dengan jumlah 5.988 jiwa, kemudian pada tahun 2020 bertambah menjadi 6.033 jiwa dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 6.112 jiwa.<sup>87</sup>

### 3. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Banjaran

Berikut adalah tabel data penduduk Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga berdasarkan tingkat pendidikan:

**Tabel 1.2**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Banjaran**

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Perguruan tiggii/Akademi	119 orang
2	SLTA	201 orang
3	SLTP	708 orang
4	SD	2.649 orang
5	Tidak tamat SD	112 orang

<sup>87</sup> Data Profil Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari 2021

<b>6</b>	Belum tamat SD	869 orang
<b>7</b>	Tidak/belum sekolah	892 orang
	<b>Jumlah</b>	5.550 orang

*Sumber: Data Profil Desa Bnajaran Kecamatan Bojongsari 2021*

Dari tabel data masyarakat Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari berdasarkan tingkat pendidikannya, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakatnya masih cenderung rendah. Berdasarkan pada data tabel diatas, masyarakat yang tidak tamat SD mencapai angka 112 orang dan angka yang mendominasi yaitu masyarakat yang hanya tamat SD hingga mencapai 2.649 orang.<sup>88</sup>

#### **4. Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Banjaran**

Jenis mata pencaharian masyarakat Desa Banjaran memiliki keragaman, mulai dari petani hingga pegawai negeri. Mata pencaharian ini tentunya sangat memengaruhi perekonomian karena dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat. Berikut merupakan sumber penghasilan utama masyarakat Desa Banjaran menurut mata pencaharian, yaitu:

**Tabel 1.3**

**Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Banjaran**

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah
<b>1</b>	Petani	192 orang
<b>2</b>	Buruh tani	149 orang
<b>3</b>	Buruh industri	680 orang
<b>4</b>	Buruh Bangunan	33 orang
<b>5</b>	Pengusaha	3 orang
<b>6</b>	Pedagang	263 orang
<b>7</b>	Angkutan	33 orang
<b>8</b>	PNS	13 orang
<b>9</b>	TNI/POLREI	6 orang
<b>10</b>	Pensiunan	14 orang
<b>11</b>	Lain-lain	3.856 orang

*Sumber: Data Profil Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari 2021*

<sup>88</sup> Data Profil Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari 2021



Data tabel diatas merupakan jenis mata pencaharian masyarakat Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata mata pencaharian masyarakatnya yaitu berupa buruh industri dengan mencapai angka 680 orang, sedangkan pedagang berjumlah 263 orang.<sup>89</sup>

## 5. Sejarah Pendirian Obyek Wisata Banjarandap

Obyek Wisata Banjarandap merupakan obyek wisata yang terletak di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. Obyek wisata ini menyuguhkan pemandangan bernuansakan alam berupa sungai dan bendungan serta kesejukan dan ketenangan di dalamnya. Bendungan ini biasa dikenal dengan nama Bendungan Selis. Obyek Wisata Banjarandap ini berdiri pada tahun 2020, berawal dari rasa kepedulian dan tanggungjawab terhadap masyarakat yaitu Muhamad Ichmun sebagai Kepala Desa dan Trio Irama yang memikirkan bagaimana caranya agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat khususnya masyarakat lokal. Karena dengan adanya lapangan pekerjaan maka akan mampu memperbaiki kondisi kesejahteraan hingga mampu memperbaiki taraf ekonomi masyarakat. Dengan menciptakan lapangan pekerjaan maka akan menekan angka pengangguran bahkan lebih dari pada itu juga mampu meningkatkan kehidupan sosial masyarakat.

Berangkat dari pemikiran tersebut, dengan menganalisis dan melihat aset yang terdapat di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari ini mereka menemukan potensi yang ada pada Bendungan Selis yang nantinya mampu dijadikan sebagai Obyek Wisata. Kemudian Muhamad Ichmun dan Trio Irama mengumpulkan ketua RT, tokoh masyarakat, dan juga warga sekitar untuk menyampaikan gagasan tersebut dan mengajak untuk saling bersinergi mendirikan obyek wisata. Dalam musyawarah tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yang salah satunya yaitu menjadikan area Banjarandap sebagai destinasi wisata.

---

<sup>89</sup> Data Profil Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari 2021

Hal ini di saksikan oleh Trio Irama selaku Ketua Pokdarwis Banjarandap:

“kalau awal mulanya berdiri Obyek Wisata Banjarandap itu dulu, pertama kali itu saya sama pak kades baru memang punya pemikiran pengin menciptakan lapangan kerja khususnya untuk warga, terus kami melihat bahwa setelah adanya Bendungan Selis ini ada potensi untuk dijadikan Obyek Wisata. Maka dari itu, kami berembug-rembug dengan rekan-rekan yang lain, pada saat itu dengan para ketua RT yang punya satu misi pengin istilahnya membuka lapangan kerja untuk warga. Jadi, kami sepakat untuk membuat Wisata Banjarandap.”<sup>90</sup>

Nama Banjarandap diambil dari nama tempat Obyek Wisata ini berada. Kata Banjarandap berasal dari kata depan “*Banjar*” dalam Bahasa Melayu yang memiliki arti “*Perumahan warga yang terletak di tepian sungai*”, sedangkan kata “*Andap*” berasal dari Bahasa Jawa yang berarti “*Bawah*”. Selain itu, nama Banjarandap juga diceritakan bahwa konon katanya diambil dari nama blok sawah bagian utara, namun akibat erosi oleh air sungai kini sawah tersebut sudah terendam dan menjadi bagian dari sungai. Seperti yang diceritakan oleh Lintang Salimin selaku tokoh masyarakat Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari, sebagai berikut:

“Nama Banjarandap itu diambil dari nama tempat di zaman dahulu yang konon katanya diambil dari blok sawah sebelah utara tapi sekarang sudah jadi sungai terkena erosi. Dulu juga ada satu keluarga yang tinggal disitu tpi ini ceritanya masih simpang siur mba belum jelas nama keluarga itu tersebut.”<sup>91</sup>

Peranan masyarakat merupakan aspek terpenting dalam pendirian obyek wisata. Dengan adanya kesinergian antara seluruh elemen masyarakat maka akan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kesamaan visi dan misi juga sangat penting agar nantinya dapat meminimalisir kemungkinan-kemungkinan konflik yang akan terjadi pada masyarakat. Tanpa adanya kerjasama antar elemen maka akan

---

<sup>90</sup> Hasil Wawancara Dengan Trio Irama, Sejarah Berdirinya Obyek Wisata Banjarandap, 26 Februari 2024.

<sup>91</sup> Hasil Wawancara Dengan Lintang Salimin, Sejarah Nama Banjarandap, 11 Maret 2024.

mengalami berbagai macam ancaman maupun hambatan yang akan menimpa tanpa adanya bantuan.

Pandemi Covid-19 merupakan ancaman bagi seluruh sektor kehidupan di masyarakat terutama sektor pariwisata. Tidak terkecuali pada Obyek Wisata Banjarandap ini yang mengalami kendala di tahun pertama pembentukan yaitu tahun 2020 sehingga membuat obyek wisata ini harus ditutup selama masa pandemi. Setelah pandemi usai, kemudian Obyek Wisata Banjarandap mulai berjalan lagi pada tahun 2022, namun ternyata perjalanan ini tidak mengalami kelulusan. Hal ini disebabkan oleh adanya relokasi akibat aturan Sempadan Sungai yang menyatakan bahwa bangunan atau Obyek wisata harus paling sedikit berjarak 100 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.<sup>92</sup> Maka dari itu harus dilakukan relokasi yang memunculkan masalah baru. Setelah situasi mulai stabil dan meningkatnya jumlah pengunjung kemudian pada tanggal 19 Agustus Tahun 2023 Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga ditetapkan menjadi Desa Wisata dengan di terbitkannya SK Desa Wisata yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Purbalingga yang diserahkan oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Purbalingga.

## **6. Deskripsi Pokdarwis Banjarandap**

Kelompok Sadar Wisata atau lebih dikenal sebagai Pokdarwis merupakan kelompok yang berasal dari masyarakat yang menjadi wadah bagi masyarakat guna mengelola kepariwisataan di tingkat Desa. Dalam menjadi anggota pokdarwis harus lah memiliki rasa kepedulian, tanggung jawab, serta mampu menjadi penggerak dalam mendukung iklim kondusif kepariwisataan sehingga terwujudnya Sapta Pesona. Begitu juga halnya dengan Pokdarwis Banjarandap yang merupakan

---

<sup>92</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau.

lembaga kemasyarakatan yang mengelola Desa Wisata Banjaran khususnya Obyek Wisata Banjarandap.

Sejarah pembentukan Pokdarwis Banjarandap ini beriringan dengan berdirinya Obyek Wisata Banjarandap, hal ini dikarenakan dalam mendirikan obyek wisata harus memiliki kepengurusan yang bertanggung jawab atas pengelolaan obyek wisata. Maka dari itu dibentuk lah Pokdarwis Banjarandap sebagai pengelola Obyek Wisata Banjarandap.

Pembentukan Pokdarwis Banjarandap dilakukan dengan mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa Banjaran dengan Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat guna menentukan struktur kepengurusan. Selanjutnya Pokdarwis Banjarandap mendaftarkan kepengurusannya ke Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga. Namun, seiring dengan berjalannya waktu anggota Pokdarwis Banjaran belum bisa secara maksimal dalam menjalankan program kerja sesuai dengan yang direncanakan dan cenderung pasif serta berjalan secara individual. Sejak berdirinya Obyek Wisata Banjarandap melihat animo masyarakat yang antusias dengan kunjungan wisatawan yang meningkat tetapi dengan pengelola wisata yang kurang maksimal, akhirnya Pemerintah Desa dan masyarakat yang peduli akan kemajuan desanya sepakat untuk merekonstruksi kepengurusan Pokdarwis Banjarandap. Rekonstruksi kepengurusan Pokdarwis Banjarandap ini dilakukan pada tanggal 12 April 2021 dengan mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa Banjaran, Perangkat Desa, BPD, KPMD, Ketua RT, tokoh masyarakat dan pemuda Desa Banjaran. Rapat rekonstruksi kepengurusan Pokdarwis Banjarandap ini dipimpin oleh kepala desa dengan masing-masing ketua RT mengusulkan dan mencalonkan warganya atau mencalonkan diri sebagai pengurus atau anggota. Berikut merupakan struktur kepengurusan Pokdarwis Banjarandap:

**Tabel 1.4**  
**Susunan Pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)**  
**Banjarandap Desa Banjaran**

No	Nama	Kedudukan Dalam Kepengurusan
1	Trio Irama	Ketua
2	Randi Rifai Paryo	Wakil Ketua
3	Budi Wahyono	Sekretaris I
4	Eri Setiawan	Sekretaris II
5	Mahmud	Bendahara
6	Usman Waryanto	Sie Kebersihan dan Keindahan
7	Winarto	Sie Keamanan dan Ketertiban
8	Ngamaludin	Sie Daya Tarik Wisata dan Kenangan
9	Suroso	Sie Humas dan Pengembangan
10	Dwi Angga	Sie Pengembangan Usaha
11	Nurul Mufida	Sie Dokumentasi dan Publikasi

Sumber: Data Pengurus Pokdarwis Banjarandap 2024

### 7. Deskripsi UMKM Banjarandap

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Banjarandap merupakan pelaku usaha kecil yang berada di dalam pengasuhan Pokdarwis Banjarandap di lingkungan Obyek Wisata Banjarandap. UMKM ini dibentuk seiring dengan terbentuknya Obyek Wisata Banjarandap. UMKM di Obyek Wisata Banjarandap yaitu UMKM jenis makanan dan minuman. UMKM merupakan unsur terpenting dalam sebuah pariwisata karena akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Bisa diibaratkan adanya obyek wisata tanpa adanya UMKM di dalamnya bagaikan masakan tanpa garam karena begitulah pentingnya peranan UMKM dalam suatu obyek wisata. Selain menjadi daya tarik, adanya UMKM di obyek wisata juga



membuka peluang usaha bagi masyarakat lokal dan menambah pendapatan keluarga.

Pemberdayaan masyarakat lokal (*locality development*) merupakan pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan peranan masyarakat lokal dalam pembangunannya. Oleh karena itu, Pokdarwis Banjarandap selaku pengurus dan pengelola obyek wisata mengajak dan mengikutsertakan masyarakat untuk berkontribusi di dalamnya dengan membuka pendaftaran bagi siapa saja yang berminat untuk membuka usaha di Obyek Wisata Banjarandap. Dengan dibukanya peluang ini maka masyarakat bisa bergabung dengan UMKM Banjarandap. Fasilitas yang didapatkan oleh pelaku UMKM di Obyek Wisata Banjarandap yaitu penyediaan lapak penjualan berupa warung yang bisa digunakan oleh pelaku usaha. Berikut merupakan daftar pelaku UMKM di Obyek Wisata Banjarandap:

**Tabel 1.5**

**Daftar Anggota UMKM di Obyek Wisata Banjarandap**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Jenis UMKM
1	Afi	P	Banjaran, Rt. 11/06	makanan
2	Ari	L	Banjaran, Rt. 12/06	Makanan
3	Bariyah	P	Banjaran, Rt. 07/04	Makanan
4	Bardimin	L	Banjaran, Rt. 06/03	Makanan
5	Bowo	L	Banjaran, Rt. 14/07	Makanan
6	Dewi	P	Banjaran, Rt. 04/02	Makanan
7	Eli	P	Banjaran, Rt. 08/04	Makanan
8	Hopyati	P	Banjaran, Rt. 06/03	Makanan
9	Isti	P	Banjaran, Rt. 07/04	Makanan
10	Khatimah	P	Banjaran, Rt. 11/06	Makanan
11	Kustimin	L	Banjaran, Rt. 02.01	Makanan
12	Kuswati	P	Banjaran, Rt. 12/06	Makanan

13	Liana	P	Banjaran, Rt. 11/06	Makanan
14	Mailah	P	Banjaran, Rt. 08/04	Makanan
15	Masini	P	Arenan	Makanan
16	Marisah	P	Banjaran, Rt. 02/01	Makanan
17	Martini	P	Banjaran, Rt. 12/06	Makanan
18	Muginah	P	Banjaran, Rt. 12/06	Makanan
19	Musdirroh	L	Banjaran, Rt. 07/04	Makanan
20	Nur Hayati	P	Banjaran, Rt. 10/05	Makanan
21	Rianti	P	Sidanegara	Makanan
22	Robi AS	L	Mewek	Makanan
23	Saeun	L	Banjaran, Rt. 04/02	Makanan
24	Sangud	L	Arenan	Makanan
25	Sarawati	P	Banjaran, Rt. 08/04	Makanan
26	Siswati	P	Banjaran, Rt. 06/03	Makanan
27	Suparmi	P	Banjaran, Rt. 12/06	Makanan
28	Tasmiah	P	Banjaran, Rt. 11/06	Makanan
29	Titin	P	Banjaran, Rt. 08/04	Makanan
30	Trianti	P	Banjaran, Rt. 09/05	Makanan
31	Urip Rihanatun	P	Slinga	Makanan
32	Wartiah	P	Banjaran, Rt. 08/04	Makanan
33	Yanti	P	Banjaran, Rt. 06/03	Makanan

Bergabungnya masyarakat dengan UMKM ini tentunya memiliki dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat, karena sebelum bergabungnya masyarakat dengan UMKM Banjardap latar belakang mata pencaharian yang dimiliki sangat bermacam-macam, mulai dari ibu rumah tangga, pekerja PT, pedagang keliling, hingga pengrajin anyaman bambu (gedeg). Namun, rata-rata masyarakat yang bergabung dengan UMKM ini sebelumnya bekerja sebagai pengrajin

gedeg yang memiliki pemasukan yang terbilang minim dan tidak sebanding dengan waktu dan bahan baku yang di curahkan dengan satu gulung gedeg hanya dihargai sekitar Rp. 25. 000,00 hingga Rp. 35.000,00 dengan ukuran 2x3 meter dan 3x3 meter dan harga termahal yaitu gedeg motif dihargai sekitar Rp. 100.00,00 hingga Rp. 150.000,00./gulung. Hal ini tentu saja tidak sebanding dengan waktu, usaha dan tenaga yang dilakukan pengrajin. Maka dari itu setelah bergabungnya masyarakat dengan UMKM Banjarandap mampu mensejahterakan masyarakat dan lebih meningkatkan pendapatan, seperti yang dirasakan oleh Wartiah selaku pelaku UMKM Banjarandap sekaligus mantan pengrajin gedeg:

“Ya enakan jadi pedagang tiap hari pegang uang kalo bikin anyaman gini kan banyak dulu (anyamannya) tapi kalo jadi pedagang kan tiap hari pegang uang.”<sup>93</sup>

Hal tersebut juga dirasakan oleh Isti selaku pelaku UMKM Banjarandap sekaligus mantan karyawan PT:

“kalo saya kan sebelum disini (UMKM Banjarandap) di PT, tapi kalo di PT sama pedagang ya enakan pedagang, soalnya kan kalo PT masih ikut sama orang lain, kalo pedagang kan punya sendiri. Jadi ya saya kalo pedagang sama PT milih pedagang karena punya sendiri, ngga bergantung sama orang lain. Kalo PT kan masih punya orang lain, tidak ada tuntutan dan jam kerja yang baku.”<sup>94</sup>

Dengan begitu, bergabungnya masyarakat dengan UMKM Banjarandap sudah mampu memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Lebih dari pada itu, pelaku UMKM juga merasakan kebebasan dalam bekerja sehingga tidak merasakan tekanan akibat terikatnya sistem kerja pada suatu perusahaan.

Dalam menjalankan bisnis usaha, tentu saja akan mengalami berbagai macam kendala. Hal ini juga dirasakan oleh pelaku UMKM

---

<sup>93</sup> Data hasil wawancara dengan Wartiah, Pelaku UMKM Banjarandap Desa Banjaran, diambil pada hari Kamis, 7 Maret 2024.

<sup>94</sup> Data hasil wawancara dengan Isti, Pelaku UMKM Banjarandap Desa Banjaran, diambil pada hari Kamis, 7 Maret 2024.

Banjarandap yang mengalami kendala akibat relokasi. Relokasi ini menjadi faktor pemicu munculnya permasalahan-permasalahan baru yang menimpa pelaku UMKM. Dengan adanya relokasi ini pelaku usaha mengeluhkan lokasi berdirinya warung/stand sangat jauh dari tempat pengunjung duduk sehingga jarang ada pengunjung yang datang ke warung. Akibat hal ini, pelaku UMKM mendatangi pengunjung untuk menawarkan dagangannya. Tidak jarang malah hal ini menjadi keluhan bagi para pengunjung karena pengunjung merasa kurang nyaman akan hal tersebut. Sebagaimana yang dituturkan oleh Khotimah:

“Dulunya waktu disana itukan (sebelum relokasi) ngga kaya disini, pedagang kan duduk nyantai diwarung, pengunjung lewat, jadi jauh dari tempat pengunjung duduk, tapi kalau ngga kesana (menghampiri pengunjung) ya ngga dapat uang.”<sup>95</sup>

Selain permasalahan yang timbul akibat relokasi, pelaku UMKM juga mengeluhkan jika Obyek Wisata Banjarandap ini mengalami sepi pengunjung. Dengan sedikitnya pengunjung yang datang maka penghasilan pelaku UMKM juga mengalami penurunan. Selain itu karena Obyek Wisata Banjarandap masih dalam tahap berkembang dan pembangunan sehingga fasilitas-fasilitas yang ada didalamnya pun masih terbilang minim. Dengan berlandaskan pada hal tersebut, kendala akibat cuaca pun menjadi faktor pemicunya yaitu curah hujan yang tinggi mengakibatkan genangan air dan lumpur di kawasan Obyek Wisata Banjarandap sehingga para pengunjung dan pedagang merasa kurang nyaman akan hal tersebut, terutama di bagian area parkir dan pintu masuk.

---

<sup>95</sup> Data hasil wawancara dengan Khotimah, Pelaku UMKM Banjarandap Desa Banjaran, diambil pada hari Kamis, 7 Maret 2024

## 8. Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjaran Oleh Pokdarwis Banjarandap

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan serangkaian upaya untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Dalam model pemberdayaan masyarakat harus bisa memecahkan masalah yang dihadapi dengan membangun kapasitas dan kapabilitas guna memutus mata rantai kemiskinan serta mampu bergerak maju menuju masyarakat yang mandiri dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Maka dari itu, kemampuan masyarakat sangat diperlukan dalam membaca peluang sehingga mampu memanfaatkan seluruh potensi yang ada di sekitar mereka secara maksimal, terutama dalam mengelola sumber daya alam dan manusianya.

Pemberdayaan bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat seperti pengangguran, kemiskinan, permodalan, aksesibilitas, informasi teknis, infrastruktur, serta kesenjangan pengetahuan dan keterampilan. Jika dilakukan dengan benar, pemberdayaan dapat memberikan dampak yang luar biasa, tidak hanya dalam hal peningkatan akses, tetapi juga membuat masyarakat lebih berdaya dan lebih kuat.<sup>96</sup>

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pokdarwis Banjarandap dilakukan melalui program-program pariwisata yang dirancang untuk pengembangan desa wisata. Program-program pemberdayaan ini disusun dalam paket wisata Desa Banjaran yang meliputi; Obyek Wisata Banjarandap, tempat pengelolaan sampah untuk pengembangbiakan magot, sentra pengrajin bambu, *home industri* teh tarik, dan agrowisata di Kelompok Wanita Tani (KWT) Arum Tani Desa Banjaran.

Berdirinya Obyek Wisata Banjarandap di Desa Banjaran membuka peluang bagi masyarakat lokal guna meningkatkan

---

<sup>96</sup> Ulfiyatun Nadzifah, "Welfare Pluralism sebagai Metode Pemberdayaan di Dusun Gamol," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan* 4, no. 1 (June 24, 2020): 111–34, <https://doi.org/10.14421/jpm.2020.041-06>.



kesejahteraannya. Dengan dibukanya obyek wisata ini maka akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat dalam pengelolaan wisata dan juga terbukanya peluang usaha di kawasan obyek wisata. Dengan hadirnya UMKM di Obyek Wisata Banjarandap akan meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Seperti yang dituturkan oleh Budi Wahyono selaku Kaur Kesejahteraan Umum Desa Banjaran, yaitu sebagai berikut:

“kalau menurut penilaian saya sendiri UMKM sangat mendukung juga berkembangnya wisata, karena apa?, karena adanya UMKM otomatis pengunjung-pengunjung berdatangan kesitu baik mereka mau beristirahat atau menikmati suasana itu juga UMKM berperan menyediakan makanan, karena kan di sana (Obyek Wisata Banjarandap) mayoritas UMKMnya penyedia mkanan, ada sih beberapa yang berupa kerajinan tetatpi belum maksimal.”<sup>97</sup>

Dengan demikian, maka akan memunculkan simbiosis mutualisme antara UMKM dan juga Obyek Wisata Banjarandap. Selain membuka peluang usaha, UMKM juga memiliki peranannya dalam pengembangan Obyek Wisata Banjarandap. Selanjutnya, Budi Wahyono juga melanjutkan setelah masyarakat bergabung dengan UMKM Banjarandap juga mampu membawa perubahan yang positif.

“Ya ada, dulu kan kita mayoritas itu UMKMnya hanya satu, yaitu kerajinan bambu yang setelah adanya wisata kemudian beralih dari yang tadinya kerajinan akhirnya sekarang membuat makanan. Memang yang sekarang menjadi kendalanya yaitu pengunjung berkurang, tetapi ya untuk setiap harinya mereka mendapatkan hasil walaupun mungkin tidak seberapa.”<sup>98</sup>

Hal ini juga selaras dengan yang dirasakan oleh Wartiah selaku pelaku UMKM di Obyek Wisata Banjarandap, yaitu:

“Ya enakan jadi pedagang mba, karena kalo bikin anyaman kan harus kekumpul dulu, belum nutup buat biaya produksi

---

<sup>97</sup> Hasil Wawancara Dengan Buni Wahyono, Peran UMKM Bagi Masyarakat Khususnya di Obyek Wisata Banjarandap, 4 Maret 2024.

<sup>98</sup> Hasil Wawancara Dengan Budi Wahyono, Perbedaan Masyarakat Setelah Bergabung Dengan UMKM Banjarandap, 4 Maret 2024.

soalnya bambunya kan beli, tapi kalo jadi pedagang gini kan enak tiap hari bisa pegang uang, tinggal nunggu pembeli. Kita juga bebas mau buka warung atau engga.”<sup>99</sup>

Dari data hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan dibukanya Obyek Wisata Banjarandap mampu membawa perubahan yang bersifat positif pada masyarakat. Dengan adanya peluang usaha ini memberikan dampak berupa peningkatan ekonomi masyarakat melalui UMKM.

Selain itu, program-program yang digagas oleh Pokdarwis Banjarandap yaitu dengan mengadakan program paket wisata dengan menjadikan pengrajin bambu sebagai kunjungan wisata. Desa Banjaran merupakan penghasil kerajinan anyaman bambu berupa gedeg yang sudah terkenal. Namun, dengan dibukanya Obyek Wisata tidak menggerus kearifan lokal yang ada, melainkan Pokdarwis mampu memanfaatkan potensi tersebut untuk mengajak masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Hal ini tentu saja akan memberikan keuntungan bagi pengrajin karena dapat digunakan sebagai sarana promosi sehingga penjualannya pun akan meningkat.

Pokdarwis Banjarandap selalu mengajak masyarakat dalam setiap program-program atau agenda pengembangan wisata. Hal ini bertujuan agar masyarakat turut andil dalam proses pembangunan wisata sehingga nantinya program-program yang dicanangkan pun mampu berimbas baik pada masyarakat itu sendiri. Seiring dengan turunnya SK Bupati yang menjadikan Desa Banjaran menjadi Desa Wisata, Pokdarwis Banjarandap juga mengusung program berupa agrowisata dan mengajak Kelompok Wanita Tani (KWT) Arum Tani Desa Banjaran dalam programnya. Selain itu, hasil dari pertanian didistribusikan ke pelaku UMKM Banjarandap.

---

<sup>99</sup> Hasil Wawancara dengan Wartiah, keunggulan Setelah Bergabung Dengan UMKM Banjarandap, 7 Maret 2024.

Selain pengembangan di sektor ekonomi, Pokdarwis Banjarandap juga memiliki program pelestarian lingkungan dan budaya. Dalam program pelestarian lingkungan, Pokdarwis Banjarandap mengelola limbah dengan memanfaatkannya sebagai ternak magot (pakan burung). Hal ini tentu saja merupakan program yang sangat solutif dalam memanfaatkan limbah yang dihasilkan dan tidak dibuang begitu saja. Selain itu, program pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh Pokdarwis Banjarandap yaitu dengan mengadakan kegiatan bersih sungai setiap setahun sekali dan menyebarkan bibit ikan di Sungai Klawing dimana sungai tersebut berada di kawasan Obyek Wisata Banjarandap. Program pelestarian lingkungan ini tentu saja memberikan manfaat berupa kelestarian sungai dengan menambah daya tarik bagi pengunjung karena obyek wisata ini memiliki lingkungan yang bersih dan terjaga. Selanjutnya dalam pelestarian budaya, Pokdarwis Banjarandap juga bekerja sama dengan Komunitas Seni Ebeg yang mana Seni Ebeg merupakan seni tradisional khas daerah Banyumasan dengan mengadakan pagelaran seni setiap minggu ketiga setiap bulannya yang diadakan di Obyek Wisata Banjarandap. Hal ini tentu saja menjadi media promosi bagi kedua belah pihak dan memberikan keuntungan baik untuk Komunitas Seni Ebeg maupun untuk Obyek Wisata Banjarandap karena dengan adanya pagelaran ini di Obyek Wisata Banjarandap akan menjadi media promosi bagi Komunitas Seni Ebeg, sedangkan Untuk obyek wisata dapat menjadi media hiburan bagi pengunjung.

Pokdarwis Banjarandap sudah mampu merangkul sebagian besar masyarakatnya agar turut andil dalam setiap program pemberdayaan baik itu dari perencanaan hingga pelaksanaan. yang *discover* dalam program pengembangan pariwisata. Hadirnya Pokdarwis Banjarandap telah membawa perubahan yang bersifat positif bagi masyarakat Desa Banjarandap. Dalam setiap usaha pemberdayaan yang dilakukan dengan sepenuh hati oleh Pokdarwis

Banjarandap sudah mampu membawa masyarakat Desa Banjaran ke arah pemberdayaan. hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Lintang Salimin selaku Tokoh Masyarakat Desa Banjaran, yaitu sebagai berikut:

“Menurut pengamatan saya, dengan adanya pkdarwis dan wisata itu yang pokdarwis di bawah naungan BUMDes, *Alhamdulillah* ya sedikit membantu tentang kegiatan masyarakat terutama di bidang UMKM. Banyak pedagang-pedagang yang warung-warung itu yang mba lihat itu kebanyakan orang Banjaran, ada juga orang luar. Berarti secara tidak langsung meningkatkan kegiatan di bidang ekonomi. Dengan begitu, meningkatkan pendapatan dari yang sebelumnya belum ada pendapatan, ikut disini (Obyek Wisata Banjarandap) membuat warung jadi ada pendapatan dan meningkatkan perekonomian.”<sup>100</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Budi Wahyono selaku Kaur Kesejahteraan Umum Desa Banjaran yang menuturkan sebagai berikut:

“selama ini mungkin sebagian kecil sudah masuk (memberdayakan), bisa dikatakan mampu tetapi belum maksimal.”<sup>101</sup>

Berdasarkan data dari hasil observasi dan wawancara, Pokdarwis Banjarandap sudah mampu memberikan dampak pemberdayaan bagi masyarakat lokal dengan mengikut sertakan masyarakat di setiap program dan kegiatan pengembangan pariwisata. Walaupun belum secara maksimal dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi dengan hadirnya Pokdarwis Banjarandap sudah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Selain dalam bidang ekonomi, pokdarwis juga mampu membawa Desa Banjaran dalam melestarikan lingkungan dan budaya. Dengan mengajak partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan juga secara tidak langsung

---

<sup>100</sup> Hasil Wawancara Dengan Lintang Salimin, Tokoh Masyarakat Desa Banjaran, 11 Maret 2024.

<sup>101</sup> Hasil Wawancara dengan Budi Wahyono, selaku Kaur Kesejahteraan Umum Desa Banjaran, 4 Maret 2024.



masyarakat mampu menguatkan peranan sosial di lingkungan masyarakat. Karena pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat bukan hanya tentang nilai ekonomi saja, melainkan nilai sosial juga merupakan salah satu aspek pemberdayaan.

### **B. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga**

Strategi merupakan seni perencanaan dengan merencanakan strategi berskala besar dan berorientasi jangka panjang dengan menggerakkan kekuatan pada posisi yang menguntungkan dan mengaturnya pada posisi sedemikian rupa sehingga memberi peluang organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam situasi persaingan yang mengarah pada optimalisasi tujuan dan sasaran organisasi.<sup>102</sup> Strategi merupakan hal yang sangat penting dalam proses pencapaian tujuan, karena dengan adanya strategi maka setiap prosesnya akan terarah dan tertata dengan baik. maka dari itu, strategi dalam pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat desa memerlukan serangkaian aktivitas yang mampu menunjang pemberdayaan. Dengan demikian, Pokdarwis Banjarandap selaku roda penggerak pemberdayaan yang bertanggung jawab atas seluruh proses pemberdayaan masyarakat di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari, khususnya di Obyek Wisata Banjarandap melakukan serangkaian aktivitas yang mampu menjadi anak tangga dalam mencapai suksesnya pemberdayaan.

Upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pokdarwis Banjarandap yaitu berupa motivasi, peningkatan kesadaran, manajemen diri, pengelolaan sumber daya serta pembangunan dan pengembangan jaringan. Berikut merupakan strategi pemberdayaan, yaitu:<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Cipi Pahlevi dan Muhammad Ichwan Musa, *Manajemen Strategi* (Makassar: Penerbit Intelektual Karya Nusantara, 2023), hal. 2.

<sup>103</sup> Ismail Suardi Wekke, *Metode Pengabdian Masyarakat: Dari Rancangan Ke Publikasi* (Indramayu: Penerbit Adab CV. Adanu Abimata, 2020), hal. 74-76.



## 1. Motivasi

Setiap warga masyarakat memerlukan dorongan untuk membentuk kelompok guna mengorganisir dan menjalankan aktivitas pemberdayaan. Maka dari itu, masyarakat membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis) guna mengatur jalannya proses pemberdayaan di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari yang kemudian kelompok tersebut dinamakan Pokdarwis Banjarandap. Motivasi merupakan hal dasar namun sangat penting peranannya dalam suatu aktivitas atau kegiatan. Hal ini disebabkan karena dengan adanya motivasi maka mampu memberikan dorongan dan rasa semangat juang bagi seseorang dalam menjalankan kegiatannya.

Dalam proses pemberdayaan, peranan Pokdarwis Banjarandap sangat penting dalam memberikan motivasi terhadap masyarakat yang akan di berdayakan khususnya masyarakat Desa Banjaran. Pokdarwis Banjarandap merupakan roda penggerak aktivitas pemberdayaan di Desa Banjaran, maka dari itu mereka harus mampu membangun motivasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya program-program pemberdayaan yang di canangkan oleh pengelola. Hal ini selaras dengan Trio Irama yang menyatakan bahwa:

“motivasi ini diberikan kepada pengelola wisata maupun pada pelaku UMKM. Kalau motivasi pada pengelola ini biasanya dilakukan saat evaluasi.”<sup>104</sup>

Pemberian motivasi oleh Pokdarwis Banjarandap dilakukan dengan mengajak dan mengikutsertakan masyarakat dalam setiap proses pemberdayaan. Secara tidak langsung dengan merangkul masyarakat dalam aktivitas pemberdayaan maka akan memunculkan rasa semangat juang, kesadaran dan tanggung jawab masyarakatnya terhadap pentingnya pemberdayaan bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Dengan munculnya perasaan-perasaan tersebut maka akan memberikan rasa kesadaran dan mendorong setiap individu untuk

---

<sup>104</sup> Hasil Wawancara Dengan Trio Irama, Selaku Ketua Pokdarwis Banjarandap, 24 Maret 2024

berpikir kreatif dan inovatif dalam memunculkan ide-ide dan aktif dalam setiap proses pemberdayaan.

## 2. Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan

Rendahnya sumber daya manusia merupakan hal yang selalu menjadi permasalahan utama di setiap aspek kehidupan tidak terkecuali dengan aspek pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mengangkat posisi masyarakat dari yang kurang berdaya menjadi berdaya, dari yang keterbelakangan menjadi lebih maju dan sejahtera. Namun sejatinya pemberdayaan masyarakat yang berhasil yaitu dengan membangun kesadaran masyarakat itu sendiri agar mereka mau dan mampu bangkit dari ketidak berdayaannya. Pemberdayaan harus dilakukan dari dalam agar nantinya mampu bertahan dan berjalan secara berkesinambungan.

Membangun dan meningkatkan sumber daya manusia harus memupuk kesadaran masyarakat akan pentingnya belajar dan berlatih agar kemampuan mereka mampu berkembang dan meningkat. Belajar disini bukan hanya sebatas akademik, melainkan pengalaman-pengalaman lapangan yang nantinya akan membangun kemampuan setiap individu. Maka dari itu, dalam pemberdayaan keterlibatan masyarakat merupakan hal yang sangat penting agar mereka bisa belajar dan meningkatkan kemampuan baik itu *soft skill* maupun *hard skill*.

Pemberdayaan masyarakat tidak bisa hanya dibebankan kepada satu individu saja, melainkan pemberdayaan merupakan satu kesatuan masyarakat dengan saling bersinergi dan menyatukan visi dan misi agar mampu mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Maka dari itu, partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat menentukan keberhasilan setiap program pemberdayaan.

Peningkatan kesadaran mengenai pentingnya setiap program pemberdayaan serta bagaimana peranan dan tanggung jawab

masyarakat dilakukan oleh Pokdarwis Banjarandap dengan merangkul seluruh elemen masyarakat dari tahap awal pembentukan hingga saat ini. Melibatkan masyarakat pada setiap program dan aktivitas pemberdayaan ini secara tidak langsung akan membangun kesadaran dan nalar masyarakat, karena mereka akan secara nyata melihat dan merasakan perkembangan demi perkembangan pada lingkungannya. Selain itu, sejak ditetapkannya Desa Banjaran menjadi desa wisata maka akan menuntut seluruh masyarakat desa untuk terus berkreasi dan berinovasi serta mampu mengembangkan diri agar gelar desa wisata ini terus berkembang dan maju. Seperti yang dipaparkan oleh Tulus selaku anggota Pokdarwis Banjarandap, sebagai berikut:

“kita ini kan sudah bergelar desa wisata, jadi diharapkan nantinya masyarakat itu akan bersama-sama membangun desa wisata yang berlandaskan pada Sapta Pesona. Nah, dengan begitu kan akan membangun kesadaran dan rasa tanggungjawab pada masyarakat. Jadi nanti pengujung punya kesan pas datang kesini.”<sup>105</sup>

Program-program yang dicanangkan oleh Pokdarwis Banjarandap ini yaitu berupa pengadaan paket wisata bagi wisatawan yang meliputi Obyek Wisata Banjarandap, tempat pengelolaan sampah untuk pengembangbiakan magot, sentra kerajinan bambu dan *home industri* teh tarik. Maka dengan adanya program-program tersebut, maka akan meningkatkan kemampuan masyarakat berupa kemampuan bahasa, karena mampu menjelaskan kepada wisatawan mengenai bagaimana sistem atau cara kerja setiap sektor kegiatan yang termuat di dalam paket wisata.

### 3. Manajemen diri

Kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap individu yaitu mampu memajemen diri sendiri dengan memiliki kemampuan berupa mengatur aktivitas mereka sendiri. Kegiatan ini bisa berupa mengadakan pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan,

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Tulus, selaku anggota Pokdarwis Banjarandap, 24 Maret 2024

pengoperasian tabungan dan kredit, *problem solving* hingga manajemen kepemilikan.

Dengan memiliki kemampuan manajemen diri yang baik maka akan memunculkan sifat kemandirian pada masyarakat. Sejauh ini, Pokdarwis Banjarandap sudah mampu dan memiliki kemampuan manajemen diri yang baik. hal ini dibuktikan dengan mengadakan pertemuan rutin setiap tanggal 4 (empat) di setiap bulannya guna membahas dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan selama satu bulan terakhir. Dalam pertemuan ini juga mereka mampu menganalisis permasalahan-permasalahan yang menjadi hambatan bagi setiap aktivitas atau program pemberdayaan yang mereka jalankan. Setelah itu, mereka mampu memecahkan permasalahan mereka dengan berdiskusi dan saling bertukar pikiran untuk bisa keluar dari permasalahan tersebut.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pokdarwis Banjarandap yaitu berupa masih minimnya fasilitas yang ada di dalam Obyek Wisata Banjarandap sehingga pokdarwis melakukan kerjasama dengan investor guna menambah fasilitas wisata guna kenyamanan pengunjung. Selain itu, permasalahan yang di gahadapi oleh para pelau UMKM yang mana terdapat keluhan dari pengunjung dengan megeluhkan bahwa harga makanan di Obyek Wisata Banjarandap tergolong mahal. Hal ini juga disaksikan oleh pelaku UMKM yaitu Khotimah yang menyatakan sebagai berikut:

“Ya ngga tau orang saya njual segitu (sesuai harga yang disepakati) tau-tau ada kabar dari hp, saya ya ngga tau karena saya merasa jualannya sama kaya yang lain, kalo harganya segini ya segini.”<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Hasil Wawancara dengan Khotimah, selaku pelaku UMKM di Obyek Wisata Banjarandap, 7 Maret 2024.

Kesaksian lain juga dituturkan oleh Isti selaku pelaku UMKM di Obyek Wisata Banjarandap, menyatakan sebagai berikut:

“itu kan yang ada pengunjung komplain itu isinya 5 (lima) atau 4 (empat) (mendoan) gitu kalo saya kan 6 (enam) jadi kan kena semua, Banjarandap mahal-mahal jualannya kesannya. Padahal kan engga, satu orang contohnya kita kan jadi dibawa semua.”<sup>107</sup>

Dengan timbulnya permasalahan tersebut, Pokdarwis Banjarandap mengambil tindakan dengan membuat *price list* mengenai menu makanan yang ada di warung-warung, kemudian memberikannya kepada pengunjung sehingga pengunjung juga bisa meninjau harga sesuai dengan yang ada dan tidak ada oknum yang memanipulasi harga makanan.

Selain permasalahan-permasalahan tersebut, Pokdarwis Banjarandap juga mampu menangani permasalahan administratif terkait kelompok maupun program-program pengembangan wisata dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan, Pemerintah Desa, investor, maupun lembaga-lembaga terkait.

Hal-hal tersebut membuktikan bahwa Pokdarwis Banjarandap memiliki kemampuan manajemen diri yang baik, yaitu dengan secara inisiatif mengadakan pertemuan rutin guna mengevaluasi kinerja kelompok kepengurusan dan program-program yang dijalankan mulai dari melihat keberhasilan program, kendala dan hambatan hingga pemecahan masalah. Selain itu kemampuan Pokdarwis Banjarandap dalam melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pihak yang terkait, pengoperasian tabungan dan kredit hingga manajemen kepemilikan.

---

<sup>107</sup> Hasil Wawancara dengan Isti, selaku pelaku UMKM di Obyek Wisata Banjarandap, 7 Maret 2024.



#### 4. Pengelolaan Sumber Daya

Sumber daya merupakan aset yang paling penting dalam proses pemberdayaan. Pengelolaan sumber daya yang baik akan mampu memaksimalkan seluruh potensi yang ada dan dapat meminimalisir kesenjangan di tingkat masyarakat lokal. Sumber daya ini bisa berupa sumber daya alam maupun manusia.

Potensi sumber daya harus dikelola dengan baik dan benar sehingga nantinya masyarakat akan merasakan manfaatnya. Kecerdasan dalam pengelolaan sumber daya ini tentunya harus dimiliki oleh kelompok masyarakat khususnya bagi pengelola yang bertanggung jawab atas keberlangsungan program pemberdayaan.

Kemampuan melihat dan menganalisis potensi yang ada disekitar kemudian menjadikannya sebagai program pemberdayaan dan pengembangan telah dilakukan oleh Pokdarwis Banjarandap. Pada saat pendirian Obyek Wisata Banjarandap, pendiri sekaligus ketua Pokdarwis Banjarandap yaitu Trio Irama dan Muhamad Ichmun selaku Kepala Desa Banjarandap menemukan bahwa di desanya terdapat bendungan yang menghubungkan antara Desa Banjaran dan Desa Slinga Kecamatan Kaligondang ini bisa dijadikan sebagai peluang tempat wisata. Tercetusnya ide tersebut, kemudian menjadikan Obyek Wisata Banjarandap sebagai pelopor yang mengantarkan Desa Banjaran sebagai Desa Wisata. Program-program lainnya yang dicanangkan oleh Pokdarwis Banjarandap yaitu adanya paket wisata yang didalamnya terdapat sentra perajin bambu. Hal ini didasarkan karena masyarakat Desa Banjaran merupakan pengrajin anyaman bambu dan petani. Dengan demikian wisatawan dapat melihat dan belajar cara memanfaatkan bambu sebagai produk kerajinan. Hal ini tentunya berdampak positif karena selain memberdayakan masyarakat dengan melibatkan masyarakat untuk ikut andil dalam program juga akan menambah pengetahuan dan pembelajaran bagi wisatawan. Selain itu, terdapat juga kawasan pertanian pepaya dan alpukat yang nantinya

bisa dijadikan sebagai tempat kunjungan wisata dan juga *home industri* berupa produk pembuatan teh tarik. Program lainnya yaitu edukasi pengelolaan limbah yang dijadikan sebagai ternak magot (pakan burung). Dengan begitu maka limbah tidak hanya dibuang dan menjadi sampah yang menggunung, tetapi bisa dimanfaatkan dan diolah dengan baik dan benar.

Kecerdasan dalam pemanfaatan sumber daya yang baik dan benar ini tentunya sangat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar karena mereka bisa merasakan sendiri dampak dari setiap program pemberdayaan yang dicanangkan oleh pokdarwis. Dengan memperkenalkan produk-produk yang mereka miliki kepada wisatawan tentu saja akan menambah penghasilan mereka dan menjadi media promosi yang baik. Selain itu, seringnya interaksi antara wisatawan dan masyarakat maka akan meningkatkan keterampilan sosial mereka.

#### 5. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan

Membangun dan mengembangkan koneksi merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh kelompok swadaya dalam pengorganisasiannya dengan memanfaatkan sistem sosial. Jaringan ini diperlukan guna penyediaan dan pengembangan akses terhadap sumber dan peluang untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pembangunan dan pengembangan jaringan, Pokdarwis Banjarandap bekerjasama dengan berbagai lembaga dan membangun koneksi dengan investor. Dalam memajukan dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat tentunya tidak bisa dilakukan oleh individu, melainkan dibutuhkan pihak-pihak dari luar terutama dalam pendanaan sehingga Pokdarwis Banjarandap berusaha untuk membuat berbagai program yang dapat menarik investor. Dana yang didapatkan nantinya digunakan untuk pengembangan dan penambahan fasilitas wisata sehingga nantinya wisatawan akan lebih merasakan kenyamanan ketika berkunjung di Obyek Wisata Banjarandap.

Selain strategi pemberdayaan diatas, strategi pemberdayaan yang digagas oleh Ismawan dan Lin Sarinah juga selaras dengan hal tersebut. Strategi yang digagas oleh mereka yaitu berupa: a) pengembangan sumber daya manusia, b) pengembangan kelembagaan kelompok yang mana Pokdarwis Banjarandap sebagai roda penggerak pemberdayaan di Desa Banjaran ini telah mendapatkan legitimasi dan diakui oleh seluruh masyarakat desa dan juga para fasilitator. c) pemupukan modal masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan modal awal kepada masyarakat guna menciptakan usaha yang dapat membantu meningkatkan perekonomian atau bisa juga berupa sarana dan prasarana. Hal ini didapatkan oleh Pokdarwis Banjarandap dari Dana Desa sebagai modal awal pendirian Obyek Wisata Banjarandap dan juga penambahan sarana dan prasarana dari para investor. D) Selain itu, pengembangan usaha produktif juga dilakukan oleh Pokdarwis Banjarandap dengan mengadakan program sentra pengrajin bambu, pertanian, *home industri* pembuatan teh tari dan juga wisata edukai pengolahan sampah. Hal ini merupakan usaha yang mampu menambah pendapatan bagi masyarakat dan dapat pula dijadikan sebagai sarana promosi. e) dan yang terakhir yaitu pemberian informasi yang memadai, dalam hal ini Pokdarwis Banjarandap sudah mampu mengarahkan dan memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Selain itu, Pokdarwis Banjarandap juga memberikan tuntunan bagi masyarakat mengenai apa saja yang perlu dilakukan dan yang tidak seharusnya dilakukan ketika menjadi tuan rumah bagi para wisatawan.

Stretegi-stretegi pemberdayaan diatas merupakan usaha yang dilakukan guna mencapai tujuan akhir yang diharapkan. Dengan mencurahkan seluruh kekuatan guna menggali potensi dan meningkatkan kemampuan masyarakat agar pemberdayaan masyarakat dapat tercapai dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh elemen masyarakat telah berhasil membangun kerjasama yang

baik dengan saling bersinergi menyukseskan program-program pemberdayaan yang telah direncanakan.

### **C. Proses Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga**

Pencapaian pemberdayaan masyarakat yang sukses dan berhasil tentu saja melewati berbagai mekanisme yang harus dijalankan. Pemberdayaan masyarakat haruslah dilakukan melalui tahapan demi tahapan yang tersusun dan tertata dengan rapi dan biasanya proses ini berlangsung dalam waktu yang lama dan berjalan secara berkesinambungan.

Pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan dan tahapan-tahapan ini akan menjadi panduan bagi pelaku pemberdaya. Tahapan ini yaitu meliputi fase persiapan, fase penilaian “*assesment*”, fase perencanaan alternatif program, fase merumuskan rencana aksi, fase menjalankan program, fase evaluasi dan yang terakhir terminasi.<sup>108</sup> Tahapan-tahapan pemberdayaan ini juga dilakukan oleh masyarakat Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga dalam membangun program pemberdayaan masyarakat, diantaranya yaitu:

#### **1. Fase persiapan**

Pada fase awal terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu dengan menyediakan fasilitator untuk para pekerja pemberdayaan dan yang kedua yaitu tahap persiapan lapangan dengan melakukan perencanaan strategi penjangkauan di lapangan.

Dalam proses *pertama* pencetus gagasan untuk mendirikan Obyek Wisata Banjarandap yaitu Trio selaku ketua Pokdarwis Banjarandap dan M. Ichmun selaku Kepala Desa Banjaran membangun kerjasama dengan mengajak seluruh masyarakat desa bersama 25 (dua puluh lima) RT untuk menyamakan visi dan misi dalam membangun program tersebut. Selanjutnya yaitu dengan

---

<sup>108</sup> Dedeh Maryani, Ruth Roselin E N, *Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), Hal. 13-14.

menyiapkan petugas atau tenaga pemberdaya yang mana kemudian dibentuklah Pokdarwis Banjarandap. Dengan adanya rencana program tersebut, pemerintah desa bersedia menjadi fasilitator di bidang administratif guna melancarkan program-program yang dicanangkan oleh Pokdarwis Banjarandap. *Kedua*, dilakukan dengan melaksanakan studi kelayakan terkait lapangan yang nantinya dijadikan sebagai tempat pelaksana program pemberdayaan.

Pekerja sosial yang ditetapkan untuk program pemberdayaan masyarakat di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari dilakukan melalui musyawarah bersama dengan dihadiri oleh Kepala Desa Banjaran, Perangkat Desa, BPD, KPMD, Ketua RT, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Kepengurusan dan anggota pokdarwis dibuka untuk siapa saja yang memiliki kemauan bekerja sebagai pekerja sosial yang memiliki kesadaran mengenai pentingnya pemberdayaan bagi masyarakat dan juga kesadaran akan pentingnya pariwisata.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, Obyek Wisata Banjarandap sudah melakukan tahap persiapan pada program pemberdayaan masyarakat dalam tahap awal membangun Obyek Wisata Banjarandap. Pelibatan masyarakat dalam tahap awal ini merupakan kunci utama dalam keberhasilan program, karena pada dasarnya tujuan pemberdayaan dilakukan untuk masyarakat itu sendiri sehingga persetujuan mereka merupakan peran utamanya.

## 2. Fase Penilaian “*Assesment*”

Proses assesment dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Banjaran dilakukan secara mandiri dengan mengajak kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat. *Assesment* dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis potensi yang terdapat di masyarakat sehingga nantinya kelompok pemberdaya mampu memanfaatkan seluruh potensi yang ada secara maksimal. Budi Wahyono selaku seksi pelayanan menyatakan bahwa:



“kita mengajak seluruh masyarakat di Desa Banjaran, mulai dari Ketua RT dan RW, kemudian berdiskusi dan melakukan analisis apa potensi yang ada di Banjaran yang bisa dijadikan sebagai peluang.”<sup>109</sup>

Potensi yang dimiliki Desa Banjaran yaitu Bendungan Selis yang dikelola dan dimanfaatkan sebagai destinasi wisata. Selain itu, masyarakat Desa Banjaran juga terkenal akan kerajinan anyaman bambu berupa gedeg, wilayah pertanian dan juga terdapat *home industri* berupa teh tarik. Dengan berdirinya Obyek Wisata Banjarandap ini mampu memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan perekonomian masyarakatnya melalui UMKM yang terdapat di dalam obyek wisata maupun di luar kawasan Obyek Wisata Banjarandap dan seiring dengan berjalannya waktu Desa Banjaran yang telah ditetapkan menjadi Desa Wisata pada tanggal 19 Agustus tahun 2023 maka akan lebih banyak menarik wisatawan. Hal ini tentunya akan meningkatkan dan mengembangkan UMKM yang terdapat di Desa Banjaran sehingga akan meningkatkan nilai ekonomi masyarakat desa.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa potensi yang dimiliki oleh Desa Banjaran yaitu Bendungan Selis, sentra pengrajin bambu, UMKM, pertanian, pengelolaan sampah sebagai tempat pengembangbiakan magot dan juga *home industri* teh tarik.

### 3. Fase Perencanaan Alternatif Program Atau Kegiatan

Tahap perencanaan alternatif program ini dilakukan oleh Pokdarwis Banjarandap dalam setiap kegiatan pemberdayaan dengan mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap program pemberdayaan yang telah direncanakan. Pada tahap ini Pokdarwis Banjarandap melibatkan masyarakat untuk andil dalam pengambilan keputusan terkait dengan rencana program hingga

---

<sup>109</sup> Hasil Wawancara Dengan Budi Wahyono, Pendekatan Pokdarwis Terhadap Masyarakat, 4 Maret 2024.

pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Permasalahan yang terdapat di Desa Banjaran sebelum adanya Obyek Wisata Banjarandap yaitu pengangguran dan minimnya keterampilan masyarakat dalam mengelola aset yang dimiliki.

Setelah adanya Obyek Wisata Banjarandap, masyarakat berperan aktif dalam setiap proses pemberdayaan baik itu mulai dari tahap awal pembangunan hingga saat ini. masyarakat yang berperan aktif mampu melatih dan meningkatkan keahliannya dalam beberapa bidang termasuk berfikir kreatif dan inovatif agar Desa Wisata Banjaran mampu berkembang hingga kemampuan dalam pemecahan masalah.

Selain menjalin kerjasama dengan masyarakat lokal, Pokdarwis Banjarandap juga mampu membangun relasi dengan investor dan lembaga-lembaga terkait guna mengembangkan Desa Wisata Banjaran. Program-program pemberdayaan yang dijalankan oleh Pokdarwis Banjarandap diawasi oleh BUMDes Bina Sejahtera Desa Banjaran.

#### 4. Fase Merumuskan Rencana Aksi

Tahap perumusan rencana aksi dilakukan oleh kelompok yang bertanggung jawab atas setiap program yang berjalan, yaitu Pokdarwis Banjarandap yang bekerja sama dengan BUMDes, Pemerintah Desa, lembaga terkait dan juga masyarakat. Kerja sama ini dilakukan dengan tujuan agar memudahkan masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi dan mencari solusi yang tepat agar bisa keluar dari permasalahan tersebut.

Dalam melakukan perumusan, Pokdarwis Banjarandap melakukan tahap rencanaaksi melalui pertemuan rutin yang dilakukan setiap tanggal 4 (empat). Setiap pelaksanaan pertemuan rutin ini, setiap anggota akan diberikan kebebasan dan peluang untuk menyampaikan gagasan atau inovasi untuk pengembangan wisata khususnya Obyek

Wisata Banjarandap dan keberlangsungan program pemberdayaan masyarakat.

#### 5. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan program merupakan tindakan eksekusi dari berbagai rencana dan strategi yang telah disusun dalam rencana program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Pelaksanaan program harus direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan agar nantinya program tersebut bisa tertata secara sistematis dan memiliki peluang besar untuk keberhasilan program. Dalam pelaksanaan program kegiatan harus dilakukan secara bertahap. Pokdarwis Banjarandap sudah melaksanakan tahap pelaksanaan dengan baik dengan merealisasikan program-program pemberdayaan.

Dari tahap perencanaan program hingga pada tahap pelaksanaan biasanya memakan waktu selama setengah tahun, tergantung pada kerumitan program tersebut. Program-program yang telah terealisasikan oleh Pokdarwis Banjarandap yaitu pelestarian lingkungan dan budaya, pemberdayaan UMKM, dan paket wisata yang didalamnya termuat sentra pengrajin bambu, *home industri* teh tarik, pengelolaan sampah sebagai tempat pengembangbiakan magot dan Kelompok Wanita Tani (KWT). Hal ini sesuai dengan kesaksian Saliman selaku anggota Pokdarwis Banjarandap yang menjabat sebagai Seksi Kebersihan yang menyatakan sebagai berikut:

“sekitar lima sampai enam (program yang terealisasikan) yaitu nguri-uri budaya, bersih-bersih sungai, penaburan bibit ikan, pemberdayaan UMKM dan paket wisata.”<sup>110</sup>

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan di Obyek Wisata Banjarandap, Pokdarwis Banjarandap sudah mampu merealisasikan beberapa program yang telah direncanakan. Tahap realisasi program ini dilakukan secara bertahap dan sistematis. Pada tahap pelaksanaan program ini tentu saja Pokdarwis Banjarandap

---

<sup>110</sup> Hasil Wawancara dengan Saliman, Anggota Pokdarwis Banjarandap, 24 Maret 2024.

membangun kerja sama dengan Pemerintah Desa dan lembaga-lembaga terkait untuk permodalan dan juga penambahan fasilitas. Selain itu, peran masyarakat juga tidak lepas dari pelaksanaan program karena masyarakat sendiri merupakan tokoh utama dalam pemberdayaan sehingga keterlibatan masyarakat sangat penting.

#### 6. Tahap Evaluasi

Evaluasi program merupakan suatu kajian evaluatif yang dilakukan secara sistematis guna pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan suatu program pemberdayaan dengan menentukan solusi yang tepat untuk menyempurnakan program yang sedang dievaluasi.<sup>111</sup> Pada tahap evaluasi, Pokdarwi Banjarandap melakukan pertemuan rutin setiap tanggal 4 (empat) setiap bulannya dibawah pengawasan BUMDes dan Pemerintah Desa.

Pertemuan rutin ini dilaksanakan di dalam pendopo Obyek Wisata Banjarandap dengan membahas hal-hal rutin mengenai pencapaian hasil dari program-program yang sudah direalisasikan sudah sejauh mana dan apa saja yang perlu diperbaiki agar nantinya program tersebut tetap berjalan secara berkesinambungan dan juga berkembang. Selain itu, evaluasi program juga membahas mengenai kendala-kendala yang dihadapi dan merumuskan pemecahan masalahnya. Seperti pada kasus UMKM Banjarandap yaitu dengan membahas mengenai permasalahan yang sedang dihadapi berupa kritik dari pengunjung Obyek Wisata Banjarandap mengenai sikap pelaku UMKM yang mendatangi pengunjung untuk menawarkan dagangannya, sehingga terdapat beberapa pengunjung yang merasa kurang nyaman akan hal tersebut. Selain itu, terdapat juga pengunjung yang mengeluhkan bahwa harga makanan yang dijual di Obyek Wisata Banjarandap terbilang mahal. Maka dari itu, Pokdarwis Banjarandap

---

<sup>111</sup> Dewa Gede Hendra Divayana, *Evaluasi Program Konsep Dasar dan Pengimplementasiannya* (Depok: Rajawali Printing, 2018), hal. 6-7

melakukan pemecahan masalah dengan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Selain itu, pada tahap evaluasi ini juga meninjau sejauh mana program yang sedang direncanakan ini berjalan dan mengevaluasi hambatan dan peluang program maupun rencana program.

“evaluasi ini diadakan ya untuk meninjau kinerja karyawan dan program-program yang akan direncanakan dan yang sudah berjalan serta membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang menjadi hambatan.”<sup>112</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, didapati informasi bahwa di Obyek Wisata Banjarandap sudah melaksanakan tahap evaluasi melalui pertemuan rutin oleh Pokdarwis Banjarandap di bawah pengawasan BUMDes yang dilakukan secara rutin setiap bulan pada tanggal 4 (empat).

#### 7. Fase Terminasi

Fase terminasi merupakan tahap akhir dalam proses pemberdayaan. Pada tahapan ini terjadi pemutusan hubungan kerja atau kerja sama secara formal antara petugas dengan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian di Obyek Wisata Banjarandap belum melakukan tahap terminasi. Proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Banjaran khususnya di Obyek Wisata Banjarandap masih bersifat berkelanjutan.

Dari paparan di atas menunjukkan bahwa tahapan-tahapan pemberdayaan yang digagas oleh Soekanto dalam buku Dedeh Maryani yang dilakukan oleh Pokdarwis Banjarandap telah berhasil dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan melakukan tahap-tahap pemberdayaan mulai dari tahap persiapan, *assesment*, Fase perencanaan alternatif program atau kegiatan, Fase merumuskan rencana aksi, fase menjalankan program atau kegiatan, hingga fase evaluasi. Namun, pada tahap terakhir pemberdayaan, yaitu tahap

---

<sup>112</sup> Hasil Wawancara dengan Trio Irama, Ketua Pokdarwis Banjarandap, 24 Maret 2024



terminasi belum bisa dilakukan oleh pengelola. Hal ini di karenakan program pemberdayaan masyarakat di Desa Banjaran masih bersifat berkelanjutan.

#### **D. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga**

Pemberdayaan masyarakat di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari dilakukan dengan menggunakan pendekatan *locality development*. Pemberdayaan masyarakat lokal (*locality development*) merupakan teknik pendekatan berbasis masyarakat dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek pemberdayaan, bukan hanya dijadikan sebagai objek penerima bantuan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan aktivitas yang dilakukan guna mengentaskan ketidak berdayaan masyarakat dari keterbelakangan. Maka dari itu, partisipasi masyarakat dalam setiap program pemberdayaan merupakan hal yang sangat penting karena akan melatih kemandirian masyarakat dari berbagai aspek.

Keterlibatan masyarakat Desa Banjaran dimulai sejak awal setelah adanya rencana pembangunan Obyek Wisata Banjarandap. Gagasan ide untuk pendirian obyek wisata di Bendungan Selis ini yang digagas oleh Trio Irama dan M. Ichmun selaku kepala Desa Banjaran kemudian mengadakan pertemuan dengan seluruh ketua RT yang ada di Desa Banjaran untuk menyampaikan rencana pendirian obyek wisata tersebut. Musyawarah ini dilakukan guna mengajak seluruh masyarakat untuk turut andil dalam bertukar pikiran dan menyelaraskan visi dan misi guna pemberdayaan masyarakat. Hal ini dituturkan oleh Trio Irama sebagai berikut:

“Setelah melihat adanya Bendungan Slinga terdapat potensi untuk dijadikan tempat wisata, terus saya sama pak kades melakukan musyawarah dengan para ketua RT yang ada 25 RT yang memiliki satu misi untuk membuka lapangan pekerjaan

dan warga sepakat untuk membuka Obyek Wisata Banjarandap pada tahun 2020.”<sup>113</sup>

Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Obyek Wisata Banjarandap tentu saja akan memunculkan rasa dihargai di setiap individu masyarakats sehingga masyarakat juga akan memunculkan rasa memiliki sehingga nantinya mereka akan bersikap bertanggung jawab terhadap adanya obyek wisata tersebut.

Setelah seluruh masyarakat sepakat dengan didirikannya Obyek Wisata Banjarandap, kemudian masyarakat membantu kelompok pemberdayaan yang berasal dari masyarakat itu sendiri, yaitu membantu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Banjarandap. Pokdarwis Banjarandap ini yang nantinya akan mengelola dan bertanggung jawab atas seluruh program-program pemberdayaan di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari.

Selain melibatkan masyarakat lokal dalam tahap perencanaan, Pokdarwis Banjarandap juga mengajak masyarakat dalam setiap proses dan program-program pemberdayaan. Program pemberdayaan yang dilakukan oleh Pokdarwis Banjarandap dilakukan sesuai dengan Sapta Pesona, yaitu konsep sadar wisata dengan adanya dukungan dan peran aktif masyarakat sebagai tuan rumah destinasi wisata dalam menciptakan lingkungan dan suasana yang kondusif.

Program-program pemberdayaan yang digagas oleh Pokdarwis Banjarandap yaitu menciptakan Paket Wisata. Paket wisata yaitu rencana kegiatan yang disusun secara tetap dengan mematok harga tertentu dengan menawarkan program unggulan yang terdapat di Obyek Wisata. Paket wisata yang ditawarkan oleh Pokdarwis Banjarandap yaitu berupa kegiatan wisata edukasi yaitu pengolahan sampah untuk pengembangbiakan magot, tempat pembuatan kerajinan bambu dan tempat produksi teh tarik. Selain

---

<sup>113</sup> Hasil Wawancara dengan Trio Irama, selaku Ketua Pokdarwis Banjarandap, pada 26 Februari 2024.

itu juga terdapat agrowisata edukasi di Kelompok Wanita Tani (KWT) Arum Tani Desa Banjarandap mengenai pertanian.<sup>114</sup>

Tempat edukasi pengelolaan sampah untuk pengembangbiakan magot merupakan gagasan yang di usung oleh Pokdarwis Banjarandap. Pengelolaan sampah ini tentunya merupakan ide yang solutif dalam pemanfaatan limbah. Selain sebagai sarana edukasi, magot yang dihasilkan juga bisa bernilai ekonomi dengan menjual hasil ternak magot kepada peternak burung. Dengan begitu Pokdarwis Banjarandap dapat memaksimalkan hasil dari program pemberdayaan berupa pemanfaatan limbah dan juga bisa menambah pemasukan masyarakat.

Selanjutnya yaitu program tempat pembuatan kerajinan bambu. Desa Banjaran terkenal akan kerajinan anyaman bambu berupa gedeg. Kemampuan warga ini kemudian dimanfaatkan oleh Pokdarwis Banjarandap dengan menyantumkan kerajinan bambu ini sebagai wisata edukasi. Program ini akan sangat memberikan manfaat selain untuk wisatawan, tetapi juga untuk masyarakat itu sendiri karena dengan adanya program tersebut maka akan menjadi media promosi UMKM karya kerajinan tangan berupa anyaman kepada wisatawan dan akan meningkatkan nilai penjualan produk kerajinan sehingga akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dalam meningkatkan dan mengenalkan prosuk UMKM Banjarandap. Pokdarwis Banjarandap juga mendukung adanya *home industri* berupa teh tarik dengan menjadikannya sebagai kunjungan wisata. Dengan dijadikannya *home industri* teh tarik ini sebagai kunjungan maka akan meningkatkan dan mendorong UMKM teh tarik Desa Banjaran agar lebih terkenal dan sebagai sarana promosi. Selain itu, Pokdarwis Banjarandap juga mempromosikan kepada pengunjung Obyek Wisata Banjarandap dengan cara pembelian tiket masuk akan mendapatkan bonus teh tarik yang diproduksi oleh *home industri* teh tarik Desa Banjaran. Hal

---

<sup>114</sup> Data Proposal Desa Wisata Banjaran.

tersebut merupakan strategi Pokdarwis Banjarandap dalam mendukung UMKM yang ada di Desa Banjaran.

Rata-rata mata pencaharian masyarakat Desa Banjaran yaitu bekerja sebagai petani ataupun buruh tani. Hal ini dimanfaatkan oleh Pokdarwis Banjarandap dengan merencanakan program pemberdayaan berupa agrowisata edukasi oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) Arum Tani. Dengan adanya kerjasama antara Pokdarwis Banjarandap dan KWT ini selain untuk pengembangan Desa Wisata juga dijadikan sebagai media pemberdayaan masyarakat. Selain untuk media edukasi bagi para wisatawan, Pokdarwis Banjarandap juga mengayomi KWT yang mana hasil dari pertanian tersebut disalurkan ke UMKM yang terdapat di Obyek Wisata Banjarandap yang mana UMKM di Obyek Wisata Banjarandap ini merupakan UMKM kuliner sehingga hasil dari pertanian tersebut dijual kepada UMKM Banjarandap. Hal ini tentunya membawa dampak pemberdayaan bagi masyarakat karena membantu simbiosis mutualisme antar masyarakat.

Selain pengembangan UMKM, Pokdarwis Banjarandap juga mengajak masyarakat untuk melestarikan budaya dan kesenian berupa ebeg. Ebeg merupakan bentuk seni tari khas daerah Banyumasan yang terbuat dari anyaman bambu. Kerjasama ini dilakukan oleh Pokdarwis Banjarandap dengan komunitas ebeg yang ada di Desa Banjaran dengan mengadakan pagelaran ebeg setiap minggu ketiga setiap bulannya.

Program lainnya yang dilakukan oleh Pokdarwis Banjarandap yaitu pelestarian lingkungan. Kebersihan di kawasan wisata harus tetap terjaga agar pengunjung merasa nyaman. Pemandangan yang ditawarkan oleh Obyek Wisata Banjarandap yaitu berupa sungai dan bendungan. Maka dari itu, kebersihan sungai merupakan hal yang sangat penting. Dalam pelestarian lingkungan ini Pokdarwis bekerjasama dengan masyarakat lokal untuk melakukan bersih-bersih sungai setahun sekali dan penyebaran bibit ikan setiap setahun sekali agar ekosistem sungai tetap terjaga karena sungai yang ada di Obyek Wisata juga dijadikan sebagai spot pemancingan oleh

masyarakat lokal maupun luar daerah sehingga populasi ikannya pun harus tetap terjaga.

Pendekatan yang dilakukan oleh Pokdarwis Banjarandap dalam menarik simpati masyarakat agar mau ikut andil dalam setiap program pemberdayaan terbilang sangat unik. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan merangkul seluruh elemen masyarakat yang ada di Desa Banjaran dan memberikan perhatian kepada masyarakat. Hal ini di tuturkan oleh Budi Wahyono selaku Kaur Kesejahteraan Umum, yaitu sebagai berikut:

“Pendekatan yang dilakukan secara sekilas yang saya liat si mereka (Pokdarwis Banjarandap) memberikan sebuah perhatian kepada masyarakat dengan setiap ada orang yang meninggal ada santunan atau dari kelompok UMKMnya ketika ada yang sakit ada santunan. Diusahakan juga setiap hari raya itu idul fitri ya, itu RT dan RW mereka sudah mengusahakan ada sedikit bingkisan.”<sup>115</sup>

Pemberdayaan masyarakat melalui *locality development* menjadi pendekatan yang dilakukan oleh Pokdarwis Banjarandap dengan bekerjasama dengan instransi pemerintahan dan lembaga-lembaga terkait. Pokdarwis Banjarandap yang berfokus pada peningkatan dan pengembangan wisata di Desa Banjaran melibatkan masyarakat lokal dalam setiap program wisata agar masyarakat mampu ikut andil dalam pemberdayaan dirinya sendiri. Dengan mengajak masyarakat dan membangun serta meningkatkan UMKM di Obyek Wisata Banjarandap maupun UMKM yang ada di Desa Banjaran dengan dijadikan sebagai objek kunjungan wisata maka akan menjadi media promosi bagi UMKM sehingga secara tidak langsung akan mengembangkan UMKM dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata juga berfungsi sebagai alat pelestarian budaya dan lingkungan. Hal ini berhasil dilakukan oleh Pokdarwis Banjarandap dengan bekerja sama dengan komunitas kesenian ebeg yang berasal dari Desa Banjaran sendiri. Kemudian

---

<sup>115</sup> Hasil Wawancara Dengan Budi Wahyono, Pendekatan Pokdarwis Terhadap Masyarakat, 4 Maret 2024.



Pokdarwis juga menjaga kelestarian lingkungan dengan mengadakan kegiatan bersih sungai setiap setahun sekali dan juga penyebaran bibit ikan di Sungai Klawing.

Secara keseluruhan, pemberdayaan masyarakat melalui program-program pemberdayaan melalui sektor pariwisata tidak hanya mendukung peningkatan ekonomi masyarakat saja, melainkan mampu mempromosikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata mereka serta menjaga keberlanjutan budaya dan lingkungan, serta mampu membentuk landasan yang kuat guna pembangunan berkelanjutan yang menyeluruh.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan hasil analisis penelitian diatas, maka dapat diambil kesimpulan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui UMKM yang dikelola oleh Pokdarwis Banjarandap di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

1. Strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pokdarwis Banjarandap di Desa Banjaran menunjukkan bahwa strategi yang digunakan berdasarkan strategi pemberdayaan terdapat 5 (lima) bentuk strategi dan menunjukkan bahwa Pokdarwi Banjarandap menggunakan kelima bentuk strategi tersebut, diantaranya yaitu motivasi, peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan, manajemen diri, pengelolaan sumber daya serta pembangunan dan pengembangan jaringan. Selain strategi yang digagas oleh Suharto, Pokdarwis Banjarandap juga mempraktikkan strategi pemberdayaan yang digagas oleh Ismawan dalam Lin Sarinah. Diantaranya yaitu, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat, pengembangan usaha produktif dan pemberian informasi yang memadai.
2. Proses pemberdayaan masyarakat Desa Banjaran yang dilakukan oleh Pokdarwis Banjarandap berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pokdarwis Banjarandap sudah berhasil melewati proses-proses pemberdayaan secara sistematis dan terstruktur dengan melewati tahap-tahap pemberdayaan mulai dari fase persiapan, *assesment*, fase perencanaan alternatif program atau kegiatan, fase merumuskan rencana aksi, fase menjalankan program atau kegiatan, hingga fase evaluasi. Namun, pada tahap akhir pemberdayaan yaitu tahap terminasi, Pokdarwis Banjarandap belum bisa dilakukan oleh pengelola. Hal ini

dikarenakan program pemberdayaan masyarakat di Desa Banjaran masih bersifat berkelanjutan.

3. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pokdarwis Banjarandap yaitu menggunakan pendekatan *locality development*. Hal ini sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Desa Banjaran yaitu pemberdayaan masyarakat lokal. Pokdarwis Banjarandap telah berhasil mengikut sertakan masyarakat dari mulai tahap perencanaan program hingga tahap implementasi program. Program-program pemberdayaan masyarakat dirangkum oleh pokdarwis dalam program-program pengembangan pariwisata Desa Banjaran.

## **B. Saran**

### **1. Pokdarwis Banjarandap**

Pokdarwis diharapkan untuk dapat memaksimalkan kinerja dalam bidang peningkatan dan pemberdayaan masyarakat serta terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak beserta *stakeholder* agar bisa mengembangkan Desa Wisata dengan mengembangkan gagasan-gagasan baru yang inovatif dan membangun fasilitas yang memadai guna kenyamanan wisatawan dan mampu memaksimalkan seluruh potensi yang terdapat di lingkungan masyarakat. Pokdarwis Banjarandap juga diharapkan mampu mengajak seluruh masyarakat yang ada di Desa Banjaran untuk aktif dalam setiap program pemberdayaan.

### **2. Masyarakat Desa Banjaran**

Dengan ditetapkannya Desa Banjarandap sebagai Desa Wisata, diharapkan masyarakat ikut berperan aktif dalam setiap program pemberdayaan dan mampu bekerja sama dengan Pokdarwis Banjarandap serta instansi terkait. Masyarakat Desa Banjaran juga diharapkan mampu menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan dengan menerapkan Sapta Pesona sehingga akan membuat wisatawan nyaman ketika berkunjung ke Desa Banjaran.

### 3. Peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat memperoleh data yang lebih akurat, lengkap dan lebih mendalam. Selain itu, diharapkan untuk lebih teliti dalam penulisan serta penggunaan kata yang baku. Penulis berharap penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai tambahan referensi guna penelitian yang lebih akurat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, Faizul. *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*. Literasi Nusantara, 2021.
- Afandi, Syed Agung, Muslim Afandi, and Rizki Erdayani. *Pengantar Teori Pembangunan*. CV. Bintang Semesta Media, 2022.
- Aldiansyah, Bhisma Wifhanda. "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis UMKM Kopi di Desa Wisata Kampong Kopi Gombongsari Kabupaten Banyuwangi," n.d.
- Ambarwati, Diana, and Edi Murdiyanto. "Optimalisasi Peran UMKM Dan Pokdarwis Pada Wisata Sumber Banteng Dengan Media Digital Marketing Dan Marketplace." *Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (December 31, 2021): 38–46. <https://doi.org/10.55506/arch.v1i1.7>.
- Ananda, Amin Dwi, and Dwi Susilowati. "Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif di Kota Malang." *Jurnal Ilmu Ekonomi* 1, no. 1 (2017): 120–42. <https://doi.org/10.22219/jie.v1i1.6072>.
- Bahri, Efri Syamsul. *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*. FAM Publishing, 2019.
- Barokah, Ika *et al*, *Manajemen Pemasaran Pariwisata dan Indikator Pengukuran* ( Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2020).
- Bismala, Lila *et al*. *Strategi Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah*. (Medan: Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018).
- Budiarto, Rachmawan, Susetyo Hario Putero, Hempri Suyatna, Puji Astuti, Harwin Saptoadi, M. Munif Ridwan, and Bambang Susilo D. *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. UGM PRESS, 2018.
- Diatmika, I Putu Gede "Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Peran Pemerintah. Kota Malang: Ahlimedia Press, 2020.
- Damanik, Sarintan Efratani . *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEKITAR KAWASAN HUTAN*. Uwais Inspirasi Indonesia, n.d.
- Elsye, Rosmery. "Pengembangan UMKM Pada Destinasi Wisata Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung." *jurnal terapan pemerintahan*



*minangkabau* 2, no. 1 (June 25, 2022): 64–72.  
<https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i1.2399>.

Endah. “Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan.” Accessed January 11, 2024.  
<https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/3319>.

Fandi Rosi Sarwo Edi. *Teori Wawancara Psikodignostik*. 1. Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016.

Fatonah, Siti , Dian Nur Mastuti MM SE, and Arief Budhi Dharma SH Akt,CA SE,MM,MSi,MH. *Strategi Pengembangan UMKM*. Pohon Tua Pustaka, n.d.

Fibriyanti S. Lakoro, SE , S. H., and Sukrianto M.Ak SE. *Monograf: Literasi Keuangan UMKM Dalam Menghadapi Era Society 5.0 di Kabupaten Boalemo*. CV. Mitra Cendekia Media, 2022.

G, Eko Punto. “Penguatan Organisasi Pokdarwis Sebagai Ujung Tombak Pengembangan Wisata Kampung Pelangi Kota Semarang.” *Harmoni: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (December 4, 2019).

Gautama, Budhi Pamungkas, Ayu Krishna Yuliawati, Netti Siska Nurhayati, Endah Fitriyani, and Ilma Indriasri Pratiwi. “Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat.” *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (October 1, 2020): 355–69.  
<https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.414>.

Gede Dewa Hendra Divayana, S. Kom. *Evaluasi Program*. PT. RajaGrafindo Persada, 2018.

Gunartin, “Penguatan UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa”, *Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, Vol. 1 No. 5, Desember 2017, hal. 58.

Hardani, Nur Hikmatul Auliya. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu, 2020.

Arif Yusuf Hamali, *Pemahaman Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

Haris, Andi. “Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat.” *JUPITER* 13, no. 2(2014).  
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jupiter/article/view/1647>.

- Hasanah Nuramalia, SE, Dr Saparuddin Muhtar M.Si, and Indah Muliasari M.Ak SE. *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. uwais inspirasi indonesia, n.d.
- Hassan, M. dan M. Azis, *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal* (Makassar: CV. Nur Lina, 2018), Hal. 139.
- Hidayat, Ikhsan. "Analisis Data Eksploratif Capaian Indikator Kinerja Utama 3 Fakultas Teknik." *Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering* 5, no. 2 (July 11, 2023): 185–91. <https://doi.org/10.37905/jjee.v5i2.18397>.
- Hilman, Yusuf Adam, and Elok Putri Nimasari. "Model Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Komunitas." *ARISTO* 6, no. 1 (January 1, 2018): 45. <https://doi.org/10.24269/ars.v6i1.778>.
- Husin, Ishak. "Teori Organisasi." *Jurnal Gerbang STMIK Bani Saleh* 12, no. 2 (September 27, 2022): 56–66.
- Ichsan Reza Nurul *et al.*, *Ekonomi Koperasi Dan UMKM* (Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2021).
- Ibrahim, Maulana Malik . "Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya," n.d.
- Idham, S. H. *Perda tata ruang dalam dimensi pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam*. Penerbit Alumni, 2022.
- Ika Barokah Suryaningsih, S. E., Prof Dr R. Andi Sularso M.S.M, and Prof Dr Tanti Handriana M.Si S. E. *Manajemen Pemasaran Pariwisata dan Indikator Pengukuran*. Samudra Biru, 2020.
- Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Pekanbaru, Tutut Pujayanti, Dadang Mashur, and Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Pekanbaru. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program CSR PT. PJB UBJOM PLTU Tenayan di Kelurahan Industri Tenayan." *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik* 1, no. 2 (December 25, 2021): 101–16. <https://doi.org/10.35912/jasipol.v1i2.551>.
- Indah, Winandari. "Peran Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas (APIKMAS) Dalam Pengembangan UMKM di Desa Kutasari Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas." Skripsi, UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri, 2022. <https://repository.uinsaizu.ac.id/12883/>.
- Irawati, Siti Anugrahini. *Ekonomi Kreatif dan UMKM Kuliner Pendongkrak Ekonomi Rakyat*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), n.d.

- Irfandanny, Dheo, et al. "Optimalisasi Desa Wisata Berbasis UMKM Melalui Lokal Branding Desa Sumbermujur Kab. Lumajang." *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (July 12, 2022): 1084–90. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i2.5350>.
- Iswanto, Iswanto. "Ume Kbbubu Sebagai Wujud Kearifan Lokal Masyarakat Boti Dalam Menjaga Ketahanan Pangan dan Bencana." *Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya* 4, no. 2 (June 29, 2021): 199–219. <https://doi.org/10.33652/handep.v4i2.144>.
- Kinanti, Anissa, and Priyatno Harsasto. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Tematik (Studi Kasus Kampung Tahu Tempe Gumregah Di Kelurahan Lamper Tengah, Kota Semarang)." *Journal of Politic and Government Studies* 8, no. 02 (March 25, 2019): 21–30.
- Krisdiarto, Andreas Wahyu, et. all. "Pengembangan UMKM Pokdarwis Sebagai Pengrajin Makanan Khas Untuk Mendukung Desa Wisata Bokoharjo." *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (January 20, 2023): 677–88. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i1.2580>.
- Kurniawan & Mokhammad Kodir, "Analisis Pengaruh Karakteristik UMKM dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Akses Keuangan Pinjaman Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Brebes," Vol. 2, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAKA)*, 2015, hal. 31-39.
- Latifah, Ayuni. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Asosiasi Mekarsari Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang". (Semarang: UNNES), 2019.
- Listyorini, Haniek, et.all. "Penguatan Kelembagaan Pokdarwis Dalam Merintis Desa Wisata Melalui Penciptaan Identitas dan Kapabilitas Perencanaan Organisasi," n.d.
- Mafruhah, Izza et al. *Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekologi dan Edukasi Di Kawasan Waduk Kedung Ombo Sragen (2E Tourism)*. (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021).
- Mahadiansar, Khairul Ikhsan, et.all. "Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 17, no. 1 (June 26, 2020): 77–92. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.550>.
- Mahardika, Nalil Khairiah Dr Siti Hajar, et.all. *Perencanaan Pembangunan & Pembuatan Kebijakan Daerah: Dari Teori Ke Praktik*. umsu press, 2022.
- Maryani Dedeh, and Ruth Roselin E. Nainggolan. *Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish, 2019.

- Suratman, S. IP, and Abdul Aziz Zuhakim M.Si S. Sos. *Perencanaan Pengawasan Pembangunan*. Penerbit Adab, n.d.
- Muheramtohad, Singgih. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (June 1, 2017): 65–77. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.65-77>.
- Mulyono & Yumari, *Strategi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran* (Sleman: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2017).
- Nadzifah, Ulfiyatun. "Welfare Pluralism sebagai Metode Pemberdayaan di Dusun Gamol." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan* 4, no. 1 (June 24, 2020): 111–34. <https://doi.org/10.14421/jpm.2020.041-06>.
- Nugraha, Eki Aditiya, Denisya Kharisma Jelita Puteri, Tatiek Yuniarti, and Saepudin Saepudin. "Pelatihan Kepemimpinan dan Peranan Pokdarwis Dalam Pengembangan Wisata Pulau Putri di Kabupaten Karawang." *IKRA-ITH ABDIMAS* 6, no. 2 (November 3, 2022): 100–106. <https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v6i2.2412>.
- Parida, Julia, and Emei Dwinanarhati Setiamandani. "Pengaruh Strategi Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Desa" 8, no. 3 (2019).
- Pathony, Tony. "Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang." *ijd-demos* 1, no. 2 (February 26, 2020). <https://doi.org/10.31506/ijd.v1i2.23>.
- Pahlevi, Cepi dan Muhammad Ichwan Musa, *Manajemen Strategi* (Makassar: Penerbit Intelektual Karya Nusantara, 2023)
- Penyusun, Tim. *Menumbuh kembangkan Socioecopreneur Melalui Kerja Sama Strategis*. Penebar Swadaya Grup, n.d.
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 11 PM.17/PR.001/MKP Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP Tahun 2008 tentang Sadar Wisata.
- Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007 Tentang Organisasi Pedoman Kelompok Sadar Wisata dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.



Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional.

Prasetio, Deni, Amirotn Sholikhah, and Sul Khan Chakim. "Pemberdayaan Dan Pengembangan Masyarakat Lokal (Locality Development) Melalui Teras Pustaka Pada Generasi Milenial." *ICODEV: Indonesian Community Development Journal* 4, no. 1 (June 30, 2023): 47–56. <https://doi.org/10.24090/icodev.v4i1.9164>.

Primandari, Novegya Ratih M.Si S. E. et al., *Strategi Pengembangan UMKM* (Deepublish, 2023).

Pujayanti et al, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program CSR PT. PJB UBJOM PLTU Tenayan di Kelurahan Industri Tenayan," *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik* 1, no. 2 (December 25, 2021): 101–16.

Purwanti, Ingga. "Strategi Kelompok Sadar Wisata Dalam Penguatan Desa Wisata." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8, no. 3 (2019).

Primandari, Novegya Ratih, S. E., Nazipawati M.Si S. E., et.all. *Strategi Pengembangan UMKM*. Deepublish, 2023.

Rahmawati Atik, S. Sos. *Suku Laut Pulau Bertam: Sebuah Implementasi Program Pemberdayaan*. Pandiva Buku, 2015.

Ramadhani, Tiara. "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Kelompok Pembuat Kricu BaBe Di Desa Batu Belubang)." *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 2, no. 2 (December 21, 2020): 200–210. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v2i2.31>.

Riannada, Rezy, and Sjafiatul Mardliyah. "Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kencana Dalam Pengembangan Desa Wisata Adat Osing Kemiren" 10 (2021).

Rizqa, Fatharani. "Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru Pandemi Covid-19 (Studi Tentang Peran Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Banyumas (APIKMAS) di Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)." Skripsi, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2023. <https://repository.uinsaizu.ac.id/19274/>.

Rosaliza, Mita. "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Ilmu Budaya* 11, no. 2 (February 3, 2015): 71–79. <https://doi.org/10.31849/jib.v11i2.1099>.



- S, Fibriyanti, Monograf: Literasi Keuangan UMKM Dalam Menghadapi Era Society 5.0 di Kabupaten Boalemo (Solok: CV. Mitra Cendekia Media, 2022).
- Sangandji, Etta Mamang dan Sopiah, *Manajemen Strategis* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021).
- Sarinah, In, Aan Anwar Sihabudin, and Erlan Suwarlan. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5, no. 3 (August 11, 2019): 267–77. <https://doi.org/10.25147/moderat.v5i3.2709>.
- Sopiah, M. Pd, and Dr Etta Mamang Sangadji M.Si. *Manajemen Strategis Dilengkapi Kasus-Kasus Manajemen Strategis dari Perusahaan Indonesia yang Go Internasional*. Penerbit Andi, n.d.
- Sri, Maulida, and Yunani Ahmad. "Peluang Dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Berbagai Aspek Ekonomi." *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 1 (September 22, 2017): 181–97.
- Suhadi. *Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Masyarakat*. (Jawa Tengah: CV. Sarnu Untung, 2023).
- Sulastri, Lilis. "Manajemen Usaha Kecil Menengah". (Bandung: LaGood's Publishing, 2016).
- Sumantri, Bambang Agus, S Ip, Erwin Putera Permana, and M Pd. "Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)," n.d.
- Suprina, Rina, Pasaribu Pasaribu, and Adam Rachmatullah. "Penguatan Organisasi Pokdarwis di Desa Muntei, Desa Madobag dan Desa Matotonan di Pulau Siberut, Kabupaten Mentawai." *Jurnal Pemberdayaan Pariwisata* 2, no. 2 (December 23, 2020): 104–10. <https://doi.org/10.30647/jpp.v2i2.1450>.
- Suratman & Abdul Aziz Zulkhakim, *Perencanaan Pengawasan Pembangunan* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020).
- Susilorini, M.I. Retno, *et al.*, "Kearifan Lokal Jawa Tengah: Tak Lekang Oleh Waktu". (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2021).
- Taneo, Stefanus Yufra M. *et al.* *Inovasi Disruptif: Strategi Untuk Memenangkan Usaha* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2021).
- Tambunan, Tulus T. H. *UMKM Di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan*. Prenada Media, 2021.

- Tarigan, Thesalonika, and Risna Resnawaty. "Praktik dan Dampak Model Locality Development di Indonesia Terhadap Masyarakat Setempat." *Journal of Sustainable Community Development (JSCD)* 4, no. 2 (December 11, 2022): 66–73. <https://doi.org/10.32924/jscd.v4i2.70>.
- Uhai, Sabalius. "Peranan Organisasi Masyarakat Sadar Wisata (MAWASTA) Untuk Pengembangan Desa Wisata di Kalimantan Timur." *Sebatik* 25, no. 2 (December 1, 2021): 614–23. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i2.1371>.
- Umрати, and Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.
- Undang- Undang No. 20 tahun 2008
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahu 2009 Tentang Kepariwisataaan.
- Utami, Hamidah Nayati, Sandra Sandra, and Ika Ruhana. "Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pendekatan Triple Helix Untuk Pengembangan Kompetensi Wirausaha Masyarakat Desa Mandiri Energi." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 5, no. 3 (2019): 294–302. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.03.5>.
- Vinatra, Satriaji. "Peran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara Dan Masyarakat." *Jurnal Akuntan Publik* 1, no. 3 (July 6, 2023): 01–08. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i3.832>.
- Wahyudi, Amin "Sampai Juni 2023, Tercatat Ada Sekitar 900 Pengusaha Sektor Kuliner di Purbalingga", Serayunews, 17 Juli 2023, <https://serayunews.com/sampai-juni-2023-tercatat-ada-sekitar-900-pengusaha-sektor-kuliner-di-purbalingga>.
- Wahyunti, Sri. "Peran Strategis UMKM Dalam Menopang Perekonomian Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19." *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3, no. 2 (December 7, 2020): 280–302.
- Widodo Ageng. "Intervensi Pekerja Sosial Melalui Rehabilitasi Sosial." *Bina Al-Ummah*, Vol. 14, No. 2, 2019
- Wekke, Ismail Suardi. *Metode Pengabdian Masyarakat: Dari Rancangan ke Publikasi*. Penerbit Adab, n.d.
- Wispondono Moc., S. E., Dr Nurul Imamah M.E S. E., and Herry Yulistiyono M.Si. *Penguatan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Berbasis Pemecahan Masalah*. Deepublish, 2022

Yumari, Mulyono. *Strategi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran*. Deepublish, 2017.

Zulaika, Maleny, and Febby Amelia Trisakti. "Community Based Ecotourism: Partisipasi Pokdarwis Dalam Mengembangkan Objek Wisata Pantai Pelawan Kabupaten Karimun." *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi* 3, no. 5 (August 11, 2022): 295–305. <https://doi.org/10.24014/jrmdk.v3i5.18770>.

Zulkarnain, Zulkarnain, and Kukuh Miroso Raharjo. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengorganisasian Pengelola Desa Wisata*. Bayfa Cendekia Indonesia, 2022.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### *Lampiran 1. Visi dan Misi, Tugas dan Tujuan Pokdarwis Banjarandap*

Visi:

1. Menjadikan Desa Banjaran menjadi desa wisata yang indah, bersih, aman dan berdaya saing.

Misi:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan kepariwisataan.
2. Mengembangkan semua potensi yang ada di desa baik berupa SDM maupun sumber daya alam.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bidang kepariwisataan sehingga menjadi warga yang sadar wisata dengan konsep Sapta Pesona.

Fungsi Pokdarwis Banjarandap:

1. Sebagai penggerak sadar wisata di lingkungan.
2. Sebagai mitra Pemerintah, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan dan mengembangkan sadar wisata di Desa Banjaran.

Tujuan Pokdarwis Banjarandap:

1. Meningkatkan posisi dan partisipasi masyarakat sebagai subyek atau pelaku penting dalam pembangunan pariwisata, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan kepariwisataan di Desa Banjaran.
2. Membangun dan menumbuhkan sikap serta dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah yang baik melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya pariwisata di desa dan manfaatnya bagi pembangunan desa maupun kesejahteraan masyarakat
3. Memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di Desa Banjaran.

## *Lampiran 2. Pedoman Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi*

### **A. Pedoman wawancara dengan Ketua Pokdarwis Banjarandap (Trio Irama)**

1. Bagaimana awal mula berdirinya Obyek Wisata Banjarandap?

**Jawab:** Awal mulanya itu saya dan pak kades memiliki pemikiran untuk bagaimana caranya menciptakan lapangan kerja, khususnya untuk warga. Kemudian melihat ada bendungan slinga terdapat potensi untuk dijadikan obyek wisata, maka saya dan pak kades melakukan musyawarah dengan para ketua RT yang ada 25 RT yang memiliki satu misi untuk membuka lapangan pekerjaan untuk warga, kemudian kami sepakat untuk membuka Obyek Wisata Banjarandap pada tahun 2020.

2. Bagaimana awal mula berdirinya Pokdarwis Banjarandap

**Jawab:** Awal mula berdirinya Pokdarwis Banjarandap itu hampir bersamaan dengan berdirinya obyek wisata, karena untuk mengelola obyek wisata membutuhkan kelembagaan yang khusus. Untuk bidang wisata pokdarwis itu tepat karena merupakan kelompok sadar wisata.

3. Kenapa mengambil nama Banjarandap untuk penamaan Pokdarwis?

**Jawab:** Mengambil nama Banjarandap itu karena dari nama lokasi di obyek wisata sehingga dijadikan nama obyek wisata dan pokdarwis untuk lebih mudah mengingat dan mengenal.

4. Apa tujuan dari adanya UMKM di Obyek Wisata Banjarandap?

**Jawab:** Tujuan dari adanya UMKM di obyek wisata yaitu untuk pemberdayaan warga khususnya warga Banjaran untuk membuka usaha disini agar mengarah ke kesejahteraan dan kemakmuran.

5. Kapan berdirinya Obyek Wisata Banjarandap?

**Jawab:** Obyek Wisata Banjarandap itu sejak tahun 2020, tetapi baru mendapatkan SK Desa Wisata pada tanggal 19 Agustus 2023.

6. Apakah ada pertemuan khusus untuk Pokdarwis Banjarandap?

**Jawab:** Kami melakukan evaluasi setiap tanggal 4.



7. Apa yang menjadi fokus Pokdarwis Banjarandap?

**Jawab:** Yang menjadi fokus pokdarwis yaitu pembenahan karena pada tahun pertama terkendala covid dan obyek wisata ditutup. Kemudian berjalan lagi pada tahun 2022, 2023 dan ada relokasi di tahun 2022. Dulu kan pokdarwis mengelola 2 lokasi sebelah selatan tetapi karena ada aturan sempadan sungai sehingga UMKM dipindah ke belakang.

8. Apa pencapaian Pokdarwis Banjarandap selama mengelola wisata?

**Jawab:** Pencapaian dari tahun 2022-2023 yaitu meningkatkan data pengunjung. Sebelum relokasi sebenarnya sudah ada hasilnya, tetapi setelah ada relokasi seperti mulai dari 0 lagi, tetapi ini sudah mulai stabil lagi.

9. Apakah ada keunggulan setelah adanya relokasi?

**Jawab:** Sebenarnya dengan adanya relokasi menjadi lebih rapi, lebih tertib, tetapi disisi lain para pedagang yang sebelumnya tidak ngejar-ngejar wisatawan jadi ngejar-ngejar sehingga kurang tertib.

10. Apakah ada pelatihan khusus untuk pelaku UMKM?

**Jawab:** Belum ada pelatihan khusus, cuman pas ada pertemuan rutin ada beberapa pedagang yang diundang kemudian diberi motivasi dan pengarahan.

11. Apakah Pokdarwis Banjarandap ada pengembangan jaringan?

**Jawab:** Untuk pengembangan jaringan dengan investor untuk vasilitas seperti pendopo dan pintu gerbang.

12. Apakah ada sosialisasi dari pihak luar?

**Jawab:** Ada sosialisasi penguatan kelembagaan dari pihak luar itu membahas mengenai Sapta Pesona.

## **B. Pedoman wawancara dengan Kaur Kesejahteraan Umum (Budi Wahyono)**

1. Apa fungsi Pokdarwis di Desa Banjaran?

**Jawab:** Pokdarwis, Kelompok Sadar Wisata yang berfungsi untuk mengembangkan potensi wisata di Desa Banjaran.

2. Bagaimana awal mula terbentuknya Pokdarwis Banjarandap?

**Jawab:** Awal mula terbentuknya pokdarwis yaitu kita bareng sama masyarakat dan kelembagaan itu lagi melihat potensi-potensi yang ada di Desa Banjaran. Ternyata kan disitu ada bendungan Slinga, muncul ide bagaimana kalau ini dijadikan destinasi wisata. Akhirnya karena itu harus ada pokmasnya akhirnya kita dari situ membentuklah pokdarwis.

3. Apa peranan UMKM bagi masyarakat khususnya di Obyek Wisata Banjarandap?

**Jawab:** Kalau menurut penilaian saya sendiri UMKM itu sangat mendukung juga berkembangnya wisata, karena apa? Karena adanya UMKM otomatis pengunjung-pengunjung berdatangan kesitu, baik mereka mau beristirahat atau menikmati suasana, itu juga UMKM berperan menyediakan makanan, karena kan disana mayoritas UMKMnya penyedia makanan, ada sih beberapa yang berupa kerajinan, tetapi belum maksimal.

4. Ada berapa jumlah UMKM yang ada di Obyek Wisata Banjarandap?

**Jawab:** Awal UMKM terdata sekitar 60, tetapi sekarang tidak tahu pasti karena ada relokasi. Sebelum relokasi kan ada dua tempat, ada yang di sebelah selatan dan setelah relokasi berkurang.

5. Apakah Pokdarwis Banjarandap sudah mampu memberdayakan masyarakat?

**Jawab:** Selama ini mungkin sebagian kecil sudah masuk, bisa dikatakan mampu tetapi belum maksimal.

6. Apakah ada perubahan pada masyarakat dari sebelum dan setelah bergabung dengan UMKM?

**Jawab:** Ya ada, dulu kan kita mayoritas itu UMKMnya hanya satu yaitu kerajinan bambu yang setelah adanya wisata kemudian beralih dari yang tadinya kerajinan akhirnya sekarang membuat makanan. Memang sekarang yang menjadi kendalanya yaitu pengunjungnya berkurang, tetapi ya setiap harinya mereka mendapatkan hasil walaupun mungkin tidak seberapa.

7. Bagaimana peranan Pemerintah Desa dalam membantu Pokdarwis Banjarandap?

**Jawab:** Kita membantu secara administrasi, kemudian kita juga memberikan permodalan. Permodalan itu kita serahkan melalui BUMDes, karena pokdarwis kan berada di bawah naungan BUMDes. Kita ajukan permodalan, kemudian kita serahkan, BUMDes menerima, setelah itu diolah oleh BUMDes, itu kan bukan hanya satu unit wisata, juga ada unit perdagangan. Makanya kita beri modal kepada BUMDes, kemudian BUMDes mengelola mau presentasinya berapa persen.

8. Siapa saja yang terlibat dalam pembentukan Pokdarwis Banjarandap?

**Jawab:** Pihak yang terlibat yaitu seluruh lembaga dari Pemerintah Desa, perangkat dan sebagainya, masyarakat dan juga RT dan RW. Peran yang sangat penting yaitu RT dan RW. Karena mereka mulai membangun pondasinya mengenai kerja baktinya berangkat dari RT dan RW.

9. Apa kendala dalam pembentukan Pokdarwis Banjarandap?

**Jawab:** Kendalanya banyak si mba, contohnya kan gini, yang namanya merintis kan otomatis kita tidak langsung mendapatkan hasil. Nah, kendalanya itu mencari orang yang mau berjuang kemudian merintis dari 0 belum ada gaji dan sebagainya. Nah, itu kendalanya di situ. Untung di Desa Banjaran masih ada yang mau seperti itu.

10. Apa pendekatan yang dilakukan Pokdarwis Banjarandap dalam menarik simpati masyarakat?

**Jawab:** Pendekatan yang dilakukan secara sekilas yang saya lihat si mereka memberikan sebuah perhatian kepada masyarakat dengan setiap tahunnya ada orang yang meninggal, ada santunan atau dari kelompok-kelompok UMKMnya ketika ada yang sakit ada santunan. Diusahakan juag setiap hari raya itu idul fitri ya itu RT dan RW mereka sudah mengusahakan ada sedikit bingkisan.

11. Apakah dengan adanya Pokdarwis Banjarandap, Obyek Wisata Banjarandap dan UMKM ini sudah mampu memberdayakan masyarakat?

**Jawab:** Dengan adanya pokdarwis, obyek wisata dan UMKM otomatis sudah memberdayakan walaupun belum maksimal.

### C. Pedoman wawancara dengan pelaku UMKM (Wartiah, Khotimah, Isti)

1. Bagaimana cara bergabung dengan UMKM Banjarandap?

**Jawab:** Cara bergabung dengan UMKM Banjarandap itu pokdarwis mbuka lowongan buat siapa aja yang mau gabung mba.

2. Fasilitas apa yang diberikan oleh Pokdarwis Banjarandap untuk pelaku UMKM?

**Jawab:** Pokdarwis itu nyediain lapak penjualan ini mba warung-warung. Terus ada pengarahan juga mengenai cara berjualan dan tata tertib di obyek wisata

3. Apa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Banjarandap?

**Jawab:** Dulunya waktu disana itu kan (sebelum relokasi) ngga kaya disini, pedagang kan duduk nyantai di warung, pengunjung lewat, jadi jauh dari tempat pengunjung duduk. Tapi kalau ngga kesana (menawarkan ke pengunjung) ya ngga dapet uang.

4. Apakah lebih baik menjadi pedagang atau pengrajin?

**Jawab:** Ya enakan jadi pedagang tiap hari pegang uang. Kalo bikin anyaman gini kan banyak dulu (anyaman) tapi kalo jadi pedagang kan tiap hari pegang uang.

Kalo saya kan sebelum disini di PT. Tetapi kalo di PT sama pedagang ya enakan pedagang soalnya kan kalo PT masih ikut orang lain. Kalo pedagang kan punya sendiri, jadi ya saya kalo pedagang sama PT milih pedagang karena punya sendiri ngga bergantung sama orang lain. Kalo PT kan masih punya orang lain (isti).

5. Apakah ada keluhan dari pelaku UMKM?

**Jawab:** Keluhannya ya kalo sepi terus kalo hujan kan becek jadikan pengunjung ngga jadi kesini mba, jadi ya pedagang ngeluh karena ngga dapet uang, jauh juga si dari sini ke sana (warung ke tempat pengunjung duduk).

6. Terdapat keluhan mengenai harga makanan di obyek wisata, apa tanggapan ibu-ibu?

**Jawab:** Ya ngga tau orang saya njual segitu tau-tau ada kabar dari hp, saya ya ngga tau karena saya merasa jualannya sam akaya yang lain kalo harganya segini ya segini, seporsi isi berapa ya berapa, ngga pernah di mahal-mahalin gitu.

Itu kan yang ada pengunjung komplain itu isinya ada 5 atau 4 gitu, kalo saya kan 6 jadi kan kena semua, Banjarandap mahal-mahal jualannya, kesannya padahal kan engga. Satu orang contohnya kita kan jadi kebawa semua.

7. Apa harapan ibu-ibu untuk Obyek Wisata Banjarandap ke depannya?

**Jawab:** Harapan pedagang ya harus selalu lancar, wisatawan semakin maju, semakin rame harapannya, jadikan berdagangnya jadi semangat, tertib sama sopan gitu mba.

#### **D. Pedoman wawancara dengan anggota Pokdarwis Banjarandap (Saliman)**

1. Butuh waktu berapa lama untuk sebuah program terealisasikan

**Jawab:** Sebenarnya si tergantung programnya mba, tingkat kerumitannya tapi ya sekitar setengah tahun.

2. Ada berapa program yang sudah berhasil direalisasikan oleh Pokdarwis Banjarandap?

**Jawab:** Sekitar 5 atau 6 program. Salah satunya yaitu nguri-uri budaya, bersih-bersih sungai, penaburan bibit ikan, pemberdayaan UMKM sama paket wisata.

3. Apa saja yang ada di dalam paket wisata?

**Jawab:** Magot, kerajinan bambu, bikin minuman teh tarik, KWT itu yang ditanam seperti cabai, kangkung, agrowisata lah.



4. Bagaimana pendistribusian untuk hasil pertanian?

**Jawab:** Kalau KWT itu hasilnya dijual ke warung-warung sama pelanggan langsung.

5. Dari program-program yang telah disebutkan diatas apakah melibatkan masyarakat?

**Jawab:** Melibatkan, semua terlibat, kalau dari pihak luar ya investor

6. Apa pekerjaan bapak sebelum bergabung dengan Pokdarwis Banjarandap?

**Jawab:** Dulu waktu aku sebelum jadi anggota pokdarwis dulu kerja di batam, merantau di pelabuhan BUMN.

7. Apa alasan bapak bergabung ke Pokdarwis Banjarandap?

**Jawab:** Gimana ya, satunya kumpul keluarga, keduanya ya sudah menyatu dengan hati, jadi seberapa aja pun kita mau disini, kita kan mau nguri-uri budaya kita, di desa kita gitu kan.

#### **E. Pedoman wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Banjaran (Lintang Salimin)**

1. Bagaimana sejarah Desa Banjaran?

**Jawab:** Kalau sejarah kita tidak tahu secara detail. Tetapi tentang wilayah yaitu terbagi atas beberapa pedukuhan yaitu, pedukuhan sawangan, tambangan, banjaran, dan satu lagi yang agak unik yaitu dukuh limbuk yang sebelah utara kali klawing. Secara pemerintahan terdapat 5 kadus, 25 RT dan 12 RW.

Kalau sejarah secara urut-urutannya saya kurang tau persis. Kalau menurut saya desa ini sudah terbentuk secara turun temurun dari nenek moyang.

2. Apa arti nama Banjaran?

**Jawab:** Banjaran, ada 'Ban' ada 'jaran', Ban itu sabuk dan ada jaran itu kuda. Ada yang mengartikan seperti itu, sabuk kuda dan ada yang 'Banjar' dan 'an'. 'Banjar' itu Banjar dan 'an' itu tambahan

Kalo nama Banjarandap diambil dari nama tempat di zaman dahulu yang konon katanya diambil dari blok sawah sebelahutara yang sekarang sudah terkena erosi oleh air sungai.

3. Apakah Pokdarwis Banjarandap sudah mampu memberdayakan masyarakat?

**Jawab:** Menurut pengamatan saya, dengan adanya pokdarwis dan wisata itu yang pokdarwis di bawah naungan BUMDes, *alhamdulillah* ya sedikit membantu tentang kegiatan masyarakat terutama bidang UMKM, banyak pedagang-pedagang yang warung-warung itu yang mba lihat itu kebanyakan orang Banjaran, ada juga oarang luar. Berarti secara tidak langsung meningkatkan kegiatan di bidang ekonomi. Dengan begitu meningkatkan pendapatan dari yang sebelumnya belum ada pendapatan, ikut disini membuat warung jadi ada pendapatan dan meninngkatkan perekonomian.

4. Apa mata pencaharian masyarakat di Desa Banjaran sebelum adanya obyek wisata Banjarandap?

**Jawab:** Rata-rata mata pencaharian masyrakat membuat produk anyaman bambu yang sudah terkenal itu sudah puluhan tahun lah mungkin, karena sudah terkenal sekali sampai luar daerah. Jadi, produknya itu produk lokal. Namun, produk disini agak bangkrut karena ada persaingan global yaitu tembok itu yang warnanya kaya semen. Tapi ya yang banyak pesenandari daerah-daerah wisata.

*Lampiran 3. Pedoman observasi dan dokumentasi*

**PEDOMAN OBSERVASI**

1. Kondisi masyarakat Desa Wisata Banjan.
2. Kondisi serta aktivitas di Obyek Wisata Banjarandap.
3. Kondisi sara dan prasarana di Obyek Wisata Banjarandap.
4. Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Pokdarwisa Banjarandap di Desa Wisata Banjan, khususnya Obyek Wisata Banjarandap.

**PEDOMAN DOKUMENTASI**

1. Profil lengkap Desa Banjan Kecamatan Bojongsari Kabbupaten Purbalingga.
2. Profil lengkap Pokdarwis Banjarandap.
3. Foto kegiatan pemberdayaan dan fasilitas serta infrastruktur di Obyek Wisata Banjarandap.



## Lampiran 4. Dokumentasi Foto

### Lokasi, kondisi, dan fasilitas Obyek Wisata Banjarandap

	
<p><b>Pintu Masuk Obyek Wisata Banjarandap</b></p>	<p><b>View Obyek Wisata Banjarandap</b></p>
	
<p><b>Jalan Menuju Gazebo</b></p>	<p><b>View Obyek Wisata Banjarandap</b></p>
	
<p><b>Jalan Menuju Gazebo</b></p>	<p><b>View Dari Atas Jalan</b></p>
	
<p><b>View Setelah Hujan di Sekitar Gazebo</b></p>	<p><b>View Setelah Hujan Di Lokasi Atas</b></p>





**View Obyek Wisata Dari Jembatan Slinga**



**View Dari Jembatan Slinga**



**Warung/Lapak UMKM**



**Kantor Kesekretariatan**



**Pendopo**



**Saung**



**Mushola**



**WC**



**Tempat Duduk Dengan View Jembatan**



**View Dari Sebelah Timur**





**wisata Edukasi Kerajinan Bambu**



**Wisata Home Industri Teh Tarik**



**Kerajinan Bambu**



**Wisata Edukasi KWT Arum Tani**



**Wisata Edukasi Pengelolaan Sampah Untuk Ternak Magot**



**Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Desa Banjaran**



**Wawancara Dengan Pelaku UMKM**



**Wawancara Dengan Anggota Pokdarwis Banjarandap**



**Wawancara Dengan Ketua Pokdarwis Banjarandap**



**Wawancara Dengan Kaur Kesejahteraan Umum**



**Evaluasi Dan Rapat Anggota**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Dzawi Rohmawati  
Nim : 2017104070  
Tempat/tgl. Lahir : Purbalingga, 6 Agustus 2002  
Alamat : Pagerandong Rt. 03/Rw. 03 Kec.Kaligondang Kab.  
Purbalingga  
Email : [dzawi.rohmawati@gmail.com](mailto:dzawi.rohmawati@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

SD/MI : SD N 1 Pagerandong  
SMP/MTs : MTs Ma'arif NU 12 Arenan  
SMA/MA : MAN Purbalingga  
S1 : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto

### C. Pengalaman Organisasi :-



Dzawi Rohmawati  
NIM. 2017104070